



Katalog BPS: 4601003

# STATISTIK POLITIK 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK**



# STATISTIK POLITIK 2013

ISSN : 2303-2448

Nomor Publikasi : 04330.1302

Katalog BPS : 4601003

Ukuran Buku : 16 x 24 cm

Jumlah Halaman : xvi + 160

Naskah

Subdirektorat Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Politik dan Keamanan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia



## Ringkasan Eksekutif

**Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik.** Statistik Politik Tahun 2012.

Demokratisasi Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan sistem dan budaya politik. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden, yang dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet. Pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Sejak munculnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 1999, telah muncul tujuh Provinsi, 131 Kabupaten, serta 25 Kotamadya baru di seluruh Indonesia.

Demokratisasi bukan hanya fokus pada instrumen dan lembaga-lembaga pemerintahan, namun juga pada orientasi dan partisipasi politik masyarakat. Organisasi-organisasi masyarakat banyak muncul sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Pada 2009 Kementerian Dalam Negeri mengesahkan 388 Organisasi masyarakat baru, pada 2010 berjumlah 363 organisasi. Dan pada tahun 2011 sebanyak 426 organisasi. Indonesia merupakan negara paling majemuk di dunia yang memiliki kepentingan beragam dan tidak semuanya mampu ditangkap oleh pemerintah. Bukan hanya jumlah suku, dan bahasa, Indonesia juga dihuni oleh masyarakat dengan beragam agama dan kepercayaan.

<http://www.bps.go.id>

## Kata Pengantar

Tahun 2013 meniscayakan dinamika politik yang tinggi sebagai puncak dari persiapan tahun Pemilu pada 2014. Berbagai peristiwa politik terjadi dalam kurun tahun ini, utamanya yang terkait dengan kontestan Pemilu, baik partai politik maupun calon anggota legislatif (Caleg). Pada proses penetapan peserta Pemilu misalnya, dapat dilihat desakan yang kuat kepada KPU dari partai politik yang gagal lolos. Jumlah partai politik peserta Pemilu yang menyusut hingga tinggal 12, menunjukkan upaya keras KPU dalam memberlakukan seleksi yang ketat.

Selain Pemilu legislatif, rangkaian Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota juga banyak memberikan warna pada politik lokal di seluruh Indonesia. Sebagian diantaranya berlangsung alot dan berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Pilkada Maluku yang dilakukan sejak bulan Juni 2013, namun hingga buku ini terbit hasil resmi rekapitulasi suara dari KPU belum selesai dilakukan.

Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat karena ruang politik yang semakin terbuka, membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik melalui proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah. Bukan hanya melalui media massa, namun juga oleh masyarakat langsung baik melalui demonstrasi maupun pengaduan terhadap dugaan korupsi kepada KPK. Sepanjang Tahun 2012 misalnya, terdapat 6.334 pengaduan, merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Secara konsisten, buku ini juga terus memberikan perhatian pada representasi perempuan di ruang politik. Sebagai contoh, ditampilkan rekapitulasi pergantian antar waktu di DPR RI dan DPD dengan pembedaan identitas antara laki-laki dan perempuan. Data serupa juga dikumpulkan dari BPS provinsi seluruh Indonesia untuk data komposisi anggota DPRD provinsi dan kota/kabupaten. Selain itu juga terdapat data calon legislatif untuk Pemilu 2014, yang bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, namun identitas lain seperti usia dan pendidikan.

Akhirnya, semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan evaluasi maupun analisis politik pada masa mendatang baik untuk politik Indonesia yang semakin matang dan menyejahterakan.

Jakarta, Desember 2013  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia

Dr. Suryamin, M.Sc

<http://www.bps.go.id>



# Daftar Isi

	Halaman
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Grafik</b> .....	xv
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Ruang Lingkup .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>Bab 2 Metodologi</b> .....	5
2.1. Sumber Data .....	7
2.2. Metode Pengumpulan Data .....	7
2.3. Konsep dan Definisi .....	8
<b>Bab 3 Pemerintahan</b> .....	13
3.1. Sistem Pemerintahan .....	15
3.2. Pemerintah Pusat .....	15
3.2.1 Wilayah .....	18
3.2.2. Pertahanan dan Hubungan Internasional .....	18
3.3. Pemerintah Daerah .....	26
3.4. Aparatur Negara .....	41
3.5. Tata Kelola Pemerintahan .....	49
<b>Bab 4 Lembaga Demokrasi</b> .....	61
4.1. Lembaga Demokrasi .....	63
4.2. Partai Politik .....	64
4.3. MPR, DPR, dan DPD .....	67
4.4.1. DPR .....	67
4.4.2. DPD .....	81
4.4. Kekuasaan Kehakiman .....	84

4.5. Organisasi Masyarakat .....	90
4.6. Media Massa.....	95
<b>Bab 5 Pemilihan Umum.....</b>	<b>106</b>
5.1. Pemilihan Umum.....	108
5.2. Pemilu Legislatif 2014.....	109
5.3. Sistem dan Peserta Pemilu .....	112
5.4. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	121
5.5. Pemilihan Kepala Daerah .....	125
5.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .....	131
<b>Bab 6 Demokrasi dan Keragaman Indonesia .....</b>	<b>133</b>
6.1. Demokrasi.....	135
6.2. Keragaman Indonesia .....	148
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>154</b>

## Daftar Tabel

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan ..... 17
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2012 ..... 20
Tabel 3.3	Negara dengan Peringkat Kekuatan Militer Terkuat Tahun 2012 ..... 21
Tabel 3.4	Daftar Nama dan Asal Negara Sekjen ASEAN 1978-2013 ..... 22
Tabel 3.5	Jumlah dan Lokasi Kegiatan ASEAN Tahun 2012 ..... 22
Tabel 3.6	Daftar Negara menurut Jumlah Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Bidang Politik dengan Indonesia ..... 23
Tabel 3.7	Kedutaan dan Konsulat Asing di Indonesia ..... 24
Tabel 3.8	Jumlah Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ..... 24
Tabel 3.9	Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri ..... 25
Tabel 3.10	Kunjungan dan Tamu Diplomatik Kepala Negara Indonesia Tahun 2012 ..... 25
Tabel 3.11	Kunjungan dan Tamu Diplomatik Menteri Luar Negeri Indonesia Tahun 2012 ..... 26
Tabel 3.12	Jumlah Kabupaten dan Kota Menurut Provinsi Tahun 2008-2013 ..... 29
Tabel 3.13	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2012 ..... 31
Tabel 3.14	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah) Tahun 2010-2012 ..... 32
Tabel 3.15	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran Tahun (ribu rupiah) Tahun 2010-2012 ..... 33
Tabel 3.16	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah) Tahun 2010-2012 ..... 34
Tabel 3.17	Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Provinsi Tahun 2002-2009 ..... 35
Tabel 3.18	Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Tema Tahun 2002-2009 ... 36
Tabel 3.19	Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Umur Berlaku Tahun 2002-2009 ..... 37
Tabel 3.20	Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Provinsi

	Tahun 2010-2012.....	38
Tabel 3.21	Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Tema Tahun 2010-2012 .....	39
Tabel 3.22	Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Umur Berlaku Tahun 2012 .....	40
Tabel 3.23	Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2013 ..	42
Tabel 3.24	Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013	42
Tabel 3.25	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 .....	43
Tabel 3.26	Jumlah Personel POLRI menurut Kepangkatan Tahun 2010.....	44
Tabel 3.27	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin .....	45
Tabel 3.28	Jumlah Desa Menurut Kelompok Umur Kepala Desa.....	46
Tabel 3.29	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Laki-laki Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011 .....	47
Tabel 3.30	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011 .....	48
Tabel 3.31	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Tahun 2010 .....	51
Tabel 3.32	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tahun 2010 .....	52
Tabel 3.33	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tahun 2010 .....	52
Tabel 3.34	Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2009-2012 .....	53
Tabel 3.35	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Tahun 2011-2012 ....	54
Tabel 3.36	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Berdasarkan Lembaga Tahun 2011-2012 .....	55
Tabel 3.37	Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2012 .....	55
Tabel 3.38	Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2004-2012 .....	56
Tabel 3.39	Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2012 .....	56

Tabel 3.40	Jumlah Vonis Kasus Korupsi yang Diputus MA pada Tingkat Kasasi Menurut Masa Hukuman Tahun 2010-2011 .....	57
Tabel 3.41	Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Seluruh Indonesia Tahun 2012 .....	58
Tabel 3.42	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 2004-2011 .....	59
Tabel 3.43	Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 2004-2011 .....	60
Tabel 4.1	Pembubaran Partai Politik di Indonesia.....	66
Tabel 4.2	Jumlah Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999-2014.....	66
Tabel 4.3	Anggota DPR Terpilih Pada Setiap Fraksi Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
Tabel 4.4	Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Setiap Pemilu .....	70
Tabel 4.5	Jumlah Anggota Komisi DPR P RI Periode 2009-2014 Menurut Bidang Kerja .....	71
Tabel 4.6	Jumlah Anggota Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009-2014 .....	71
Tabel 4.7	Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Menurut Provinsi dan Pendidikan .....	72
Tabel 4.8	Anggota DPR dan DPD yang Berhenti Melalui Pergantian Antar Waktu.....	73
Tabel 4.9	Anggota DPR dan DPD yang Masuk Melalui Pergantian Antar Waktu .	73
Tabel 4.10	Jumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden/ Peraturan Presiden 1945-2012 .....	74
Tabel 4.11	Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang .....	76
Tabel 4.12	Jumlah Undang-Undang Paling Banyak Diuji di MK Hingga Tahun 2012.....	77
Tabel 4.13	Penggunaan Hak Angket DPR Sejak Tahun 1999 .....	78
Tabel 4.14	Penggunaan Hak Interpelasi DPR Sejak Tahun 1999 .....	79
Tabel 4.15	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	81
Tabel 4.16	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	81

Tabel 4.17	Jumlah Anggota DPD Periode 2009-2014 menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin .....	82
Tabel 4.18	Jumlah Perkara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2011-2012 ...	84
Tabel 4.19	Rincian Keadaan Perkara Masing-masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2011-2012 .....	85
Tabel 4.20	Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materil ke MA Tahun 2011 .....	85
Tabel 4.21	Produktifitas MA dalam Memutus Perkara 2011-2012.....	86
Tabel 4.22	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus yang Ditangani MA Tahun 2009-2011 .....	86
Tabel 4.23	Jumlah Tindak Pidana Khusus yang Diputus di Tingkat Kasasi menurut Jenis/Lamanya Hukuman Tahun 2010-2011 .....	87
Tabel 4.24	Rekapitulasi Perkara Masuk Mahkamah Konstitusi .....	87
Tabel 4.25	Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga .....	88
Tabel 4.26	Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah ....	88
Tabel 4.27	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Kegiatan Lembaga Non Profit Tahun 2011 .....	91
Tabel 4.28	Organisasi Masyarakat – Nahdatul Ulama .....	92
Tabel 4.29	Organisasi Masyarakat – Muhammadiyah .....	92
Tabel 4.30	Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Bidang Kerja .....	93
Tabel 4.31	Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Benua Asal .....	93
Tabel 4.32	Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Kantor Pusat .....	93
Tabel 4.33	Kebebasan Pers Asia-Pasifik Tahun 1995-2000 .....	96
Tabel 4.34	Kebebasan Pers Asia-Pasifik Tahun 2001-2006 .....	97
Tabel 4.35	Kebebasan Pers Asia-Pasifik Tahun 2007-2013 .....	98
Tabel 4.36	Kelompok Surat Kabar .....	99
Tabel 4.37	Tiras Media Cetak Tahun 2006 - 2010 .....	99
Tabel 4.38	Rekapitulasi Media Cetak Berdasarkan Provinsi Tahun 2010-2012 .....	100
Tabel 4.39	Rekapitulasi Media Elektronik Berdasarkan Provinsi Tahun 2010-2012	101
Tabel 4.40	Pengaduan pada Dewan Pers Tahun 2010 .....	102

Tabel 4.41	Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Program TV yang Dapat Diterima Tahun 2011 .....	103
Tabel 4.42	Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Sinyal Telepon Genggam Tahun 2011 .....	104
Tabel 5.1	Jumlah TPS dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014 .....	110
Tabel 5.2	Daftar Calon Tetap DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi	113
Tabel 5.3	Jenis Kelamin Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi	114
Tabel 5.4	Jenis Kelamin Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik .....	115
Tabel 5.5	Usia Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik ....	115
Tabel 5.6	Usia Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi .....	116
Tabel 5.7	Pendidikan dan Gelar Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi .....	117
Tabel 5.8	Pendidikan dan Gelar Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik .....	118
Tabel 5.9	Tempat Lahir dan Tempat Tinggal Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik .....	118
Tabel 5.10	Tempat Lahir dan Tempat Tinggal Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi .....	119
Tabel 5.11	Daerah Pemilihan Umum 2014 .....	121
Tabel 5.12	Komposisi Jenis Kelamin DPRD Provinsi Tahun 2010-2012 .....	122
Tabel 5.13	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Perempuan Tahun 2012 .....	123
Tabel 5.14	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur .....	125
Tabel 5.15	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi .....	126
Tabel 5.16	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih .....	127
Tabel 5.17	Kepala Daerah Hasil Pilkada Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Sebelumnya .....	128
Tabel 5.18	Jenis Kelamin Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kota dan Kepala Daerah Terpilih Melalui Jalur Perseorangan .....	129
Tabel 5.19	Sengketa Pemilu di MK .....	131

Tabel 5.20	Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah .....	131
Tabel 6.1	Status Demokrasi Negara-Negara Dunia Tahun 1972-2012 .....	136
Tabel 6.2	Tren Perkembangan Kebebasan Global .....	137
Tabel 6.3	Indeks Demokrasi Dunia berdasarkan Rezim .....	137
Tabel 6.4	Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007 – 2012 Versi <i>The Economist</i> .....	137
Tabel 6.5	Skor IDI menurut Provinsi Tahun 2009-2012 .....	138
Tabel 6.6	Indeks Demokrasi Indonesia 2009 .....	139
Tabel 6.7	Indeks Demokrasi Indonesia 2010 .....	140
Tabel 6.8	Indeks Demokrasi Indonesia 2011 .....	141
Tabel 6.9	Indeks Demokrasi Indonesia 2012 .....	142
Tabel 6.10	Skor Tertinggi Tiap Aspek menurut Provinsi Tahun 2009.....	143
Tabel 6.11	Skor Tertinggi Tiap Aspek menurut Provinsi Tahun 2010.....	144
Tabel 6.12	Skor Tertinggi Tiap Aspek menurut Provinsi Tahun 2011.....	145
Tabel 6.13	Skor Tertinggi Tiap Aspek menurut Provinsi Tahun 2012.....	146
Tabel 6.14	Jumlah Penduduk menurut Suku Bangsa .....	148
Tabel 6.15	Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Jenis Kelamin .....	149
Tabel 6.16	Banyaknya Desa Menurut Keragaman Agama dan Suku .....	150
Tabel 6.17	Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut .....	151
Tabel 6.18	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut .....	152



## Daftar Grafik

	<b>Halaman</b>
Grafik 3.1	Komposisi Menteri Berdasarkan Jenis Kelamin 1999 - 2011 ..... 17
Grafik 3.2	Pemekaran Daerah di Indonesia 1999 – 2013 ..... 28
Grafik 4.1	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 1955 – 2014 ..... 65
Grafik 4.2	Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan ..... 69
Grafik 4.3	Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPR-RI 2009-2014 ..... 69
Grafik 4.4	Latar Belakang Profesi Anggota DPD 2009 – 2014 ..... 81
Grafik 4.5	Jumlah Pengesahan Organisasi Masyarakat 2009 - 2011 ..... 90
Grafik 4.6	Status Kebebasan Pers Indonesia Tahun 1994-2013 ..... 95
Grafik 5.1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 1955-2009 ..... 109
Grafik 5.2	Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi pada Pemilu 1999-2014 ..... 111



# PENDAHULUAN

1

<http://www.ms-go.id>



## 1.1. Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam *real* politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Disamping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu Tahun 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di DPR RI dengan memberlakukan *parliamentary threshold* (PT). Ketentuan PT membatasi hanya partai dengan perolehan suara nasional minimal sebesar 2,5% pada Pemilu Tahun 2009 dan bertambah menjadi 3,5% untuk Pemilu 2014 yang boleh masuk dalam parlemen.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi *civil society*. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap

(DCT) dengan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokratisasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui publikasi Statistik Politik 2013 ini, berbagai fenomena politik yang terjadi hingga Tahun 2013 dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala sebagai lanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penulisan publikasi Statistik Politik 2013 ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik politik Indonesia secara berkala yang dapat dibandingkan antar waktu dan daerah.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Statistik Politik 2013 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat, daerah, hingga luar negeri.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Publikasi ini terdiri dari enam bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang metodologi membahas sumber data, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi. Bab 3 tentang pemerintahan, yang membahas sistem pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur negara, serta tata kelola pemerintahan.

Bab 4 membahas Lembaga Demokrasi yang membahas partai politik, MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan kehakiman, organisasi masyarakat, serta media massa. Bab 5 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari bahasan tentang Pemilu 2009, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan kepala daerah, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Bab 6 tentang Demokrasi dan Keragaman Indonesia, mengulas tentang berbagai pengukuran demokrasi di dunia dan Indonesia, serta keragaman suku dan agama di Indonesia.

# METODOLOGI

2

<http://www.ms-go.id>





Bab kedua membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Mengingat bahasan mengenai politik cukup luas, maka perlu adanya pembatasan pembahasan. Konsep dan definisi diperlukan untuk memberikan pengertian yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

## 2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2013 ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yaitu data tentang Penduduk menurut Suku Bangsa dan Penduduk menurut Agama. Data BPS lain juga ditemui pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Potensi Desa 2011 serta Statistik Keuangan Daerah 2008 - 2012.

Publikasi ini juga mengambil data dari instansi lain di tingkat pusat diantaranya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat DPR RI, Badan Kepegawaian Negara, Dewan Pers, Komisi Kepolisian nasional, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan media massa baik cetak maupun elektronik.

Di tingkat daerah, sumber data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, dan Sekretariat DPRD. Data di tingkat daerah dikumpulkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi pengumpulan dilakukan oleh BPS provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota pengumpulan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data

Data untuk menyusun Statistik Politik 2013 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Untuk keseragaman format data antar daerah, pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen pengumpulan data yang telah disusun di BPS Pusat dengan maksud untuk memudahkan petugas mengumpulkan data. Dua instrumen yang telah disusun berupa rancangan (*dummy*) tabel dan kuesioner. Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah diberikan kebebasan untuk memilih instrumen yang dianggap paling sesuai untuk pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data di daerah,

kenyataan di lapangan menemukan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data yang tersedia di instansi sumber data, bahkan juga termasuk ketersediaan data. Kondisi tersebut menjadi penyebab beberapa data dari daerah tidak bisa disajikan dalam publikasi ini. Untuk mengatasi kekurangan ini kami melakukan kompilasi data-data dari lembaga negara yang berada di pusat.

### 2.3. Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2013, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

**Affirmative Action** adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) untuk sementara, demi mencapai tujuan tertentu. Implementasi *affirmative action* dalam Pemilu 2009 dan 2014 diatur lewat Undang-Undang Pemilu dimana sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) adalah perempuan, serta diantara 3 (tiga) calon dalam DCT minimal terdapat satu orang perempuan. Selain itu, didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, selain syarat pendirian partai politik, pengurus dewan pimpinan pusat partai politik juga harus terdapat minimal 30% perempuan.

**ASEAN** adalah organisasi regional yang beranggotakan 10 negara yang berada di Asia Tenggara, diantaranya; Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, dan Kamboja.

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, badan ini disebut Panitia Pengawas Pemilu.

**Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)** adalah harga suara sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih pada suatu daerah pemilihan (Dapil) dibagi jumlah kursi yang diperebutkan.

**Calon Independen/Calon Perseorangan** adalah seorang yang menjadi kandidat dalam Pemilu Kepala daerah (Pilkada) tanpa melalui partai politik. Calon independen mulai dikenal melalui UU No. 12/2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Calon Legislatif (Caleg)** adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

**Calon Presiden/Wakil Presiden** adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No.42/2008).

**Daerah Otonom**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

**Daerah Pemilihan (Dapil)** adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta Pemilu.

**Daftar Calon Tetap (DCT)** adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat pusat, daerah, dan DPD.

**Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

**Dewan Perwakilan Daerah (DPD)** adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

**Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

**Electoral Threshold** adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya.

**Golongan Putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

**Hak Angket** adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 27/2009).

**Hak Interpelasi** adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 27/2009).

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)** adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

**Mahkamah Konstitusi** adalah salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)** adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden serta merubah dan menetapkan Undang Undang Dasar. MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu legislatif.

**Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004).

**Parliamentary Threshold (PT)** adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat masuk DPR. Sejauh ini Indonesia hanya memberlakukan PT untuk pemilihan DPR. Pada Pemilu 2014 PT akan diberlakukan juga hingga pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, namun akhirnya pasal yang mengatur hal tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Pada Pemilu 2009 *parliamentary threshold* sebesar 2,5% dan Pemilu 2014 sebesar 3,5%.

**Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

**Partisipasi Politik** adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

**Pemerintah Daerah** adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah serta DPRD (UU No.32/2004).

**Pemekaran Daerah** adalah pembentukan wilayah administratif pemerintahan baru dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa.

**Pemerintah Pusat** adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari Presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu Presiden.

**Pemilih** adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No.8/2012).

**Pemilihan Kepala Daerah**, selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati/walikota. Pemilihan dilakukan secara langsung dan diadakan setiap lima tahun sekali menjelang selesainya masa jabatan seorang kepala daerah.

**Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.8/2012).

**Penduduk** adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

**Perjanjian Bilateral** adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara.

**Peserta Pemilu Legislatif** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

**Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** adalah pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

**Sengketa Hasil Pemilu** adalah sengketa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah menyangkut hasil Pemilu dan Pilkada. Sejak Pemilu 2009, sengketa Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

**Suku Bangsa** adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dalam bentuk kebudayaan atau bahasa serta (asal) wilayah.

**Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (UU No.10/2008).

**PEMERINTAHAN**

**3**

<http://www.ins-go.id>





### 3.1. Sistem Pemerintahan

Pasal satu Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat (Budiardjo, 2008: 269). Pemencaran kekuasaan negara dilaksanakan secara vertikal yang menempatkan kedaulatan negara pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah menjalankan kewenangan otonomi pada tingkat daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat.

Selain secara vertikal, pemencaran kekuasaan negara juga berlaku secara horizontal atau yang biasa disebut dengan pembagian fungsi. Maknanya pembagian fungsi merupakan pemencaran fungsi negara pada berbagai struktur pemerintahan yang satu dan yang lain, mempunyai hubungan sederajat, tidak saling membawahkan, tetapi berhubungan secara fungsional dalam usaha bersama mencapai tujuan negara. Pembagian fungsi lazim merujuk terminologi Montesquieu yang membagi menjadi peran lembaga negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh Surbakti (2010:220-221) penggunaan istilah ini dianggap tidak terlalu tepat, jika dibandingkan dengan terminologi Almond yang mengkategorikan menjadi; pembuatan peraturan (*rule making*), penerapan peraturan (*rule application*), dan penghakiman peraturan (*rule adjudication*). Dalam konteks Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945 Pasal 24 ayat 2, lembaga pembuat peraturan terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, lembaga pelaksana peraturan Presiden dan Kabinet, lembaga penghakiman peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

### 3.2. Pemerintah Pusat

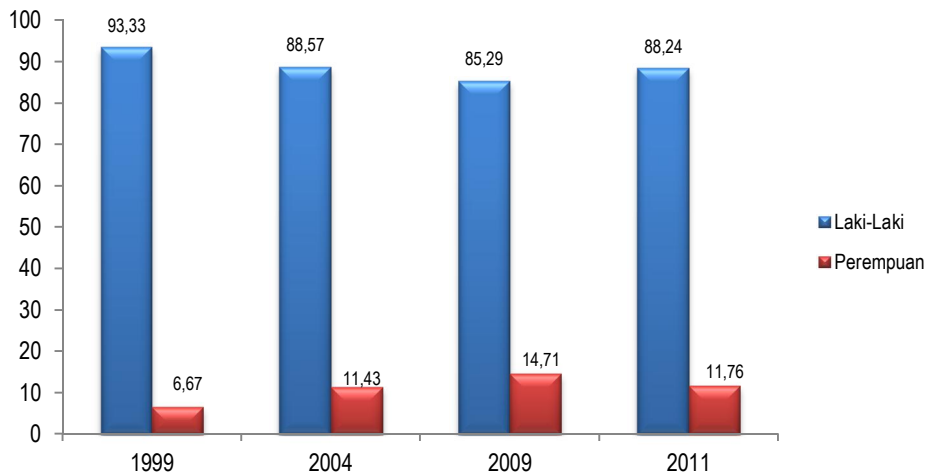
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana pada sistem ini kekuasaan Presiden sangat besar. Surbakti (*ibid*, 219) menguraikan fungsi presiden dalam pemerintahan presidensial ke dalam enam bagian. Pertama, sebagai kepala negara Presiden melaksanakan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa-negara. Kedua, sebagai kepala eksekutif dia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum. Ketiga, sebagai kepala legislatif dia mengajukan rancangan undang-undang kepada badan perwakilan rakyat, dan berusaha meyakinkan para wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya. Keempat, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kelima, sebagai

pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Keenam, sebagai pemimpin partai.

Sejak Indonesia merdeka sebanyak 6 orang pernah menjabat sebagai presiden dan 11 orang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Tabel 3.1 menyajikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut masa pemerintahan. Dua periode pemerintahan terakhir dipimpin oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. Tabel 3.1 juga memperlihatkan bahwa pada beberapa periode pemerintahan, Presiden memimpin pemerintahan seorang diri tanpa didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Selain pasangan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Tabel 3.1, secara *de facto* sejarah Indonesia juga pernah mempunyai pimpinan pemerintahan di masa transisi yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Mr. Assaat yang merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia ketika konsensus Konferensi Meja Bundar menghasilkan Republik Indonesia Serikat dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Menurut Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menganut kabinet presidensial. Menteri adalah pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sejarah Indonesia mencatat bahwa sistem kabinet presidensial pernah ditinggalkan dan beralih ke kabinet parlementer sehingga pimpinan kabinet dipegang seorang perdana menteri. Namun demikian melalui Dekrit Presiden Tahun 1959, Indonesia kembali ke sistem kabinet presidensial. Jumlah kementerian dan jumlah menteri bervariasi dari satu periode ke periode pemerintahan yang berbeda. Saat ini terdapat 3 kementerian koordinator, 31 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, dan 24 lembaga non-kementerian. Berdasarkan jenis kelamin, anggota kabinet sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Sejak era reformasi dimana kesadaran akan hak-hak politik perempuan semakin meningkat, jumlah anggota kabinet perempuan tidak pernah lebih dari 15% (grafik 3.1).

**Grafik 3.1. Komposisi Menteri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1999-2011**



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

**Tabel 3.1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan**

Presiden	Wakil Presiden	Masa Pemerintahan
(1)	(2)	(3)
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	14 Juli 1949 – 27 Desember 1949
Ir. Soekarno	Tidak ada Wakil Presiden	27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta <sup>1)</sup>	17 Agustus 1950 – 22 Februari 1967
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	22 Februari 1967 – 27 Maret 1968
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	27 Maret 1968 – 24 Maret 1973
H.M. Soeharto	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	24 Maret 1973 - 23 Maret 1978
H.M. Soeharto	H. Adam Malik Batubara	23 Maret 1978 - 11 Maret 1983
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) R. Umar Wirahadikusuma	11 Maret 1983 - 11 Maret 1988
H.M. Soeharto	Letjend (Purn) Soedharmono, SH	11 Maret 1988 - 11 Maret 1993
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) Try Sutrisno	11 Maret 1993 - 10 Maret 1998
H.M. Soeharto	Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie	10 Maret 1998 - 21 Mei 1998
Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie	Tidak ada wakil presiden	21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999
KH. Abdurahman Wahid	Hj. Megawati Soekarnoputri	20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001
Hj. Megawati Soekarnoputri	Dr (HC) H. Hamzah Haz	23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Prof. Dr. Boediono	20 Oktober 2009 - Sekarang

Keterangan:

1) Menjadi wakil presiden sampai 1 Desember 1956

- Pada Periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, setelah Belanda melakukan penangkapan dan pengasingan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Masyumi) mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

- Pada Periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950, Mr. Assaat merupakan pemangku jabatan sementara Presiden Republik Indonesia setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan terbentuknya Republik Indonesia Serikat dibawah pemerintahan Ir. Soekarno sebagai Presiden

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

### 3.2.1. Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah 1.910.931,32 KM<sup>2</sup>. Survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menyebutkan jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.000 pulau. Di antara jumlah pulau tersebut, secara administratif terbagi menjadi 34 provinsi 410 Kabupaten serta 98 Kota (2013). Provinsi dengan wilayah terluas adalah Papua dengan luas 319.036,05 km<sup>2</sup>, disusul Kalimantan Tengah dengan luas 153.564,50 km<sup>2</sup>. Sebaliknya, tiga Provinsi dengan luas wilayah paling kecil adalah DKI Jakarta dengan luas 664,01 km<sup>2</sup>, DI Yogyakarta 3.133,15 km<sup>2</sup>, serta Bali 5.780,06 km<sup>2</sup>. Indonesia dihuni penduduk dengan jumlah 237.641.326 jiwa. Di antara penduduk tersebut sebanyak 119 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 118 juta jiwa berjenis kelamin perempuan (Tabel 3.2).

### 3.2.2 Pertahanan, dan Hubungan Internasional

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Dengan membandingkan data CIA (US Library Congress, 2012), situs Globalfire menempatkan kekuatan militer Indonesia pada peringkat 18 di dunia. Pada level Asia, Indonesia menempati posisi 8 di bawah China, India, Korea Selatan, Jepang, Iran, Taiwan, Pakistan. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara kekuatan militer Indonesia dinilai paling kuat, dibandingkan dengan Thailand, Filipina atau Malaysia. Dari sisi peralatan Indonesia tidak sepenuhnya unggul dari negara-negara Asia Tenggara. Namun pemerinkatan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti; jumlah penduduk, usia penduduk angkatan perang, hingga produksi minyak dalam negeri. Pada tahun 2013, situs yang sama menempatkan Indonesia pada peringkat 15 dunia. Pada tingkat Asia, Indonesia menempati urutan ke-5, dibawah China, India, Korea, Selatan, Pakistan. Tiga negara Asia yang turun posisinya dibawah Indonesia diantaranya Jepang, Iran, dan Taiwan. Pada tingkat Asia Tenggara, Indonesia masih merupakan kekuatan utama, disusul oleh Thailand pada peringkat 20.

Pemerinkatan yang dilakukan situs Globalfire dilakukan pada 68 negara dengan mempertimbangkan 40 faktor diluar kemampuan nuklir. Rangkaian yang disusun, terbatas pada potensi kemampuan perang konvensional masing-masing negara di darat, laut, dan udara yang juga terkait dengan logistik, posisi geografis, serta kemampuan finansial. Tidak semua data tentang kekuatan militer tersedia atau bisa diakses, sehingga dalam kasus tertentu data merupakan hasil estimasi. Pembaruan data terakhir dilakukan oleh globalfirepower pada 8

Januari 2013. Negara dengan peringkat kekuatan militer teratas tahun 2012 ditampilkan pada Tabel 3.3.

Pada organisasi ASEAN Indonesia memiliki peran yang besar, bahkan disebut sebagai pemimpin alami ASEAN (Chandra, 2009: 234 dalam Wibowo & Hadi [ed], 2009). Asumsi tersebut didasarkan pada peran Indonesia sebagai salah satu inisiator utama terbentuknya organisasi ASEAN dan merupakan kekuatan politik penting di Asia Tenggara. Selain menjadi tempat sekretariat ASEAN, Indonesia juga telah tiga kali pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN, paling banyak di antara negara-negara anggota lain. Sekalipun jabatan Umarjadi Notowijono hanya 4 bulan, negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, baru dua kali menjabat sebagai Sekjen ASEAN. Brunei Darussalam hanya satu kali, sementara Myanmar dan Laos bahkan belum pernah menjabat. Vietnam memiliki kesempatan pertama menjadi Sekjen ASEAN semenjak 1 Januari 2013. Le Luong Minh yang merupakan mantan Deputy Menteri Luar Negeri Vietnam, menggantikan Surin Pitsuwan dari Thailand yang habis masa jabatannya pada 31 Desember 2012 (Tabel 3.4).

Sepanjang tahun 2012 – 2013 ASEAN melakukan banyak kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan di negara-negara ASEAN. Berdasarkan ASEAN Annual Report 2012 – 2013 agenda kegiatan ASEAN lebih banyak dilakukan di tahun 2012 dengan 410 *meeting* jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sejumlah 229 *meeting*. Sekalipun demikian kalender kegiatan dalam *Annual Report* hanya meliputi periode 1 Juni 2012 hingga 31 Mei 2013. Sepanjang 2012- 2013, kegiatan paling banyak dilakukan di Indonesia dan Thailand dengan jumlah masing – masing sebanyak 68 dan 44 *meeting*. Jumlah tempat paling sedikit digunakan untuk lokasi kegiatan ASEAN adalah Myanmar, dimana sepanjang 2012 – 2013 hanya dilakukan sebanyak 11 kali *meeting*. Data lengkap untuk kalender kegiatan ASEAN tahun 2012 - 2013 ditampilkan pada Tabel 3.5.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia juga aktif melakukan perjanjian-perjanjian politik dengan negara lain. Hingga tahun 2011, tercatat Indonesia pernah melakukan 2.929 perjanjian bilateral dengan 134 negara di seluruh dunia. Sebagian negara yang pernah melakukan perjanjian bilateral dengan Indonesia telah terpecah menjadi beberapa negara seperti Uni Sovyet, Cekoslowakia, serta Yugoslavia. Di antara jumlah tersebut, 166 di antaranya adalah perjanjian di bidang politik (5,66%). Sebanyak 29 negara yang memiliki lebih dari satu perjanjian bilateral bidang politik, serta yang memiliki perjanjian bilateral terbanyak dengan Indonesia ditampilkan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2012**

Provinsi	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	57.956,00	2.248.952	2.245.458	4.494.410
Sumatera Utara	72.981,23	6.483.354	6.498.850	12.982.204
Sumatera Barat	42.012,89	2.404.377	2.442.532	4.846.909
Riau	87.023,66	2.853.168	2.685.199	5.538.367
Jambi	50.058,16	1.581.110	1.511.155	3.092.265
Sumatera Selatan	91.592,43	3.792.647	3.657.747	7.450.394
Bengkulu	19.919,33	877.159	838.359	1.715.518
Lampung	34.623,80	3.916.622	3.691.783	7.608.405
Kep. Bangka Belitung	16.424,06	635.094	588.202	1.223.296
Kepulauan Riau	8.201,72	862.144	817.019	1.679.163
DKI Jakarta	664,01	4.870.938	4.736.849	9.607.787
Jawa Barat	35.377,76	21.907.040	21.146.692	43.053.732
Jawa Tengah	32.800,69	16.091.112	16.291.545	32.382.657
DI Yogyakarta	3.133,15	1.708.910	1.748.581	3.457.491
Jawa Timur	47.799,75	18.503.516	18.973.241	37.476.757
Banten	9.662,92	5.439.148	5.193.018	10.632.166
Bali	5.780,06	1.961.348	1.929.409	3.890.757
Nusa Tenggara Barat	18.572,32	2.183.646	2.316.566	4.500.212
Nusa Tenggara Timur	48.718,10	2.326.487	2.357.340	4.683.827
Kalimantan Barat	147.307,00	2.246.903	2.149.080	4.395.983
Kalimantan Tengah	153.564,50	1.153.743	1.058.346	2.212.089
Kalimantan Selatan	38.744,23	1.836.210	1.790.406	3.626.616
Kalimantan Timur*	204.534,34	1.871.690	1.681.453	3.553.143
Sulawesi Utara	13.851,64	1.159.903	1.110.693	2.270.596
Sulawesi Tengah	61.841,29	1.350.844	1.284.165	2.635.009
Sulawesi Selatan	46.717,48	3.924.431	4.110.345	8.034.776
Sulawesi Tenggara	38.067,70	1.121.826	1.110.760	2.232.586
Gorontalo	11.257,07	521.914	518.250	1.040.164
Sulawesi Barat	16.787,18	581.526	577.125	1.158.651
Maluku	46.914,03	775.477	758.029	1.533.506
Maluku Utara	31.982,50	531.393	506.694	1.038.087
Papua	319.036,05	402.398	358.024	760.422
Papua Barat	97.024,27	1.505.883	1.327.498	2.833.381
<b>Jumlah</b>	<b>1.910.931,32</b>	<b>119.630.913</b>	<b>118.010.413</b>	<b>237.641.326</b>

\*Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran pada Oktober 2012, terbagi dua menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2011) dan Sensus Penduduk BPS (2010)

**Tabel 3.3 Negara Dengan Peringkat Kekuatan Militer Terkuat Tahun 2012**

Peringkat	Negara	Militer Aktif	Senjata Darat	Pesawat Tempur	Kapal Perang	Anggaran Pertahanan (juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Amerika	1.477.896	134.838	21.958	290	689.591
2	Rusia	1.200.000	164.409	6.133	224	64.000
3	China	2.285.000	173.900	5.949	972	129.272
4	India	1.325.000	139.855	2.582	170	44.282
5	Inggris	224.500	38.024	1.779	77	57.875
6	Prancis	612.900	37.756	954	180	58.244
7	Jerman	653.000	28.737	1.418	67	43.478
8	Korea Selatan	362.485	67.681	968	190	28.280
9	Italia	293.202	23.843	1.127	179	31.946
10	Brazil	371.199	38.113	1.076	106	31.576
11	Turki	612.900	94.796	2.082	183	18.687
12	Pakistan	617.000	41.769	2.120	75	5.685
13	Israel	187.000	35.189	794	65	15.209
14	Mesir	468.500	110.627	1.063	221	4.107
15	Indonesia	438.410	27.115	631	150	5.220
16	Iran	545.000	48.333	2.658	408	10.687
17	Jepang	239.430	9.932	1.510	138	54.529
18	Taiwan	290.000	31.473	1.087	49	8.888
19	Kanada	68.250	16.197	562	33	23.082
20	Thailand	305.860	14.212	1.026	596	5.114
21	Meksiko	259.770	21.050	778	190	5.723
22	Ukraina	159.000	30.333	861	37	3.863
23	Australia	47.135	15.888	483	54	22.955
24	Polandia	100.000	21.211	883	94	9.150
25	Vietnam	412.000	19.829	862	161	2.487
26	Swedia	25.000	7.742	312	192	5.960
27	Arab Saudi	233.500	27.343	1345	23	46.219
28	Ethiopia	182.500	4.138	215	-	286
29	Korea Utara	1.106.000	71.680	1904	708	7.000
30	Spanyol	177.000	7.458	830	93	14.000

Sumber: Diolah dari CIA, U.S Library Congress dalam [globalfirepower.com](http://www.globalfirepower.com) (2013)

**Tabel 3.4 Daftar Nama dan Asal Negara Sekjen ASEAN 1978 - 2013**

<b>Nama Sekjen</b>	<b>Negara Asal</b>	<b>Masa Jabatan</b>
(1)	(2)	(3)
Hartono Rekso Dharsono	Indonesia	7 Juni 1976 - 18 Februari 1978
Umarjadi Notowijono	Indonesia	19 Februari - 30 Juni 1978
Datuk Ali Bin Abdullah	Malaysia	10 Juli 1978 - 30 Juni 1980
Narciso G. Reyes	Filipina	1 Juli 1980 - 1 Juli 1982
Chan Kai Yau	Singapura	18 Juli 1982 - 15 Juli 1984
Phan Wannamethee	Thailand	16 Juli 1984 - 15 Juli 1986
Roderick Yong	Brunei Darussalam	16 Juli 1986 - 16 Juli 1989
Rusli Noor	Indonesia	17 Juli 1989 - 1 Januari 1993
Datuk Ajit Singh	Malaysia	1 Januari 1993 - 31 Desember 1997
Rodolfo C. Severino	Filipina	1 Januari 1998 - 31 Desember 2002
Ong Keng Yong	Singapura	1 Januari 2003 - 31 Desember 2007
Surin Pitsuwan	Thailand	1 Januari 2008 - 31 Desember 2012
Le Luong Minh	Vietnam	1 Januari 2013 - Sekarang

Sumber: ASEAN Annual Report (2013)

**Tabel 3.5 Jumlah dan Lokasi Kegiatan ASEAN Tahun 2012**

<b>Negara</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(1)	(2)	(3)
Kamboja	72	9
Brunei	11	72
Indonesia	33	35
Vietnam	10	10
Malaysia	18	20
Philippine	10	9
Singapore	14	6
Thailand	21	23
Myanmar	5	6
Laos	10	16
Non - Asean	206	23
<b>Total</b>	<b>410</b>	<b>229</b>

Sumber: Diolah dari ASEAN Calendar of Meeting 2012 - 2013

(Juni 2012 - 31 Mei 2013) - ASEAN Annual Report 2012 -2013



**Tabel 3.6 Daftar Negara menurut Jumlah Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Bidang Politik dengan Indonesia**

No	Negara	Jumlah Perjanjian Bilateral	No	Negara	Jumlah Perjanjian Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jepang	412	1	Belanda	23
2	Amerika Serikat	259	2	Malaysia	9
3	Australia	183	3	Australia	9
4	Jerman	132	4	China	7
5	Kanada	114	5	Jepang	6
6	Prancis	111	6	India	6
7	Malaysia	86	7	Pakistan	5
8	China	82	8	Prancis	4
9	Belanda	77	9	Filipina	4
10	Belgium	69	10	Iran	4
11	Italy	58	11	Jerman	3
12	Korea Selatan	54	12	Kanada	3
13	Filipina	51	13	Romania	3
14	India	43	14	Vietnam	3
15	Iran	39	15	Timor Leste	3
16	Inggris	38	16	Usbekistan	3
17	Romania	38	17	Bulgaria	2
18	Vietnam	37	18	Thailand	2
19	Russia	34	19	Egypt	2
20	Singapura	34	20	Hongaria	2
21	Bulgaria	33	21	Aljazair	2
22	Thailand	33	22	Korea Utara	2
23	Swiss	31	23	Irak	2
24	Polandia	30	24	Cambodia	2
25	Egypt	29	25	Ukraina	2
26	Hongaria	29	26	Kyrgystan	2
27	Pakistan	29	27	Kazakhstan	2
28	Tunisia	24	28	Portugal	2

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2011)

Persahabatan antara dua negara ditandai dengan adanya kedutaan besar. Indonesia memiliki 95 kedutaan besar di luar negeri. Di Indonesia terdapat 94 kedutaan besar negara sahabat, dengan komposisi yang sebagian besar adalah negara-negara di Asia. Jumlah kedutaan besar Indonesia di luar negeri dengan jumlah kedutaan besar negara sahabat yang ada di Indonesia relatif seimbang, jika dibandingkan dengan jumlah konsulat jenderal Indonesia di luar negeri yang berjumlah 34 sedangkan konsulat jenderal negara sahabat di Indonesia berjumlah 15 negara (Tabel 3.7). Hubungan Internasional Indonesia yang sebagian besar terjadi dengan negara-negara di Asia juga tampak pada jumlah perwakilan Indonesia di luar negeri (Tabel 3.8), dimana 81 (55%) diantaranya terdapat di

Asia. Dari seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, paling banyak merupakan Atase Pertahanan (33 perwakilan) dan Atase Perdagangan (23 perwakilan) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.9.

Kunjungan Diplomatik Indonesia ke luar negeri lebih banyak dilakukan Menteri Luar Negeri yang sepanjang tahun 2012 tercatat sebanyak 27 kali, jika dibandingkan dengan Presiden atau Wakil Presiden yang totalnya hanya 21 kali. Terkait dengan kunjungan diplomatik Presiden, Wapres, atau Menteri Luar Negeri, Indonesia lebih banyak melakukan kunjungan diplomatik. Sepanjang Tahun 2012 terdapat 16 kunjungan bilateral oleh kepala negara sahabat dan 1 kegiatan kunjungan multilateral (Tabel 3.10). Demikian juga dengan menteri luar negeri, berkunjung sebanyak 27 kali dan mendapat kunjungan sebanyak 24 kali (Tabel 3.11).

**Tabel 3.7 Kedutaan dan Konsulat Asing di Indonesia**

Benua/Kawasan	Kedutaan Besar	Konsulat Jenderal	Konsulat	Consular office / consular agency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Afrika	11	0	0	0
Amerika	14	1	1	1
Asia	32	12	5	1
Australia	1	1	0	0
Eropa	34	1	1	0
Pasifik	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Sumber: Kementerian Luar Negeri (2012)

**Tabel 3.8 Jumlah Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri**

Benua / Kawasan	Kedutaan Besar	Konsulat Jenderal	Perutusan Tetap RI
(1)	(2)	(3)	(4)
Afrika	16	1	0
Amerika	13	7	1
Asia	34	22	1
Australia dan Oseania	4	0	0
Eropa	28	4	1
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>34</b>	<b>3</b>

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2012)

**Tabel 3.9 Pejabat Perbantuan Pada Perwakilan RI di Luar Negeri**

Bidang	Asia	Afrika	Amerika	Eropa	Australia dan Oseania
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atase Pertahanan	18	2	2	9	2
Atase Udara	2	0	1	0	0
Atase Laut	3	0	1	2	1
Atase Perdagangan	9	1	2	10	1
Atase Imigrasi	6	0	0	2	0
Atase Pendidikan	9	1	1	4	1
Atase Kejaksaan	1	0	0	0	0
Atase Polri	6	0	1	1	1
Atase Militer	3	0	0	2	1
Atase Perhubungan	3	0	2	2	0
Atase Tenaga Kerja	4	0	0	0	0
Atase Keuangan	2	0	0	1	0
Atase Perindustrian	1	0	0	1	0
Atase Pertanian	1	0	1	2	0
Atase Kehutanan	1	0	0	0	0
Atase Ilmu Pengetahuan	0	0	0	1	0
BIN	12	1	0	4	1
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>8</b>

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2012)

**Tabel 3.10 Kunjungan dan Tamu Diplomatik Kepala Negara Indonesia Tahun 2012**

Bulan	Kepala Negara Indonesia Ke Luar Negeri		Kepala Negara/Pemerintahan ke Indonesia	
	Presiden	Wapres	Bilateral	Multilateral
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	0	0	1	0
Februari	0	0	0	0
Maret	3	0	2	0
April	0	1	4	0
Mei	2	0	2	0
Juni	4	0	2	0
Juli	1	0	0	0
Agustus	0	1	0	0
September	3	0	0	0
Oktober	1	0	1	0
November	3	0	3	1
Desember	2	0	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

Sumber: Diolah Dari Buku Diplomasi Indonesia 2012

**Tabel 3.11 Kunjungan dan Tamu Diplomatik Menteri Luar Negeri Indonesia Tahun 2012**

Bulan	Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia*		Kunjungan Tamu Asing Diterima Menteri Luar Negeri	
	Bilateral	Multilateral	Bilateral	Multilateral
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	2	0	3	0
Februari	0	2	1	0
Maret	3	0	1	0
April	1	2	3	0
Mei	1	2	0	0
Juni	0	1	2	0
Juli	2	3	1	0
Agustus	2	2	0	0
September	1	1	2	0
Oktober	0	0	4	0
November	0	1	1	2
Desember	0	1	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>4</b>

\*Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia tidak termasuk kunjungan dalam rangka mendampingi Presiden  
 Sumber: Diolah Dari Buku Dimplomasi Indonesia 2012

### 3.3. Pemerintah Daerah

Sejak Indonesia merdeka, hampir seluruh periode pemerintahan dikelola dengan sistem ketatanegaraan yang terpusat. Pemerintah daerah berperan sebagai cabang struktural yang melaksanakan sebagian besar agenda-agenda yang disusun oleh pemerintah pusat. Dalam perkembangannya muncul pemikiran untuk memberikan peran yang lebih besar pada pemerintah daerah. Lebih lagi jika mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan serta dihuni oleh penduduk dengan jumlah terbesar keempat dunia, dapat menjadi hambatan pada jangkauan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan dengan konsentrasi dan kualitas yang merata. Pada tahun 1999 kesadaran tersebut memunculkan keputusan untuk melakukan desentralisasi. Pentingnya desentralisasi juga karena didorong adanya keterbatasan birokrasi pemerintah sendiri (Toha, 2002:15), yang oleh Sisk (2002:28) dimaknai sebagai prinsip dimana keputusan yang menyangkut masyarakat sebisa mungkin dibuat oleh pejabat yang tingkatnya paling dekat dengan rakyat.

Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dianggap dapat menjawab salah satu prasyarat penting dalam demokrasi, yaitu adanya partisipasi rakyat. Sebagaimana dikemukakan Syarif Hidayat (2002 dalam Ibrahim, 2008:123), dari perspektif *state-society relation*, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil (*civil society*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Semangat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan rentang kekuasaan pemerintah daerah, berimplikasi pada koreksi atas pembagian besar wilayah yang sebelumnya tidak merata. Beberapa provinsi utamanya yang berada di luar Jawa memiliki wilayah yang sangat luas sehingga perlu untuk dirasionalisasi untuk mendukung optimalisasi otonomi daerah. Luas wilayah dibagi melalui pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yang kemudian berubah menjadi 16 wilayah pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950). Setelah kembali dalam bentuk NKRI, Indonesia terdiri dari 11 daerah provinsi. Kondisi ini terus berkembang hingga pada akhir tahun 1974, Indonesia terdiri dari 26 provinsi. Integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI pada tahun 1975 menambah jumlah provinsi hingga menjadi 27. Kondisi ini bertahan hampir selama seperempat abad sebelum akhirnya berkurang menjadi 26 Provinsi karena Timor Timur memisahkan diri dari NKRI pada tahun 1999.

Pada penghujung tahun 1999, terbentuk Provinsi Maluku Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku. Dengan demikian, jumlah provinsi sampai akhir tahun 1999 tetap sebanyak 27 provinsi. Selama rentang waktu empat tahun antara tahun 2000-2004 terdapat 6 provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, sehingga jumlah provinsi di Indonesia menjadi 33 provinsi. Pada tanggal 16 November 2012 disahkan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga provinsi di Indonesia berjumlah 34.

Bukan hanya pada tingkat provinsi, jumlah kabupaten/kota terus bertambah untuk merespon otonomi daerah (Tabel 3.12). Peningkatan jumlah kabupaten/kota merupakan akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota terutama yang terjadi di Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Papua dari 19 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2004 menjadi 28 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2009. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bertambah sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur

bertambah 5 kabupaten. Selain menetapkan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 17 November 2012 juga menjadi hari lahir bagi empat kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Pada Tanggal 11 Januari 2013 disahkan Undang-Undang tentang pembentukan 7 kabupaten baru, diantaranya kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Malaka di Provinsi NTT, Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tambahannya tersebut membuat jumlah Kabupaten yang pada tahun 2012 berjumlah 403 menjadi 410 pada tahun 2013.

**Grafik 3.2 Pemekaran Daerah Indonesia 1999 -2013**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2013)

**Tabel 3.12 Jumlah Kabupaten dan Kota  
Menurut Provinsi Tahun 2008 – 2013**

Provinsi	2008		2009		2012		2013	
	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18	5	18	5	18	5	18	5
Sumatera Utara	23	7	25	8	25	8	25	8
Sumatera Barat	12	7	12	7	12	7	12	7
Riau	9	2	10	2	10	2	10	2
Jambi	9	2	9	2	9	2	9	2
Sumatera Selatan	11	4	11	4	11	4	12	4
Bengkulu	9	1	9	1	9	1	9	1
Lampung	9	2	12	2	13	2	13	2
Kep. Bangka Belitung	6	1	6	1	6	1	6	1
Kepulauan Riau	5	2	5	2	5	2	5	2
DKI Jakarta	1	5	1	5	1	5	1	5
Jawa Barat	17	9	17	9	18	9	18	9
Jawa Tengah	29	6	29	6	29	6	29	6
DI Yogyakarta	4	1	4	1	4	1	4	1
Jawa Timur	29	9	29	9	29	9	29	9
Banten	4	3	4	4	4	4	4	4
Bali	8	1	8	1	8	1	8	1
Nusa Tenggara Barat	8	2	8	2	8	2	8	2
Nusa Tenggara Timur	19	1	20	1	20	1	21	1
Kalimantan Barat	12	2	12	2	12	2	12	2
Kalimantan Tengah	13	1	13	1	13	1	13	1
Kalimantan Selatan	11	2	11	2	11	2	11	2
Kalimantan Timur	10	4	10	4	6	3	7	3
Kalimantan Utara*	-	-	-	-	4	1	4	1
Sulawesi Utara	11	4	11	4	11	4	11	4
Sulawesi Tengah	10	1	10	1	10	1	11	1
Sulawesi Selatan	21	3	21	3	21	3	21	3
Sulawesi Tenggara	10	2	10	2	10	2	11	2
Gorontalo	5	1	5	1	5	1	5	1
Sulawesi Barat	5	-	5	-	5	0	6	0
Maluku	9	2	9	2	9	2	9	2
Maluku Utara	6	2	7	2	7	2	8	2
Papua Barat	8	1	10	1	12	1	12	1
Papua	26	1	28	1	28	1	28	1
<b>Indonesia</b>	<b>387</b>	<b>96</b>	<b>399</b>	<b>98</b>	<b>403</b>	<b>98</b>	<b>410</b>	<b>98</b>

Keterangan : \*) Provinsi Kalimantan Utara disahkan pada 17 November 2012

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2013) dan DPR RI (2013).

Untuk mendukung otonomi daerah pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penting penjabaran otonomi daerah dari sisi administrasi keuangan. Regulasi tersebut digantikan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 seiring dengan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, postur anggaran ditetapkan dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Realisasi penerimaan, pengeluaran, serta jenis pengeluaran ditampilkan dalam Tabel 3.13, 3.14, dan 3.15, dan 3.16.

Keberhasilan dalam pengelolaan daerah sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah (Perda) merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ryaas Rasyid, 2005 dalam Ibrahim, 2008:126). Meskipun kewenangan membuat Perda ada pada masing-masing daerah, namun tetap ada batasan dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Perda sebagaimana ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Jika melanggar ketentuan tersebut, maka Perda dapat dibatalkan atau diminta pembatalan.

Terdapat dua jalur pengawasan Perda agar tetap sesuai dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertama, adalah pengawasan melalui jalur eksekutif (*executive review*), dimana pengawasan Perda dilakukan oleh presiden melalui menteri terkait atau gubernur. Kedua adalah pengawasan melalui jalur yudikatif (*judicial review*) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguji kesesuaian Perda terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi (Ibrahim, 2008: 127-128). Berdasarkan Laporan Tahunan MA 2011, sepanjang tahun 2011 terdapat 6 permohonan uji materiil tentang Perda dan semuanya telah diputus oleh MA. Pada rentang 2002-2009 terdapat 2.246 Perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Tabel 3.17). Tema yang dibatalkan sebagian besar berkaitan dengan retribusi, pajak, serta perijinan (Tabel 3.18). Perda yang dibatalkan memiliki umur berlaku yang beragam (Tabel 3.19). Sementara pada periode 2010-2011 terdapat 757 Perda yang diminta Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri (Tabel 3.20 , 3.21, dan 3.22).



**Tabel 3.13 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah  
Menurut Provinsi (ribu rupiah) Tahun 2012**

Provinsi	Penerimaan			Pengeluaran		
	Pendapatan	Pembiayaan	Jumlah	Belanja	Pembiayaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	8.714.807.933	804.130.756	9.518.938.689	9.511.938.689	7.000.000	9.518.938.689
Sumatera Utara	7.332.537.007	700.027.786	8.032.564.793	7.677.852.377	354.712.416	8.032.564.793
Sumatera Barat	2.917.855.223	275.605.000	3.193.460.223	3.121.167.223	72.293.000	3.193.460.223
R i a u	5.487.776.082	953.880.000	6.441.656.082	6.366.656.082	75.000.000	6.441.656.082
J a m b i	1.734.302.275	208.201.282	1.942.503.557	1.942.503.557	0	1.942.503.557
Sumatera Selatan	4.939.147.950	213.204.322	5.152.352.272	4.742.452.272	409.900.000	5.152.352.272
Bengkulu	1.542.457.184	43.697.745	1.586.154.929	1.586.154.929	0	1.586.154.929
Lampung	2.809.749.945	43.500.000	2.853.249.945	2.838.249.945	15.000.000	2.853.249.945
Bangka Belitung	1.385.019.259	75.000.000	1.460.019.259	1.450.019.259	10.000.000	1.460.019.259
Kepulauan Riau	2.038.209.392	373.080.186	2.411.289.578	2.387.789.578	23.500.000	2.411.289.578
DKI Jakarta	30.642.744.353	5.380.600.504	36.023.344.857	33.827.031.650	2.196.313.207	36.023.344.857
Jawa Barat	14.626.494.183	1.570.802.796	16.197.296.979	15.804.296.979	393.000.000	16.197.296.979
Jawa Tengah	10.833.744.293	562.000.000	11.395.744.293	11.245.744.293	150.000.000	11.395.744.293
D I Yogyakarta	1.935.447.748	221.415.561	2.156.863.309	2.124.288.709	32.574.600	2.156.863.309
Jawa Timur	14.727.475.360	1.044.555.318	15.772.030.678	15.153.689.101	618.341.577	15.772.030.678
Banten	3.902.075.000	264.000.000	4.166.075.000	4.134.075.000	32.000.000	4.166.075.000
B a l i	3.249.750.721	456.882.514	3.706.633.235	3.656.633.235	50.000.000	3.706.633.235
NTB	2.241.557.144	62.000.000	2.303.557.144	2.254.557.144	49.000.000	2.303.557.144
NTT	2.207.178.663	30.000.000	2.237.178.663	2.147.354.663	89.824.000	2.237.178.663
Kalimantan Barat	2.837.408.853	115.000.000	2.952.408.853	2.902.408.853	50.000.000	2.952.408.853
Kalimantan Tengah	2.251.744.204	25.000.000	2.276.744.204	2.248.744.204	28.000.000	2.276.744.204
Kalimantan Selatan	2.966.943.629	190.500.000	3.157.443.629	3.108.943.629	48.500.000	3.157.443.629
Kalimantan Timur	9.102.613.100	1.500.000.000	10.602.613.100	10.502.613.100	100.000.000	10.602.613.100
Sulawesi Utara	1.717.270.351	100.698.691	1.817.969.042	1.817.969.042	0	1.817.969.042
Sulawesi Tengah	1.779.106.688	158.092.727	1.937.199.415	1.931.199.415	6.000.000	1.937.199.415
Sulawesi Selatan	4.601.370.274	159.571.791	4.760.942.065	4.760.942.065	0	4.760.942.065
Sulawesi Tenggara	1.846.010.570	180.696.000	2.026.706.570	2.021.706.570	5.000.000	2.026.706.570
Gorontalo	913.401.827	60.000.000	973.401.827	938.401.827	35.000.000	973.401.827
Sulawesi Barat	952.008.830	19.000.000	971.008.830	969.008.830	2.000.000	971.008.830
M a l u k u	1.412.177.393	22.680.003	1.434.857.396	1.429.870.261	4.987.135	1.434.857.396
Maluku Utara	1.125.032.917	145.000.000	1.270.032.917	1.170.032.917	100.000.000	1.270.032.917
Papua Barat	3.893.381.839	130.000.000	4.023.381.839	3.998.380.839	25.001.000	4.023.381.839
P a p u a	7.295.601.882	75.000.000	7.370.601.882	7.182.633.394	187.968.488	7.370.601.882
<b>T o t a l</b>	<b>165.962.402.072</b>	<b>16.163.822.982</b>	<b>182.126.225.054</b>	<b>176.955.309.631</b>	<b>5.170.915.423</b>	<b>182.126.225.054</b>

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, BPS (2009 - 2012)

**Tabel 3.14 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah) Tahun 2010 - 2012**

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	T a h u n		
		2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>116 802 488 665</b>	<b>140 001 241 096</b>	<b>165 962 402 072</b>
	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	56 726 589 730	73 620 310 358	75 070 594 095
	Pajak Daerah	47 300 841 241	62 759 000 075	64 212 600 642
	Retribusi Daerah	1 454 694 720	1 408 726 470	1 309 071 303
	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	1 933 195 176	2 524 288 765	2 712 584 738
	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Lain-lain PAD yang Sah	6 037 858 593	6 928 295 048	6 836 337 412
	<u>Dana Perimbangan</u>	47 519 927 639	52 779 890 539	55 062 089 158
	Bagi Hasil Pajak	17 556 536 325	16 447 715 087	16 477 559 088
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 896 470 197	12 508 737 244	10 196 474 575
	Dana Alokasi Umum	19 247 315 618	22 553 282 483	27 052 242 731
	Dana Alokasi Khusus	819 605 499	1 270 155 725	1 335 812 764
	<u>Lain-lain Pendapatan yang Sah</u>	12 555 971 296	13 601 040 199	35 829 718 819
<b>B.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>16 670 537 821</b>	<b>20 503 199 782</b>	<b>16 163 822 982</b>
	<b>Total</b>	<b>133 473 026 486</b>	<b>160 504 440 878</b>	<b>182 126 225 054</b>

\*) Data APBD

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, BPS (2010 - 2012)

**Tabel 3.15 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia  
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), Tahun 2010 – 2012**

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012 *)
(1)	(3)	(4)	(5)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>53.152.485.827</b>	<b>66.590.354.071</b>	<b>96.516.976.407</b>
Belanja Pegawai	20.692.837.531	24.825.623.272	29.025.698.194
Belanja Bunga	9.167.475	14.724.999	41.467.473
Belanja Subsidi	64.605.959	39.552.236	56.244.656
Belanja Hibah	4.428.118.542	7.368.705.579	29.728.023.453
Belanja Bantuan Sosial	3.627.404.487	4.007.604.216	1.829.598.332
Belanja Bagi Hasil	13.627.990.091	17.300.751.767	18.522.533.257
Belanja Bantuan Keuangan	10.552.027.515	12.842.293.763	16.421.768.566
Pengeluaran Tidak Terduga	150.334.227	191.098.239	891.642.476
<b>Belanja Langsung</b>	<b>59.000.922.032</b>	<b>65.627.357.161</b>	<b>80.438.333.224</b>
Belanja Pegawai	6.669.635.011	5.637.664.281	6.510.988.072
Belanja Barang dan Jasa	26.992.274.147	33.656.718.936	42.092.662.740
Belanja Modal	25.339.012.874	26.332.973.944	31.834.682.412
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>21.319.618.627</b>	<b>28.286.729.646</b>	<b>5.170.915.423</b>
<b>T o t a l</b>	<b>133.473.026.486</b>	<b>160.504.440.878</b>	<b>182.126.225.054</b>

\*) Data APBD

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, BPS (2010 - 2012)

**Tabel 3.16 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah), Tahun 2010 - 2012**

Provinsi	2010	2011	2012 *)
(1)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2.361.186.746	2.527.577.357	3.646.912.385
Sumatera Utara	1.991.472.765	2.339.178.887	5.022.928.596
Sumatera Barat	1.031.743.732	1.150.643.751	1.688.938.887
R i a u	1.633.624.557	1.726.941.928	3.221.363.309
J a m b i	672.267.047	760.339.472	802.376.084
Sumatera Selatan	1.167.117.282	2.007.450.230	2.835.367.647
Bengkulu	521.635.607	494.038.124	812.535.037
Lampung	968.441.248	1.143.029.305	1.044.931.071
Bangka Belitung	379.877.151	496.255.478	837.610.056
Kepulauan Riau	525.340.406	861.648.228	1.016.146.731
DKI Jakarta	6.972.751.160	9.627.347.327	11.507.408.929
Jawa Barat	6.265.732.992	7.606.879.466	12.410.127.669
Jawa Tengah	3.796.513.884	5.259.700.529	8.298.693.582
D I Yogyakarta	788.491.846	665.763.670	1.267.028.063
Jawa Timur	5.869.745.632	6.589.867.568	9.436.506.403
Banten	1.304.622.476	2.081.522.312	2.039.583.000
B a l i	1.496.158.141	1.796.767.358	2.372.921.202
Nusa Tenggara Barat	859.304.825	886.085.265	1.399.169.475
Nusa Tenggara Timur	538.353.060	572.612.934	1.452.137.269
Kalimantan Barat	774.185.007	930.490.053	1.699.268.452
Kalimantan Tengah	622.766.793	712.053.813	1.247.605.983
Kalimantan Selatan	1.142.533.972	1.195.209.614	1.803.998.516
Kalimantan Timur	2.936.791.901	4.679.991.711	5.163.915.007
Sulawesi Utara	632.041.039	626.908.175	1.038.759.753
Sulawesi Tengah	504.698.487	698.081.241	999.793.464
Sulawesi Selatan	1.500.511.910	1.820.969.739	3.376.343.378
Sulawesi Tenggara	597.811.705	699.679.828	1.270.086.088
Gorontalo	258.083.469	323.980.000	466.587.095
Sulawesi Barat	125.638.652	207.595.524	395.774.452
M a l u k u	378.672.694	426.861.315	849.583.191
Maluku Utara	242.969.257	235.889.454	447.217.364
Papua Barat	1.523.644.287	2.145.191.201	2.184.501.147
P a p u a	2.767.756.097	3.293.803.214	4.460.857.122
<b>T o t a l</b>	<b>53.152.485.827</b>	<b>66.590.354.071</b>	<b>96.516.976.407</b>

\*) Data APBD

Sumber : Statistik Keuangan Daerah, BPS (2010 - 2012)

**Tabel 3.17 Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Provinsi Tahun 2002-2009**

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2	-	2	1	1	8	1	30	45
Sumatera Utara	-	7	23	12	18	15	32	92	199
Sumatera Barat	1	4	5	-	5	11	9	27	62
Riau	1	6	10	5	7	7	6	67	109
Jambi	-	5	7	8	4	10	2	70	106
Sumatera Selatan	-	4	9	2	-	10	1	33	59
Bengkulu	7	-	2	3	3	6	1	70	92
Lampung	-	9	11	11	1	1	2	32	67
Kep. Bangka Belitung	-	1	5	2	1	1	6	19	35
Kepulauan Riau	-	-	2	1	-	1	-	11	15
DKI Jakarta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jawa Barat	4	6	24	5	2	7	4	86	138
Jawa Tengah	-	6	7	13	6	5	7	79	123
DI Yogyakarta	-	1	-	1	2	5	3	10	22
Jawa Timur	-	15	18	7	1	6	39	66	152
Banten	-	-	5	2	4	7	1	10	29
Bali	-	3	-	1	3	8	4	8	27
Nusa Tenggara Barat	1	5	10	2	6	8	11	26	69
Nusa Tenggara Timur	-	-	6	6	3	5	6	20	46
Kalimantan Barat	1	8	6	6	2	7	2	15	47
Kalimantan Tengah	-	2	11	5	8	5	13	73	117
Kalimantan Selatan	-	5	8	2	2	5	16	25	63
Kalimantan Timur	2	1	10	8	3	3	8	67	102
Sulawesi Utara	-	5	10	1	-	7	4	5	32
Sulawesi Tengah	-	4	14	6	2	2	2	44	74
Sulawesi Selatan	-	5	13	7	22	11	7	31	96
Sulawesi Tenggara	-	-	2	1	3	1	4	44	55
Gorontalo	-	-	6	-	1	3	7	37	54
Sulawesi Barat	-	-	1	-	-	-	1	23	25
Maluku	-	-	2	6	1	2	1	74	86
Maluku Utara	-	3	2	2	-	-	-	33	40
Papua	-	-	1	-	-	1	5	6	13
Papua Barat	-	-	3	-	3	5	24	11	46
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>105</b>	<b>236</b>	<b>126</b>	<b>114</b>	<b>173</b>	<b>229</b>	<b>1.244</b>	<b>2.246</b>

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

**Tabel 3.18 Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Tema Tahun 2002 – 2009**

Tema	Jumlah								Total	%
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Transportasi dan Perhubungan	-	2	3	2	3	3	1	9	23	1,02
Koperasi	-	-	1	-	-	3	9	3	16	0,71
Pembangunan dan Tata Kota	-	4	2	-	1	1	4	12	24	1,07
Sumbangan, Iuran, dan Pungutan Daerah	2	5	15	4	2	4	2	16	50	2,23
Birokrasi dan Pemerintahan Daerah	-	2	3	5	7	4	8	53	82	3,65
Peternakan	-	4	-	2	2	4	1	3	16	0,71
Keuangan Daerah	-	2	1	-	1	-	-	2	6	0,27
Retribusi	13	58	158	73	66	116	136	688	1.308	58,24
Pajak Daerah	2	7	17	17	8	9	35	213	308	13,71
Perizinan	-	12	17	14	19	15	24	158	259	11,53
Pelabuhan dan Pelayaran	-	4	2	-	-	1	-	4	11	0,49
Lingkungan dan konservasi	-	2	1	2	-	1	1	7	14	0,62
Pengelolaan Sumber daya alam	-	-	-	2	3	3	2	18	28	1,25
Perindustrian dan Perdagangan	2	2	12	5	1	8	5	53	88	3,92
Pengaturan Sosial	-	1	1	-	-	1	1	7	11	0,49
Kelistrikan	-	-	3	-	1	-	-	-	4	0,18
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>105</b>	<b>236</b>	<b>126</b>	<b>114</b>	<b>173</b>	<b>229</b>	<b>1.244</b>	<b>2.246</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

**Tabel 3.19 Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Umur Berlaku, Tahun 2002-2009**

Provinsi	Umur (Tahun)													Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Aceh	-	7	2	7	9	5	9	-	4	-	-	2	45	
Sumatera Utara	1	15	23	31	22	19	22	40	6	13	-	7	199	
Sumatera Barat	1	1	6	4	3	13	16	4	5	4	-	5	62	
Riau	-	9	11	6	18	5	25	10	14	6	2	3	109	
Jambi	-	8	8	5	13	12	9	29	8	10	2	2	106	
Sumatera Selatan	-	2	8	8	4	8	11	11	1	2	-	4	59	
Bengkulu	-	4	7	19	28	2	7	15	1	3	-	6	92	
Lampung	-	12	4	11	3	6	7	13	7	2	2	-	67	
Kep. Bangka Belitung	-	5	3	6	7	4	2	5	3	-	-	-	35	
Kepulauan Riau	-	1	2	2	-	2	-	5	3	-	-	-	15	
DKI Jakarta	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Jawa Barat	1	6	14	13	13	14	27	19	18	4	-	9	138	
Jawa Tengah	1	15	12	10	18	4	12	24	5	3	4	15	123	
DI Yogyakarta	-	2	1	1	5	3	1	2	1	2	-	4	22	
Jawa Timur	2	8	20	17	12	22	22	19	6	7	9	8	152	
Banten	-	2	3	3	3	7	5	2	4	-	-	-	29	
Bali	-	3	1	2	2	3	3	8	-	3	1	1	27	
Nusa Tenggara Barat	-	1	14	8	4	7	6	9	11	-	1	8	69	
Nusa Tenggara Timur	-	3	3	4	6	3	6	8	4	2	1	6	46	
Kalimantan Barat	1	2	10	10	2	5	7	4	1	1	-	4	47	
Kalimantan Tengah	6	13	14	10	10	15	7	24	7	6	1	4	117	
Kalimantan Selatan	-	2	7	8	7	6	11	4	4	7	2	5	63	
Kalimantan Timur	2	3	7	7	13	11	11	23	6	11	1	7	102	
Sulawesi Utara	2	1	6	8	5	-	6	2	2	-	-	-	32	
Sulawesi Tengah	-	7	3	8	8	1	4	18	25	-	-	-	74	
Sulawesi Selatan	1	2	14	13	7	20	13	12	10	1	2	1	96	
Sulawesi Tenggara	-	1	3	3	1	17	4	7	9	-	2	8	55	
Gorontalo	-	1	-	5	17	2	2	4	-	23	-	-	54	
Sulawesi Barat	-	-	1	-	-	1	1	2	6	-	3	11	25	
Maluku	-	7	42	2	1	13	13	1	7	-	-	-	86	
Maluku Utara	-	12	9	13	1	-	-	1	-	4	-	-	40	
Papua	-	-	5	-	4	1	2	1	-	-	-	-	13	
Papua Barat	-	-	3	10	6	11	10	2	-	-	-	4	46	
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>155</b>	<b>266</b>	<b>255</b>	<b>252</b>	<b>242</b>	<b>281</b>	<b>328</b>	<b>178</b>	<b>114</b>	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>2.246</b>	

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

**Tabel 3.20 Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi  
Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 – 2011**

<b>Provinsi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6	9	6	21
Sumatera Utara	16	44	7	67
Sumatera Barat	20	32	6	58
Riau	13	8	5	26
Jambi	18	10	2	30
Sumatera Selatan	12	6	5	23
Bengkulu	6	3	0	9
Lampung	21	6	7	34
Kep. Bangka Belitung	4	6	4	14
Kepulauan Riau	3	4	1	8
DKI Jakarta	0	0	1	1
Jawa Barat	22	23	16	61
Jawa Tengah	39	22	11	72
D.I.Yogyakarta	9	1	1	11
Jawa Timur	15	14	10	39
Banten	16	5	8	29
Bali	4	13	6	23
Nusa Tenggara Barat	18	9	6	33
Nusa Tenggara Timur	8	7	7	22
Kalimantan Barat	2	6	12	20
Kalimantan Tengah	30	11	10	51
Kalimantan Selatan	4	9	5	18
Kalimantan Timur	13	10	4	27
Sulawesi Utara	15	6	2	23
Sulawesi Tengah	11	4	3	18
Sulawesi Selatan	44	24	9	77
Sulawesi Tenggara	18	10	3	31
Gorontalo	0	5	1	6
Sulawesi Barat	1	0	1	2
Maluku	6	12	2	20
Maluku Utara	3	0	2	5
Papua Barat	1	12	4	17
Papua	10	18	6	34
<b>Jumlah</b>	<b>408</b>	<b>349</b>	<b>173</b>	<b>930</b>

*Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)*



**Tabel 3.21 Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Tema Tahun 2010 - 2012**

Tema	Tahun			Total	Persen
	2010	2011	2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Retribusi dan Pungutan Daerah	246	170	60	476	51,18
Pajak Daerah	60	21	6	87	9,35
Perizinan	52	24	9	85	9,14
Perindustrian dan Perdagangan	10	7	2	19	2,04
Birokrasi dan Regulasi Daerah	5	6	6	17	1,83
Sumbangan dan Iuran	6	71	28	105	11,29
Pengelolaan Sumber Daya Alam	11	6	41	58	6,24
Pembangunan dan Tata Kota	2	2	7	11	1,18
Transportasi dan Perhubungan	4	4	1	9	0,97
Koperasi	1	5	0	6	0,65
Peternakan	0	3	1	4	0,43
Lingkungan dan Konservasi	3	4	1	8	0,86
Pelabuhan dan Pelayaran	0	0	0	0	0,00
Pengaturan Sosial	7	24	10	41	4,41
Kuangan Daerah	0	2	1	3	0,32
Kelistrikan	1	0	0	1	0,11
<b>Jumlah</b>	<b>408</b>	<b>349</b>	<b>173</b>	<b>930</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)*

**Tabel 3.22 Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Umur Berlaku Tahun 2012**

Provinsi	Umur												Jumlah
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Sumatera Utara	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	7
Sumatera Barat	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	6
Riau	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5
Jambi	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sumatera Selatan	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	5
Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lampung	1	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	7
Kep. Bangka Belitung	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
Kep. Riau	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
DKI Jakarta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jawa Barat	3	3	3	2	0	1	1	0	0	0	1	2	16
Jawa Tengah	3	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	11
DIY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jawa Timur	0	5	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	10
Banten	0	2	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	8
Bali	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
NTB	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6
NTT	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7
Kalimantan Barat	1	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	12
Kalimantan Tengah	2	2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	10
Kalimantan Selatan	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Kalimantan Timur	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Sulawesi Utara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sulawesi Tengah	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Sulawesi Selatan	3	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9
Sulawesi Tenggara	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Sulawesi Barat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Maluku	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Maluku Utara	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Papua Barat	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Papua	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>173</b>

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2013)

### 3.4. Aparatur Negara

Usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, dilakukan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) dengan penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS), serta pengembangan pola karir dalam jabatan struktural (Renstra KEMENPAN & RB 2010-2014:8). Langkah memperbanyak tenaga fungsional dan pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dapat membantu membangun budaya organisasi yang lebih sehat. Dibandingkan dengan jabatan struktural, jumlah fungsional lebih banyak. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana jabatan fungsional umum memiliki jumlah yang lebih banyak, pada awal Januari tahun 2013 fungsional tertentu sudah menjadi 50,41%, lebih banyak dari fungsional umum yang menjadi 44,26%. Berdasarkan jenis kelamin komposisi pegawai negeri sipil terdiri dari 52,2 persen laki-laki dan 47,8 persen perempuan. Proporsi jabatan struktural dan fungsional PNS Tahun 2013 ditampilkan pada Tabel 3.23.

Penataan dan distribusi sumber daya manusia aparatur negara juga mendapat perhatian yang besar. Pada 24 Agustus 2011 ditandatangani surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk moratorium penerimaan PNS yang berlaku dari tanggal 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Rekrutmen PNS baru diproyeksikan melalui analisis kebutuhan jabatan yang ketat serta berbasis kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Beberapa kementerian juga mendorong pilihan pensiun dini untuk meningkatkan produktivitas. Pegawai Negeri terdiri dari tiga elemen, PNS, TNI, dan Polri. Distribusi usia PNS ditampilkan pada Tabel 3.24, dan distribusi pendidikan PNS ditampilkan pada Tabel 3.25. Jumlah personel dan kepangkatan Polri ditampilkan pada Tabel 3.26.

Pegawai Negeri identik dengan pegawai penyelenggara pemerintahan. Namun tidak semua penyelenggara fungsi pemerintahan merupakan pegawai negeri sebagaimana dijumpai pada jabatan kepala desa. Berbeda dengan lurah yang diangkat bupati/walikota, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dengan jabatan periodik selama lima tahun

Dewasa ini jabatan kepala desa/kelurahan bukan lagi menjadi dominasi laki-laki, tetapi juga perempuan. Kepala desa/kelurahan perempuan terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 1.144 orang, melonjak lebih dari dua kali lipat jika dibanding data survei Potensi Desa terakhir pada 2008 dengan jumlah 555 orang. Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah dengan persentase kepala desa/kelurahan perempuan tertinggi yaitu

14,53 persen. Jumlah kepala desa/kelurahan perempuan cenderung terus bertambah. Pada tahun 2011 persentase jumlah kepala desa/kelurahan sebanyak 4,33%. Tabel 3.27 menyajikan jumlah kepala desa/kelurahan menurut jenis kelamin. Tabel 3.28, 3.28, dan 3.30 menyajikan karakteristik kepala desa/kelurahan.

**Tabel 3.23 Jumlah PNS Menurut Proporsi Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2013**

<b>Jabatan PNS</b>	<b>Pria</b>	<b>Persen</b>	<b>Wanita</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fungsional Umum	1.225.945	52,56	751.485	35,19	1.977.430	44,26
Fungsional Tertentu	935.838	40,12	1.316.252	61,64	2.252.090	50,41
Struktural	170.766	7,32	67.696	3,17	238.462	5,34
Eselon I	545	0,02	107	0,01	652	0,01
Eselon II	10.110	0,43	1.490	0,07	11.600	0,26
Eselon III	44.633	1,91	10.868	0,51	55.501	1,24
Eselon IV	112.734	4,83	53.991	2,53	166.725	3,73
Eselon V	2.744	0,12	1.240	0,06	3.984	0,09
<b>T o t a l</b>	<b>2.332.549</b>	<b>100,00</b>	<b>2.135.433</b>	<b>100,00</b>	<b>4.467.982</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2013)

**Tabel 3.24 Jumlah PNS menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Pria</b>	<b>Persen</b>	<b>Wanita</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18-20	1.727	0,07	693	0,03	2.420	0,05
21-25	42.060	1,80	60.795	2,85	102.855	2,30
26-30	197.550	8,47	266.046	12,46	463.596	10,38
31-35	270.653	11,60	311.712	14,60	582.365	13,03
36-40	290.660	12,46	284.723	13,33	575.383	12,88
41-45	410.262	17,59	378.808	17,74	789.070	17,66
46-50	527.047	22,60	425.590	19,93	952.637	21,32
51-55	464.625	19,92	303.636	14,22	768.261	17,19
56-60	118.829	5,09	97.907	4,58	216.736	4,85
61-65	8.663	0,37	5.382	0,25	14.045	0,31
65+	473	0,02	141	0,01	614	0,01
<b>T o t a l</b>	<b>2.332.549</b>	<b>100</b>	<b>2.135.433</b>	<b>100</b>	<b>4.467.982</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2013)

**Tabel 3.25 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Pria</b>	<b>Persen</b>	<b>Wanita</b>	<b>Persen</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	66.172	2,84	4.359	0,20	70.531	1,58
SLTA	793.535	34,02	581.316	27,22	1.374.851	30,77
SLTP	95.419	4,09	12.929	0,61	108.348	2,42
D I	23.906	1,02	42.689	2,00	66.595	1,49
D II	229.221	9,83	382.176	17,90	611.397	13,68
D III	163.519	7,01	259.780	12,17	423.299	9,47
D IV	14.800	0,63	8.887	0,42	23.687	0,53
S1	843.123	36,15	794.593	37,21	1.637.716	36,65
S2	95.620	4,10	46.676	2,19	142.296	3,18
S3	7.234	0,31	2.028	0,09	9.262	0,21
<b>Total</b>	<b>2.332.549</b>	<b>100,00</b>	<b>2.135.433</b>	<b>100,00</b>	<b>4.467.982</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2013)

Tabel 3.26 Jumlah Personel Polri Menurut Kepangkatan Tahun 2010

Pangkat	Mabes		Luar Fungsi		Jumlah	Polda		Jumlah	Jumlah Keseluruhan
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jenderal	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Komjen	4	0	1	0	5	0	0	0	5
Irjen	27	0	16	0	43	11	0	11	54
Brigjen	89	1	37	0	127	31	0	31	158
<b>Jumlah Pati</b>	121	1	54	0	176	42	0	42	218
Kombes	543	23	62	2	630	487	4	491	1.121
A K B P	639	238	39	10	926	2.186	234	2.420	3.346
Kompol	528	202	66	19	815	4.495	467	4.962	5.777
<b>Jumlah Pamen</b>	1.710	463	167	31	2.371	7.168	705	7.873	10.244
AKP	763	168	159	19	1.109	12.233	954	13.187	14.296
Iptu	347	56	45	4	452	5.071	390	5.461	5.913
Ipda	536	78	24	2	640	5.524	389	5.913	6.553
Akpol 2009	83	2	0	0	85	351	63	414	499
PPSS 2009	64	17	0	0	81	7	2	9	90
<b>Jumlah Pama</b>	1.793	321	228	25	2.367	23.186	1.798	24.984	27.351
Aiptu	222	10	111	5	348	41.576	1.390	42.966	43.314
Aipda	153	7	52	0	212	11.508	358	11.866	12.078
Bripka	1.153	97	141	12	1.403	49.163	1.170	50.333	51.736
Brigadir	982	89	128	10	1.209	44.172	1.356	45.528	46.737
Briptu	5.175	89	141	7	5.412	94.946	2.301	97.247	102.659
Bripda	1.791	49	127	8	1.975	85.138	2.913	88.051	90.026
Ba Ta. 2009	445	24	0	0	469	4.125	384	4509	4.978
<b>Jumlah Bintara</b>	9.921	365	700	42	11.028	330.628	9.872	340.500	351.528
Abrip	2	0	1	0	3	87	0	87	90
Abriptu	0	0	0	0	0	9	0	9	9
Abripda	0	0	0	0	0	5	0	5	5
Bharaka	2	0	3	0	5	8	0	8	13
Bharatu	1	0	1	0	2	13	0	13	15
Bharada	0	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>Jumlah Tamtama</b>	5	0	5	0	10	129	0	129	139
<b>Total</b>	13.545	1.150	1.149	98	15.942	361.024	12.375	373.399	389.341

Sumber: Komisi Kepolisian Nasional (2011)

**Tabel 3.27 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011**

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12.737	99,59	53	0,41	12.790
Sumatera Utara	10.911	95,80	478	4,20	11.389
Sumatera Barat	1.819	93,71	122	6,29	1.941
Riau	3.150	97,55	79	2,45	3.229
Jambi	2.563	97,60	63	2,40	2.626
Sumatera Selatan	5.797	95,93	246	4,07	6.043
Bengkulu	2.724	96,12	110	3,88	2.834
Lampung	4.454	96,05	183	3,95	4.637
Bangka Belitung	654	95,61	30	4,39	684
Kepulauan Riau	607	90,46	64	9,54	671
DKI Jakarta	483	92,00	42	8,00	525
Jawa Barat	11.105	95,68	502	4,32	11.607
Jawa Tengah	15.815	93,25	1.144	6,75	16.959
DI Yogyakarta	817	94,45	48	5,55	865
Jawa Timur	15.484	93,33	1.106	6,67	16.590
Banten	2.920	96,27	113	3,73	3.033
Bali	1.403	98,73	18	1,27	1.421
Nusa Tenggara Barat	1.941	98,58	28	1,42	1.969
Nusa Tenggara Timur	5.417	96,46	199	3,54	5.616
Kalimantan Barat	3.597	97,16	105	2,84	3.702
Kalimantan Tengah	2.825	96,35	107	3,65	2.932
Kalimantan Selatan	3.826	97,90	82	2,10	3.908
Kalimantan Timur	2.769	97,33	76	2,67	2.845
Sulawesi Utara	2.710	85,46	461	14,54	3.171
Sulawesi Tengah	3.325	97,08	100	2,92	3.425
Sulawesi Selatan	5.297	92,60	423	7,40	5.720
Sulawesi Tenggara	3.901	95,57	181	4,43	4.082
Gorontalo	1.175	90,11	129	9,89	1.304
Sulawesi Barat	1.124	97,23	32	2,77	1.156
Maluku	1.671	96,20	66	3,80	1.737
Maluku Utara	2.032	97,46	53	2,54	2.085
Papua Barat	2.568	98,73	33	1,27	2.601
Papua	7.065	98,92	77	1,08	7.142
<b>Indonesia</b>	<b>144.686</b>	<b>95,67</b>	<b>6.553</b>	<b>4,33</b>	<b>151.239</b>

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

**Tabel 3.28 Jumlah Desa Menurut Kelompok Umur Kepala Desa Tahun 2011**

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)							
	≤ 24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4	93	415	1.060	1.691	1.370	913	863
Sumatera Utara	11	195	505	1.129	1.561	1.149	753	418
Sumatera Barat	1	14	51	107	189	223	258	178
Riau	2	52	143	325	436	335	202	141
Jambi	2	29	101	287	403	290	151	85
Sumatera Selatan	3	118	342	688	883	641	306	172
Bengkulu	5	56	174	355	407	279	148	67
Lampung	-	41	166	447	686	514	272	224
Bangka Belitung	1	25	39	54	94	58	54	21
Kepulauan Riau	1	20	33	63	87	86	38	22
DKI Jakarta	-	-	12	58	35	57	82	17
Jawa Barat	1	74	267	715	1.344	1.293	907	1.225
Jawa Tengah	-	102	650	1.193	1.971	2.027	1.360	1.179
DI Yogyakarta	-	-	19	45	88	94	73	111
Jawa Timur	2	141	624	1.417	2.225	2.044	1.136	787
Banten	-	42	103	286	350	398	216	136
Bali	-	7	40	92	184	206	102	82
Nusa Tenggara Barat	2	17	70	175	296	286	145	76
Nusa Tenggara Timur	2	76	200	444	723	685	439	331
Kalimantan Barat	2	68	234	443	574	370	150	90
Kalimantan Tengah	6	60	153	310	432	318	155	76
Kalimantan Selatan	2	67	192	408	600	373	199	119
Kalimantan Timur	2	69	139	239	376	311	174	142
Sulawesi Utara	6	34	85	230	390	394	217	326
Sulawesi Tengah	-	46	128	281	494	365	216	244
Sulawesi Selatan	1	90	192	464	779	650	414	333
Sulawesi Tenggara	3	27	129	370	569	468	287	221
Gorontalo	6	30	45	108	170	147	88	133
Sulawesi Barat	1	25	44	107	192	117	66	70
Maluku	5	34	72	124	154	174	138	260
Maluku Utara	2	28	77	165	265	213	171	141
Papua Barat	11	41	148	226	257	297	199	230
Papua	20	146	394	807	863	806	453	379
<b>Indonesia</b>	<b>104</b>	<b>1.867</b>	<b>5.986</b>	<b>13.222</b>	<b>19.768</b>	<b>17.038</b>	<b>10.482</b>	<b>8.899</b>

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)



**Tabel. 3.29 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011**

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMU dan Sederajat	Akademi	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	28	204	352	1.740	3.446	148	462
Sumatera Utara	4	35	87	1.036	3.405	146	736
Sumatera Barat	-	1	1	56	578	71	250
Riau	16	20	36	261	896	61	303
Jambi	-	6	15	210	860	44	179
Sumatera Selatan	8	13	13	603	1.896	76	403
Bengkulu	-	7	7	230	1.001	31	147
Lampung	-	3	13	360	1.507	84	279
Bangka Belitung	-	-	1	40	228	18	45
Kepulauan Riau	1	1	10	64	146	8	87
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	2	234
Jawa Barat	21	8	22	1.078	3.003	287	1.133
Jawa Tengah	11	4	27	1.376	4.192	491	1.792
DI Yogyakarta	-	-	1	31	184	36	150
Jawa Timur	23	14	27	918	4.222	242	2.333
Banten	2	3	9	301	763	26	366
Bali	-	-	-	33	338	33	301
Nusa Tenggara Barat	4	2	2	46	536	64	402
Nusa Tenggara Timur	2	47	60	550	1.644	129	352
Kalimantan Barat	5	20	52	351	1.247	54	142
Kalimantan Tengah	3	18	54	359	834	43	133
Kalimantan Selatan	8	14	42	503	1.111	49	182
Kalimantan Timur	11	65	90	305	642	44	254
Sulawesi Utara	-	10	17	237	820	61	264
Sulawesi Tengah	7	5	14	264	1.154	48	222
Sulawesi Selatan	1	-	10	126	1.258	127	1.154
Sulawesi Tenggara	3	7	7	164	1.291	75	419
Gorontalo	2	4	5	103	439	20	78
Sulawesi Barat	-	2	2	53	335	36	179
Maluku	4	17	51	186	482	53	121
Maluku Utara	3	40	45	226	604	21	86
Papua Barat	63	217	357	349	317	18	69
Papua	533	551	917	803	882	29	99
<b>Indonesia</b>	<b>763</b>	<b>1.338</b>	<b>2.346</b>	<b>12.962</b>	<b>40.261</b>	<b>2.675</b>	<b>13.356</b>

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

**Tabel. 3.30 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2011**

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMU dan Sederajat	Akademi	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	-	-	-	1	24	2	2
Sumatera Utara	-	-	4	18	164	18	68
Sumatera Barat	-	-	-	2	40	5	17
Riau	-	-	-	2	16	1	24
Jambi	-	-	1	3	18	2	10
Sumatera Selatan	1	1	-	16	70	6	47
Bengkulu	1	-	-	5	51	1	10
Lampung	-	-	1	13	60	-	30
Bangka Belitung	-	-	-	2	8	-	4
Kepulauan Riau	-	-	-	-	6	4	23
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	2	23
Jawa Barat	1	1	-	32	157	19	64
Jawa Tengah	-	2	2	86	312	50	137
DI Yogyakarta	-	-	-	2	9	2	15
Jawa Timur	3	1	4	73	306	28	182
Banten	-	-	-	10	29	2	20
Bali	-	-	-	1	3	-	4
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2	1	8
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	9	75	6	26
Kalimantan Barat	-	-	-	10	38	2	10
Kalimantan Tengah	-	-	-	8	45	1	12
Kalimantan Selatan	-	-	-	10	27	1	13
Kalimantan Timur	-	-	-	6	15	-	20
Sulawesi Utara	-	-	-	8	153	18	94
Sulawesi Tengah	-	-	-	3	39	2	16
Sulawesi Selatan	-	-	-	8	98	18	123
Sulawesi Tenggara	-	-	-	5	67	7	29
Gorontalo	-	-	-	3	58	5	10
Sulawesi Barat	-	-	-	1	10	-	4
Maluku	-	-	-	2	15	6	24
Maluku Utara	-	-	2	2	13	1	19
Papua Barat	1	2	-	1	2	-	13
Papua	7	3	6	4	18	1	15
<b>Indonesia</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>346</b>	<b>1.948</b>	<b>211</b>	<b>1.116</b>

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

### 3.5. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konfigurasi politik yang demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyat dengan cara merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8). Indonesia telah menempuh berbagai langkah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Dari aspek regulasi didukung dengan pengesahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berisi pengaturan agar struktur lembaga dapat efektif dan efisien. Demikian juga dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Dalam Negeri secara berkala melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 100 – 279 tahun 2012, skor tertinggi untuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara berturut-turut diperoleh oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Secara lengkap status dan skor sepuluh besar tertinggi untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota ditampilkan dalam Tabel 3.31, 3.32, dan 3.33.

Pada bagian lain tuntutan akan pelayanan birokrasi yang semakin baik terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Gairah tersebut paling kurang bisa dilihat dari laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi kepada KPK yang hingga empat tahun terakhir sudah mencapai 26.136 laporan yang berasal dari seluruh provinsi (Tabel 3.34). Laporan paling banyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan 5.077 laporan, Jawa Timur dengan 2.636 laporan, dan Sumatera Utara dengan 2.337 laporan.

Laporan tentang potensi tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh pejabat negara, dengan melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Pada tahun 2012 mayoritas laporan berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan 729 laporan, dan Provinsi Jawa Barat dengan 346 laporan. Di luar provinsi tersebut jumlah laporan gratifikasi jauh lebih kecil, tidak ada yang lebih dari 36 laporan. Bahkan di tujuh belas provinsi tidak pernah ada laporan gratifikasi diterima KPK, jauh lebih banyak dari tahun 2011 yang hanya tujuh provinsi (Tabel 3.35). Di antara angka tersebut pelapor paling banyak berasal dari sektor BUMN/BUMD dengan 894 laporan dan pemerintah daerah dengan 75 laporan (Tabel 3.36).

Berdasarkan jenis korupsi yang ditangani KPK tahun 2004 - 2012, jumlah paling banyak berupa penyuapan dengan 116 kasus, disusul korupsi pengadaan barang dan jasa dengan 107 kasus (Tabel 3.37). Berdasarkan jabatan pelaku, pada rentang tahun yang sama, korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat eselon I, II, dan III dengan 107 kasus dan pihak

swasta dengan 70 kasus (Tabel 3.38). Sementara berdasarkan lembaga, jumlah terbanyak kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kementerian/lembaga (tabel 3.39)

Berdasarkan laporan Mahkamah Agung (2012), pada tahun 2011 mayoritas koruptor dipidana dengan hukuman 1-2 tahun (59,01 persen), 3-5 tahun (19,54 persen), dan bebas (16,70 persen). Angka ini tidak jauh berbeda dengan putusan sepanjang 2010, dimana mayoritas koruptor (60,68 persen) dihukum pidana 1-2 tahun (Tabel 3.40). Sementara berdasarkan data Kejaksaan Agung, sepanjang tahun 2012 terdapat 1.511 kasus korupsi yang masuk tahap penuntutan di semua provinsi dengan jumlah penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 302.609.167.229 dan US\$ 500.000 (Tabel 3.41). Dari jumlah tersebut, jumlah penuntutan terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan 102 kasus. Jumlah penyelamatan kerugian terbanyak di Provinsi Sumatera Utara dengan Rp. 65.653.171.299. Sekalipun demikian, besarnya kerugian negara tidak tercermin dalam putusan terpidana korupsi.

Ukuran lain yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh BPS. IPM diukur dari tiga indikator yaitu angka harapan hidup, persentase melek aksara orang dewasa dikombinasikan dengan angka partisipasi (kotor) sekolah bagi anak, serta *Gross Domestic Product* (GDP). Dalam konteks otonomi daerah, IPM dapat menjadi takaran keberhasilan pemerintahan daerah. Lebih lagi sejak kepala daerah dipilih secara langsung, komitmen-komitmen politik kepala daerah dapat diukur dengan membandingkan capaian IPM. Secara umum dampak otonomi daerah positif terhadap perkembangan IPM di tingkat provinsi. Hampir semua daerah mengalami kenaikan indeks setiap tahunnya (Tabel 3.42). Kondisi tersebut juga berkontribusi langsung terhadap IPM nasional yang juga mengalami kenaikan setiap tahun.

Selama tujuh tahun terakhir peringkat teratas IPM diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (1), Provinsi Sulawesi Utara (2), Provinsi Riau (3), D.I Yogyakarta (4), dan Kalimantan Timur (5). Sebaliknya, Provinsi Papua (33), NTB (32), NTT (31), Maluku Utara (30) dan Papua Barat (29) adalah lima provinsi dengan IPM berada di peringkat paling bawah selama dua tahun terakhir (Tabel 3.43).

**Tabel 3.31 Peringkat dan Status Kinerja  
Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Tahun 2010**

Provinsi	Peringkat		Status
	Nomor	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa Timur	1	2,7696	Tinggi
Jawa Tengah	2	2,7570	Tinggi
Sulawesi Selatan	3	2,6403	Tinggi
Sulawesi Utara	4	2,4973	Tinggi
Sumatera Selatan	5	2,4131	Tinggi
Nusa Tenggara Barat	6	2,4100	Tinggi
Kalimantan Barat	7	2,3931	Tinggi
Jawa Barat	8	2,3489	Tinggi
Sumatera Barat	9	2,3447	Tinggi
DI Yogyakarta	10	2,3356	Tinggi
Kalimantan Timur	11	2,3294	Tinggi
Riau	12	2,2821	Tinggi
Aceh	13	2,2657	Tinggi
Kalimantan Selatan	14	2,2650	Tinggi
DKI Jakarta	15	2,2454	Tinggi
Sumatera Utara	16	2,2143	Tinggi
Lampung	17	2,1884	Tinggi
Sulawesi Barat	18	2,1761	Tinggi
Banten	19	2,1687	Tinggi
Kalimantan Tengah	20	2,1203	Tinggi
Bali	21	2,0951	Tinggi
Kep. Bangka Belitung	22	2,0939	Tinggi
Gorontalo	23	2,0812	Tinggi
Maluku	24	1,9901	Sedang
Maluku Utara	25	1,9731	Sedang
Bengkulu	26	1,8237	Sedang
Nusa Tenggara Timur	27	1,7052	Sedang
Kep. Riau	28	1,5576	Sedang
Sulawesi Tenggara	29	1,5000	Sedang
Sulawesi Tengah	30	1,4939	Sedang
Papua Barat	31	1,4392	Sedang
Papua	32	1,4230	Sedang
Jambi	33	1,3106	Sedang

Sumber: Kementerian dalam negeri (2012)

**Tabel 3.32 Peringkat dan Status Kinerja  
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tahun 2010**

Kabupaten	Peringkat		Status
	Nomor	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sleman	1	3,1969	Sangat Tinggi
Wonosobo	2	3,1578	Sangat Tinggi
Boyolali	3	3,1252	Sangat Tinggi
Karanganyar	4	3,0968	Sangat Tinggi
Jombang	5	3,0872	Sangat Tinggi
Luwu Utara	6	3,0717	Sangat Tinggi
Kulon Progo	7	3,0707	Sangat Tinggi
Pacitan	8	3,0631	Sangat Tinggi
Sukoharjo	9	3,0587	Sangat Tinggi
Bogor	10	3,0514	Sangat Tinggi

*Sumber: Kementerian dalam negeri (2012)*

**Tabel 3.33 Peringkat dan Status Kinerja  
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tahun 2010**

Kota	Peringkat		Status
	Nomor	Skor	
(1)	(2)	(3)	(4)
Yogyakarta	1	3,2397	Sangat Tinggi
Magelang	2	3,2293	Sangat Tinggi
Tangerang	3	3,1747	Sangat Tinggi
Semarang	4	3,1289	Sangat Tinggi
Samarinda	5	2,9815	Tinggi
Kota Bogor	6	2,9672	Tinggi
Sukabumi	7	2,9330	Tinggi
Depok	8	2,9277	Tinggi
Makassar	9	2,9256	Tinggi
Cimahi	10	2,9238	Tinggi

*Sumber: Kementerian dalam negeri (2012)*

**Tabel 3.34 Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2009 – 2012**

Provinsi	2009	2010	2011	2012	Jumlah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	140	100	90	87	417
Sumatera Utara	634	617	550	536	2.337
Riau	254	181	173	174	782
Kepulauan Riau	77	96	64	62	299
Sumatera Barat	136	135	102	142	515
Sumatera Selatan	344	262	262	308	1.176
Bangka Belitung	29	37	46	25	137
Jambi	176	141	144	161	622
Bengkulu	64	97	113	132	406
Lampung	145	121	143	101	510
Jawa barat	545	477	570	560	2.152
Banten	127	115	136	125	503
Kalimantan Selatan	131	110	69	76	386
Kalimantan Tengah	107	97	111	105	420
Kalimantan Barat	119	80	97	103	399
Kalimantan Timur	190	153	168	157	668
DKI Jakarta	1.422	1.295	1.196	1.164	5.077
D.I. Yogyakarta	62	57	91	83	293
Jawa Tengah	496	444	361	379	1.680
Jawa Timur	874	603	526	633	2.636
Sulawesi Utara	116	69	83	98	366
Sulawesi Selatan	179	214	196	166	755
Sulawesi Tengah	51	51	40	41	183
Sulawesi Tenggara	73	39	70	71	253
Gorontalo	55	41	42	44	182
Papua	101	77	85	75	338
Bali	82	77	88	73	320
Nusa Tenggara Barat	139	96	90	90	415
Nusa Tenggara Timur	110	115	112	103	440
Maluku Utara	39	46	68	53	206
Maluku	63	86	83	85	317
Papua Barat	28	54	56	45	183
Sulawesi Barat	37	45	24	43	149
Luar Negeri	8	6	4	3	21
Tidak Spesifik	93	31	239	241	604
<b>Jumlah</b>	<b>7.246</b>	<b>6.265</b>	<b>6.291</b>	<b>6.334</b>	<b>26.136</b>

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2012

**Tabel 3.35 Jumlah Laporan Gratifikasi  
yang Diterima KPK Tahun 2011 - 2012**

<b>Provinsi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
(1)	(2)	(3)
Aceh	4	-
Sumatera Utara	11	8
Riau	3	-
Kepulauan Riau	1	1
Sumatera Barat	3	3
Sumatera Selatan	2	1
Kepulauan Bangka Belitung	2	-
Jambi	-	2
Bengkulu	4	-
Lampung	8	2
Jawa Barat	238	346
Banten	3	1
Kalimantan Selatan	-	-
Kalimantan Tengah	3	-
Kalimantan Barat	6	-
Kalimantan Timur	6	9
DKI Jakarta	1002	729
DKI Jakarta Pemda	4	-
D. I. Yogyakarta	5	-
Jawa Tengah	25	8
Jawa Timur	9	36
Sulawesi Utara	1	1
Sulawesi Selatan	22	2
Sulawesi Tengah	-	-
Sulawesi Tenggara	1	4
Gorontalo	2	-
Papua	2	-
Bali	3	3
Nusa Tenggara Barat	-	-
Nusa Tenggara Timur	2	-
Maluku Utara	1	-
Maluku	-	-
Irian Jaya Barat	-	-
Sulawesi Barat	-	1
<b>Total</b>	<b>1373</b>	<b>1158</b>

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011 & 2012



**Tabel 3.36 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Berdasarkan Lembaga Tahun 2011 – 2012**

<b>Bidang</b>	<b>Instansi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Legislatif	MPR / DPR	18	18
	DPRD	28	3
Eksekutif	DPD	-	1
	Kepresidenan	2	-
	Kementerian	-	-
	Kementerian Koordinator	4	4
	Departemen	61	74
	Kementerian Negara	8	-
	Setingkat kementerian	16	9
	LPND	19	10
	Lembaga ekstra struktural	6	44
	Pemda	106	75
Yudikatif		9	3
	Lembaga independen	39	23
	BUMN / BUMD	1057	894
<b>Total</b>		<b>1373</b>	<b>1158</b>

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011 & 2012

**Tabel 3.37 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004 – 2012**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengadaan Barang / Jasa	12	8	14	18	16	16	10	11	107
Perizinan	-	5	1	3	1	-	-	-	10
Penyuapan	7	2	4	13	12	19	25	34	116
Pungutan	-	7	2	3	-	-	-	-	12
Penyalahgunaan Anggaran	-	5	3	10	8	5	4	3	38
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>281</b>

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2012

**Tabel 3.38 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2004-2012**

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Anggota DPR dan DPRD	-	-	-	2	7	8	27	5	16	65
Kepala Lembaga / Kementerian	-	1	1	-	1	1	2	-	1	7
Duta Besar	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4
Komisioner	-	3	2	1	1	-	-	-	-	7
Gubernur	1	-	2	-	2	2	1	-	-	8
Wali Kota/Bupati dan Wakil	-	-	3	7	5	5	4	4	4	32
Eselon I, II, III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	107
Hakim	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	70
Lain-lain	-	6	1	2	4	4	9	3	3	32
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>337</b>

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2012

**Tabel 3.39 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani KPK Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2012**

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
DPR RI	-	-	-	-	7	10	7	2	6	32
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	111
BUMN/BUMD	-	4	-	-	2	5	7	3	1	22
Komisi	-	9	4	2	2	0	2	1	-	20
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	38
Pemkab/Pemkot	-	-	4	8	18	5	8	7	10	60
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>283</b>

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2012

**Tabel 3.40 Jumlah Vonis Kasus Korupsi yang Diputus MA pada Tingkat Kasasi Menurut Masa Hukuman Tahun 2010 – 2011**

Masa Hukuman	2010		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 1 Tahun	28	6,33	9	1,71
1 - 2 Tahun	269	60,68	311	59,01
3 - 5 Tahun	87	19,68	103	19,54
6 - 10 Tahun	13	2,94	15	2,85
> 10 Tahun	2	0,45	1	0,19
Seumur Hidup	0	0	0	0,00
Mati	0	0	0	0,00
Bebas	43	9,73	88	16,70
<b>Jumlah</b>	<b>442</b>	<b>100</b>	<b>527</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011

**Tabel 3.41 Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Seluruh Indonesia Tahun 2012**

Kejaksaan	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan	Penyelamatan Keuangan Negara (Juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kejagung	78	85	76	7.725 dan US\$ 500.000
Aceh	16	35	30	2.318
Sumatera Utara	82	101	123	6.279
Sumatera Barat	34	48	56	10
Riau	20	28	53	1.003
Jambi	23	64	55	3.593
Sumatera Selatan	15	34	56	29.678
Bengkulu	22	35	47	3.711
Lampung	20	25	32	247
DKI Jakarta	15	25	26	40.240
Jawa Barat	85	82	91	16.078
Jawa Tengah	58	110	117	71.471
DI Yogyakarta	12	17	19	1.033
Jawa Timur	68	145	94	19.135
Bali	9	12	16	336
Nusa Tenggara Barat	8	18	9	0
Nusa Tenggara Timur	8	47	30	455
Kalimantan Barat	7	27	35	1.502
Kalimantan Tengah	15	30	53	2.447
Kalimantan Selatan	8	35	29	26.968
Kalimantan Timur	21	39	58	1.075
Sulawesi Utara	18	29	37	246
Sulawesi Tengah	24	37	48	282
Sulawesi Tenggara	24	17	16	0
Sulawesi Selatan	70	106	106	46.270
Maluku	5	42	54	7.028
Papua	19	29	36	3.721
Banten	8	31	38	1.629
Bangka Belitung	6	11	20	730
Gorontalo	10	24	16	310
Maluku Utara	7	15	7	3.660
Kepulauan Riau	11	16	28	3.400
<b>Jumlah</b>	<b>833</b>	<b>1.399</b>	<b>1.511</b>	<b>302.609 dan US\$ 500.000</b>

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan RI (2012)

**Tabel 3.42 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional  
2004 – 2011**

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	68.7	69.05	69.41	70.35	70.76	71.31	71.70	72,16
Sumatera Utara	71.4	72.03	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19	74,65
Sumatera Barat	70.5	71.19	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78	74,28
Riau	72.2	73.63	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07	76,53
Jambi	70.1	70.95	71.29	71.46	71.99	72.45	72.74	73,30
Sumatera Selatan	69.6	70.23	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95	73,42
Bengkulu	69.9	71.09	71.28	71.57	72.14	72.55	72.92	73,40
Lampung	68.4	68.85	69.38	69.78	70.30	70.93	71.42	71,94
Bangka Belitung	69.6	70.68	71.18	71.62	72.19	72.55	72.86	73,37
Kepulauan Riau	70.8	72.23	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07	75,78
DKI Jakarta	75.8	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60	77,97
Jawa Barat	69.1	69.93	70.32	70.71	71.12	71.64	72.29	72,73
Jawa Tengah	68.9	69.78	70.25	70.92	71.60	72.10	72.49	72,94
DI Yogyakarta	72.9	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77	76,32
Jawa Timur	66.8	68.42	69.18	69.78	70.38	71.06	71.62	72,18
Banten	67.9	68.80	69.11	69.29	69.70	70.06	70.48	70,95
Bali	69.1	69.78	70.07	70.53	70.98	71.52	72.28	72,84
NTB	60.6	62.42	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20	66,23
NTT	62.7	63.59	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26	67,75
Kalimantan Barat	65.4	66.20	67.08	67.53	68.17	68.79	69.15	69,66
Kalimantan Tengah	71.7	73.22	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64	75,06
Kalimantan Selatan	66.7	67.44	67.75	68.01	68.72	69.30	69.92	70,44
Kalimantan Timur	72.2	72.94	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56	76,22
Sulawesi Utara	73.4	74.21	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09	76,54
Sulawesi Tengah	67.3	68.47	68.85	69.34	70.09	70.70	71.14	71,62
Sulawesi Selatan	67.8	68.06	68.81	69.62	70.22	70.94	71.62	72,14
Sulawesi Tenggara	66.7	67.52	67.80	68.32	69.00	69.52	70.00	70,55
Gorontalo	65.4	67.46	68.01	68.83	69.29	69.79	70.28	70,82
Sulawesi Barat	64.4	65.72	67.06	67.72	68.55	69.18	69.64	70,11
Maluku	69.0	69.24	69.69	69.96	70.38	70.96	71.42	71,87
Maluku Utara	66.4	66.95	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03	69,47
Papua Barat	63.7	64.83	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15	69,65
Papua	60.9	62.08	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94	65,36
<b>Indonesia (BPS)</b>	<b>68.7</b>	<b>69.57</b>	<b>70.10</b>	<b>70.59</b>	<b>71.17</b>	<b>71.76</b>	<b>72.27</b>	<b>72,77</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

**Tabel 3.43 Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi  
2004 – 2011**

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	18	18	18	17	17	17	17	18
Sumatera Utara	7	8	8	8	8	8	8	8
Sumatera Barat	9	9	9	9	9	9	9	9
Riau	5	3	3	3	3	3	3	3
Jambi	10	11	10	12	13	13	13	13
Sumatera Selatan	13	13	13	13	12	10	10	10
Bengkulu	11	10	11	11	11	12	11	11
Lampung	19	19	19	20	20	21	20	20
Bangka Belitung	12	12	12	10	10	11	12	12
Kepulauan Riau	8	7	7	6	6	6	6	6
DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1
Jawa Barat	14	14	14	15	15	15	15	16
Jawa Tengah	17	16	15	14	14	14	14	14
DI Yogyakarta	3	4	4	4	4	4	4	4
Jawa Timur	23	22	20	19	18	18	18	17
Banten	20	20	21	23	23	23	23	23
Bali	15	15	16	16	16	16	16	15
NTB	33	32	32	32	32	32	32	32
NTT	31	31	31	31	31	31	31	31
Kalimantan Barat	27	28	28	29	29	28	28	28
Kalimantan Tengah	6	5	5	7	7	7	7	7
Kalimantan Selatan	24	26	26	26	26	26	26	26
Kalimantan Timur	4	6	6	5	5	5	5	5
Sulawesi Utara	2	2	2	2	2	2	2	2
Sulawesi Tengah	22	21	22	22	22	22	22	22
Sulawesi Selatan	21	23	23	21	21	20	19	19
Sulawesi Tenggara	25	24	25	25	25	25	25	25
Gorontalo	28	25	24	24	24	24	24	24
Sulawesi Barat	29	29	29	28	27	27	27	27
Maluku	16	17	17	18	19	19	21	21
Maluku Utara	26	27	27	27	28	29	30	30
Papua Barat	30	30	30	30	30	30	29	29
Papua	32	33	33	33	33	33	33	33

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

# LEMBAGA DEMOKRASI

4

<http://www.ips.go.id>





#### 4.1 Lembaga Demokrasi

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan organisasi pemerintah. Situasi ini akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti, 2008: 290-291).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dengan keputusan konkret pemerintah. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009: 127-133).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama (Almond, 1974 dalam Mas'oeed & MacAndrews, 2008: 65). Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

## 4.2. Partai Politik

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan. Oleh Carl Friedrich partai politik didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idil kepada para anggotanya (Surbakti, 2010:148).

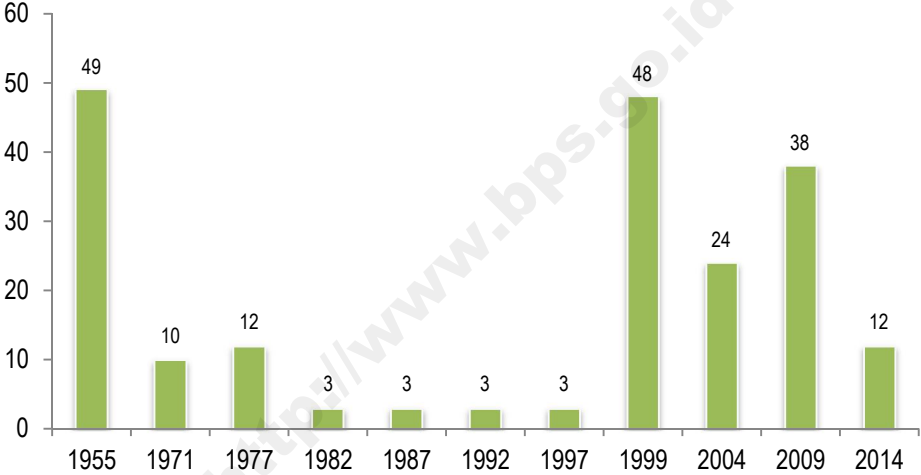
Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang disebutkan Almond dan Powell sebagai; rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Dilihat dari jumlahnya, sistem kepartaian dapat digolongkan dalam tiga bentuk, sistem partai tunggal, dua partai dan bersaing, dan sistem banyak partai. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, 2010: 161). Sistem multipartai biasanya diperkuat dengan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberikan kesempatan luas bagi partai-partai kecil (Safa'at, 2011: 62).

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu tahun 1955 jumlah partai politik sebanyak 49, tahun 1971 sebanyak 10, tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 masing-masing 3 partai politik, tahun 1999 sebanyak 48, tahun 2004 sebanyak 24, dan tahun 2009 sebanyak 38 partai politik dan menjadi 12 partai politik pada tahun 2014 (Grafik 4.1). Dalam rentang itu juga terdapat sejumlah pembubaran, fusi, atau pembekuan partai politik (Tabel 4.1).

Pada Pemilu pertama di era reformasi tahun 1999, partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebanyak 148 partai akan tetapi hanya 48 di antaranya yang

menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004, jumlah partai yang terdaftar meningkat menjadi 261 partai dan hanya 24 partai yang menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu 2009 Departemen Hukum dan HAM mendaftarkan sebanyak 64 partai politik namun demikian hanya 38 di antaranya yang dinyatakan lolos verifikasi KPU sehingga berhak menjadi peserta Pemilu. Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional yang lolos sebagai peserta pemilu, menyisihkan 18 partai politik yang tidak memenuhi persyaratan dan 16 partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU (Tabel 4.2).

**Grafik 4.1 Jumlah Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 1955 – 2014**



Sumber: Diolah dari KPU

**Tabel 4.1. Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

Klasifikasi	Bentuk dan Praktek	Rujukan Hukum
(1)	(2)	(3)
Tidak diakuinya parpol yang telah ada	PSII Abikusno, PRN Bebas, PRI PRN Djody	Penpres No 7 1959 Keppres No. 129 Tahun 1961
Pembubaran sebagai konsekuensi kebijakan fusi parpol	Fusi PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik menjadi Partai Indonesia Perjuangan  Fusi Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan	Tap MPRS No XXII/1966/ dan Tap MPR No IV/1973, diwujudkan dengan UU No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Perintah membubarkan diri	Pembubaran Masyumi Pembubaran PSI	Keppres No.200/1960 Keppres No. 201 1960
Pembubaran oleh Pemerintah	Pembubaran PKI	Keppres No 1/3/1966.
Pembubaran berdasarkan putusan pengadilan	Gugatan pembubaran Partai Golkar di MA	Perkara 01.G/WPP/2000 dan 02.G/WPP/2001 ditolak
Pembekuan Partai Politik	Partai Murba Partindo Partai Golkar	Keppres No 21/1965 Keppres No 57/1968 Maklumat Presiden 23 Juli 2001

Sumber: Diolah dari Safa'at (2011:323-324)

**Tabel 4.2 Jumlah Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai Pada Pemilu Tahun 1999-2014**

Status Partai	1999	2004	2009	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peserta Pemilu	48	24	38	12
2. Tidak Lolos Verifikasi KPU	93	26	13	16
3. Dibatalkan sebagai Badan Hukum	-	153	-	-
4. Tidak Memenuhi Persyaratan	7	58	13	18

Sumber: Diolah dari Kemenkumham (2010) dan KPU (2012)

### 4.3. MPR, DPR, dan DPD

Sejak perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Lembaga ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 sebanyak 678 orang yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Jumlah MPR Periode 2009-2014 sebanyak 692 orang yang terdiri atas 560 anggota berasal dari unsur DPR dan 132 anggota dari unsur DPD yang berasal dari 33 provinsi.

#### 4.4.1 Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada era Orde Baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu, dan kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 orang dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Komposisi jumlah DPR yang diangkat pada era reformasi berangsur dikurangi. Jumlah DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dan 38 anggota lainnya berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil Pemilu. Pada periode 2009-2014 jumlah DPR sebanyak 560 anggota DPR yang seluruhnya dipilih dalam Pemilu 2009 (Grafik 4.2).

Pada Pemilu 2004 alokasi jumlah kursi DPR-RI sebanyak 550 kursi, dengan alokasi 3-12 kursi setiap Dapil. Jumlah kursi untuk setiap provinsi menurut pasal 48 (1) UU No.12 tahun 2003 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Ketentuan lain adalah jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999. Provinsi baru

hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya memperoleh 3 kursi. Jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009 paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi, dengan total sebanyak 560 kursi untuk DPR RI.

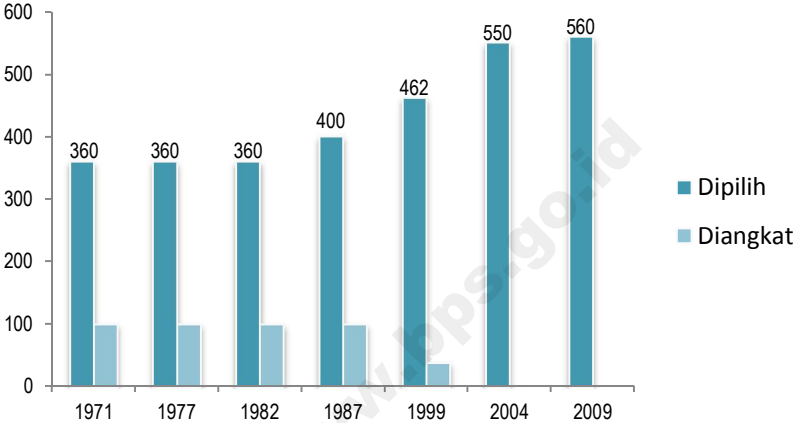
Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada Pemilu 2009 terkait mekanisme penentuan Caleg terpilih. Pertama, calon anggota DPR RI terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada daftar calon tetap (DCT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Sistem ini dipakai berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pembatalan sebagian pasal pada UU No. 10/2008, bahkan diputuskan pada saat DCT sudah disahkan oleh KPU. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DCT memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kedua, ditetapkannya *parliamentary threshold*, yaitu ketentuan batas perolehan suara minimal partai politik untuk dapat masuk ke parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara sah secara nasional. Metode ambang batas minimal tersebut membuat hanya 9 partai politik (dari 38 partai politik) yang memiliki representasi di DPR RI.

Komposisi perempuan setiap fraksi di DPR dan jumlah perempuan pada setiap periode DPR disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. Pimpinan DPR-RI periode 2004-2009 terdiri atas 4 orang, sedangkan pada periode 2009-2014 meningkat menjadi 5 orang. Pada dua periode tersebut DPR mempunyai 11 komisi yang merupakan unit kerja utama di DPR. Profil anggota DPR RI periode 2009 – 2014 menurut kelompok umur, tingkat pendidikan dan pembagian bidang kerja di DPR disajikan pada Tabel 4.5 dan 4.6. Jumlah anggota DPR dirinci menurut alat kelengkapan DPR selain komisi disajikan pada Tabel 4.7. Pada Tabel 4.8 dan 4.9 ditampilkan rincian tentang pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan DPD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 69 ayat 1, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan wujud dari kekuasaan pembentuk undang-undang, anggaran untuk membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan Presiden, serta fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan dari pelaksanaan undang-undang dan APBN (pasal 70). Pada Tabel 4.10 ditampilkan jumlah Undang-Undang, PERPPU, PERPRES/PENPRES yang ditetapkan maupun dicabut pada periode 1945-2012. Tabel 4.11 menampilkan Undang Undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga 24 November 2012. Pasal 77 Undang-Undang No. 27

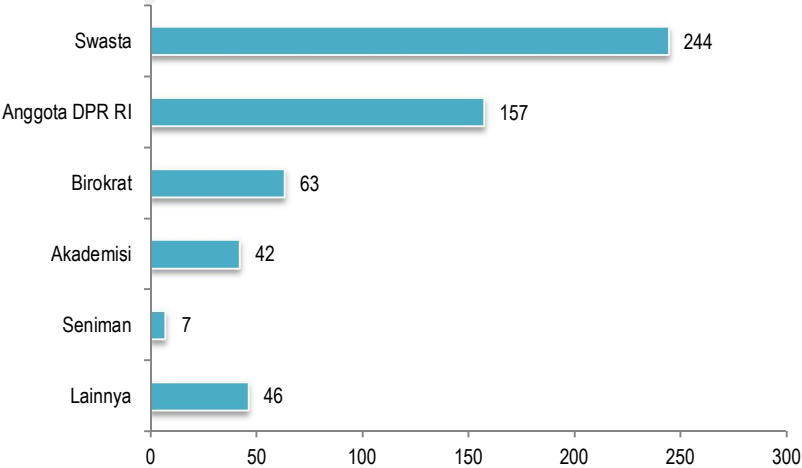
Tahun 2009 menyatakan DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR dapat diuji di Mahkamah Konstitusi jika ada warga negara yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Pada Tabel 4.12, ditampilkan jumlah Undang-Undang yang paling banyak diuji di mahkamah Konstitusi hingga tahun 2012. Rekapitulasi penggunaan hak angket dan interpelasi sejak tahun 1999 ditampilkan pada Tabel 4.13 dan 4.14.

**Grafik 4.2 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan**



Sumber: 30 tahun Indonesia Merdeka

**Grafik 4.3 Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPR-RI 2009-2014**



Sumber: Pemilu 2009 dalam angka - KPU

**Tabel 4.3 Anggota DPR Terpilih Pada Setiap Fraksi Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin**

Partai	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partai Demokrat	148	113	76,35	35	23,65
Partai Golkar	106	88	83,02	18	16,98
PDIP	94	77	81,91	17	18,09
PKS	57	54	94,74	3	5,26
PAN	46	39	84,78	7	15,22
PPP	38	33	86,84	5	13,16
PKB	28	21	75,00	7	25,00
Partai Gerindra	26	22	84,62	4	15,38
Partai Hanura	17	14	82,35	3	17,65
<b>Jumlah</b>	<b>560</b>	<b>461</b>	<b>82,32</b>	<b>99</b>	<b>17,68</b>

Sumber: Pemilu 2009 dalam angka – KPU

**Tabel 4.4 Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Setiap Pemilu**

Periode	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1950-1955 (DPR Sementara)	8	3,8
1955-1960	17	6,3
1956-1959 (Konstituante)	25	5,1
1971-1977	36	7,8
1977-1982	29	6,3
1982-1987	39	8,5
1987-1992	65	13
1992-1997	62	12,5
1997-1999	54	10,8
1999-2004	46	9
2004-2009	65	11,6
2009-2014	99	17,7

Sumber: Miriam Budiharjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi Revisi: Pemilu 2009 Dalam Angka - KPU*.



**Tabel 4.5 Jumlah Anggota Komisi DPR RI Periode 2009 - 2014  
Menurut Bidang Kerja**

<b>Komisi</b>	<b>Bidang Kerja</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
(1)	(2)	(3)
I	Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.	45
II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reformasi Agraria.	50
III	Hukum, HAM, dan Keamanan	60
IV	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.	49
V	Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	52
VI	Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN, Standarisasi Nasional.	51
VII	Energi, Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.	53
VIII	Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.	47
IX	Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan.	45
X	Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.	49
XI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	52

Sumber: DPR RI

**Tabel 4.6 Jumlah Anggota Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009 – 2014**

<b>Alat Kelengkapan</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
(1)	(2)
Pimpinan	5
Badan Musyawarah	60
Badan Legislasi	51
Badan Anggaran	84
Badan Urusan Rumah Tangga	51
Badan Kerjasama Antar-Parlemen	50
Badan Kehormatan	11
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	9

Sumber: DPR RI

**Tabel 4.7 Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014  
Menurut Provinsi dan Pendidikan**

Daerah Pemilihan Provinsi	Pendidikan				Total
	SLTA	Strata I	Strata II	Strata III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6	4	3	0	13
Sumatera Utara	7	11	10	2	30
Sumatera Barat	4	5	3	2	14
Riau	3	2	6	0	11
Jambi	1	4	2	0	7
Sumatera Selatan	1	4	11	1	17
Bengkulu	0	2	2	0	4
Lampung	6	4	7	1	18
Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	0	3
Kepulauan Riau	1	0	1	1	3
DKI Jakarta	5	12	3	1	21
Jawa Barat	17	38	29	7	91
Jawa Tengah	18	27	27	5	77
DI Yogyakarta	2	3	3	0	8
Jawa Timur	21	32	31	3	87
Banten	6	8	8	0	22
Bali	2	3	3	1	9
Nusa Tenggara Barat	4	4	1	1	10
Nusa Tenggara Timur	5	4	4	0	13
Kalimantan Barat	3	5	2	0	10
Kalimantan Tengah	3	0	3	0	6
Kalimantan Selatan	1	6	3	1	11
Kalimantan Timur	3	1	4	0	8
Sulawesi Utara	1	5	0	0	6
Sulawesi Tengah	0	3	3	0	6
Sulawesi Selatan	5	11	7	1	24
Sulawesi Tenggara	0	4	1	0	5
Gorontalo	0	1	1	1	3
Sulawesi Barat	1	2	0	0	3
Maluku	2	1	1	0	4
Maluku Utara	2	1	0	0	3
Papua Barat	1	1	1	0	3
Papua	5	2	3	0	10
<b>Jumlah</b>	<b>137</b>	<b>211</b>	<b>184</b>	<b>28</b>	<b>560</b>

Sumber: Pemilu 2009 dalam angka – Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 4.8 Anggota DPR dan DPD yang Berhenti Melalui Pergantian Antar Waktu**

Pergantian Antar Waktu	2009		2010		2011		2012	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Partai Demokrat	4	-	-	-	2	-	3	1
Partai Golkar	-	-	-	-	1	-	2	1
PDI-Perjuangan	-	-	-	-	2	-	2	-
PKS	2	-	-	-	4	1		-
PKB	1	-	-	-	1	1		-
PAN	-	-	-	-		-	3	-
PPP	1	-	-	-	1	-	1	-
Partai Gerindra	-	-	-	-		-	1	-
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>Dewan Perwakilan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Tabel 4.9 Anggota DPR dan DPD yang Masuk Melalui pergantian Antar Waktu**

Pergantian Antar Waktu	2009		2010		2011		2012	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Partai Demokrat	3	1	-	-	1	1	3	1
Partai Golkar	-	-	-	-	1	-	2	1
PDI-Perjuangan	-	-	-	-	2	-	2	-
PKS	2	-	-	-	5	-	-	-
PKB	1	-	-	-	2	-	-	-
PAN	-	-	-	-	-	-	3	-
PPP	1	-	-	-	1	-	1	-
Partai Gerindra	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>Dewan Perwakilan Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Tabel 4.10 Jumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden/Peraturan Presiden 1945-2012**

Tahun	Jumlah			Jumlah yang diubah/dicabut		
	UU	Perpu	Penpres/Perpres	UU	Perpu	Penpres/Perpres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1945	1	-	-	1	-	-
1946	24	10	-	15	9	-
1947	41	-	-	17	-	-
1948	35	-	-	14	-	-
1949	12	4	-	2	-	-
1950	71	6	-	65	5	-
1951	49	-	-	36	-	-
1952	39	-	-	18	-	-
1953	46	-	-	28	-	-
1954	88	-	-	49	-	-
1955	32	-	-	21	-	-
1956	44	-	-	19	-	-
1957	107	-	-	36	-	-
1958	95	-	-	27	-	-
1959	41	29	9	17	29	9
1960	9	56	16	5	56	16
1961	22	1	15	14	1	15
1962	19	17	5	8	17	5
1963	14	9	26	13	8	26
1964	36	6	24	17	6	24
1965	22	2	25	9	2	25
1966	14	-	7	8	-	7
1967	14	-	-	10	-	-
1968	25	1	-	12	1	-
1969	16	1	-	5	1	-
1970	14	-	-	9	-	-
1971	13	2	-	5	2	-
1972	6	-	-	1	-	-
1973	7	-	-	1	-	-
1974	11	-	-	5	-	-
1975	5	-	-	3	-	-
1976	11	-	-	3	-	-
1977	2	-	-	-	-	-
1978	8	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari Kemendagri

**Tabel 4.10 Jumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden/Peraturan Presiden 1945-2012 (Lanjutan)**

Tahun	Jumlah			Jumlah yang diubah/dicabut		
	UU	Perpu	Penpres/Perpres	UU	Perpu	Penpres/Perpres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1979	5	-	-	1	-	-
1980	13	-	-	1	-	-
1981	8	-	-	-	-	-
1982	21	-	-	4	-	-
1983	8	-	-	4	-	-
1984	8	1	-	1	-	-
1985	17	-	-	8	-	-
1986	5	-	-	2	-	-
1987	8	-	-	2	-	-
1988	6	-	-	2	-	-
1989	7	-	-	4	-	-
1990	11	-	-	1	-	-
1991	7	-	-	2	-	-
1992	25	1	-	10	1	-
1993	7	-	-	-	-	-
1994	12	-	-	4	-	-
1995	13	-	-	3	-	-
1996	9	-	-	1	-	-
1997	32	1	-	12	1	-
1998	13	3	-	3	1	-
1999	56	1	-	25	1	-
2000	38	3	-	5	3	-
2001	22	-	-	3	-	-
2002	32	2	-	6	2	-
2003	41	-	-	5	-	-
2004	41	2	-	9	2	-
2005	14	3	-	-	1	-
2006	23	2	-	4	1	-
2007	48	2	-	2	1	-
2008	56	5	-	1	3	-
2009	52	4	-	2	3	-
2010	13	-	-	-	-	-
2011	24	-	-	1	-	-
2012	24	-	113	-	-	-

Sumber: Diolah dari Kemendagri

Tabel 4.11 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putusan				Putusan	Sisa Tahun Ini	Jumlah UU yang Diuji
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2003	0	24	24	0	0	3	1	4	20	16
2004	20	27	47	11	8	12	4	35	12	14
2005	12	25	37	10	14	4	0	28	9	12
2006	9	27	36	8	8	11	2	29	7	9
2007	7	30	37	4	11	7	5	27	10	12
2008	10	36	46	10	12	7	5	34	12	18
2009	12	78	90	15	17	12	7	51	39	27
2010	39	81	120	17	23	16	5	61	59	58
2011	59	86	145	21	29	35	9	94	51	0
2012	51	118	169	30	31	30	6	97	72	0
<b>Jumlah</b>	<b>219</b>	<b>532</b>	<b>751</b>	<b>126</b>	<b>153</b>	<b>137</b>	<b>44</b>	<b>460</b>	<b>291</b>	<b>166</b>

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2013)

**Tabel 4.12 Jumlah Undang-Undang Paling Banyak Diuji di MK Hingga Tahun 2012**

Undang-Undang	Frekuensi Diuji
(1)	(2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah	36
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	27
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	18
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	16
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	15
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	12
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	11
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional	11
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	10
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	10
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	9
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	8
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	7
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	7
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	6
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	6
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	6
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012	6
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	6

Sumber: diolah dari Laporan tahunan Mahkamah konstitusi Tahun 2012

**Tabel 4.13 Penggunaan Hak Angket DPR Sejak Tahun 1999**

<b>Presiden</b>	<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>	<b>Status</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdurrahman Wahid	Agustus 2000	Dana Yanatera Bulog dan Sultan Brunei	Diterima
	Agustus 2000	Dana Nonbujeter Bulog	Ditolak Paripurna
Megawati Soekarnoputri	Januari 2002	Dana Nonbujeter Bulog	Ditolak Paripurna
	Januari 2003	Divestasi PT.Indosat	Berhenti
Susilo Bambang Yudhoyono	Maret 2005	Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (I)	Ditolak Paripurna
	Maret 2005	Penjualan Tanker Pertamina	Diterima
	Mei 2005	Kredit Macet Bank Mandiri	Ditolak Paripurna
	Mei 2005	Ielang gula ilegal	Ditolak Paripurna
	Januari 2006	Impor Beras	Ditolak Paripurna
	Maret 2006	Penunjukan Exxon-Mobil Ltd sebagai pimpinan operator lapangan minyak blok Cepu.	Ditolak Paripurna
	Desember 2007	Penyelenggaraan Ibadah Haji	Diterima
	Maret 2008	Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas BLBI	Berhenti
	Juni 2008	Transfer pricing PT Adaro Indonesia	Ditolak Paripurna
	Juni 2008	Hak angket atas Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (II)	Diterima
	Oktober 2008	Keppres mengenai pelantikan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara	Berhenti
	April 2009	Pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif	Diterima
	Desember 2009	Bail Out Bank Century	Diterima
	Februari 2011	Mafia Pajak	Ditolak Paripurna

*Sumber: diolah dari Syamsuddin Haris, "Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen, Konstitusi (2004-2008)," disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008 dan Laporan Lima Tahun DPR-RI 2004-2009*



**Tabel 4.14 Penggunaan Hak Interpelasi DPR Sejak Tahun 1999**

<b>Presiden</b>	<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>	<b>Status</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdurrahman Wahid	November 1999	Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan	Diterima
	Juli 2000	Pencopotan Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi	Diterima
Megawati Soekarnoputri	Mei 2002	Bantuan Presiden untuk pembangunan asrama	Diterima
	Juni 2002	Kunjungan Presiden Megawati ke Timor Leste menghadiri undangan Presiden Xanana Gusmao	Berhenti
	Juni 2003	Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan	Diterima
Susilo Bambang Yudhoyono	November 2005	Penarikan surat Presiden Megawati soal Pemberhentian dan Penggantian Panglima TNI	Ditolak Paripurna
	Januari 2005	SK Wapres No.1/2004 tentang Pembentukan Timnas Penanganan Bencana Aceh.	Berhenti
	Februari 2005	Surat arahan Wapres untuk para menteri tentang himbauan untuk tidak mengganggu penting rapat kerja dengan DPR.	Berhenti
	Agustus 2005	MoU Helsinki tentang Penyelesaian Kasus Aceh	Berhenti
	Juni 2005	Masalah busung lapar dan wabah polio	Diterima
	September 2005	Tentang Rapat kabinet melalui video conference	Berhenti
	Oktober 2005	Kenaikan harga BBM	Ditolak Paripurna
	Januari 2006	Impor beras (I)	Ditolak Paripurna
	Oktober 2006	Impor beras (II)	Ditolak Paripurna
	Maret 2007	Persetujuan Pemerintah atas resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747	Diterima
	Juni 2007	Penyelesaian kasus lumpur Lapindo Brantas.	Berhenti
	Desember 2007	Penyelesaian kasus KLBI/BLBI	Diterima
Mei 2008	Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok	Diterima	
Juni 2008	Kenaikan harga BBM	Ditolak Paripurna	

Sumber: P3DI DPR; dan Syamsuddin Haris, "Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)", Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.10, diolah.

#### 4.4.2 Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga bagian dari MPR yang berasal dari wakil-wakil daerah yang berasal dari semua provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22 C dan 22 D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui Pemilu legislatif. Untuk provinsi baru yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu, ditetapkan tidak ada penambahan jumlah anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki anggota DPD karena provinsi tersebut terbentuk setelah pelaksanaan Pemilu yaitu berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

Pada Pemilu Tahun 2009 jumlah anggota DPD dari setiap daerah pemilihan tetap sebanyak 4 orang. Dengan masuknya wakil dari Provinsi Sulawesi Barat, maka jumlah anggota DPD pada periode tahun 2009 – 2014 sebanyak 132 orang. Di antara jumlah tersebut jumlah perempuan sebanyak 35 orang (26,5%). Berdasarkan latar belakang profesi mayoritas adalah anggota DPR RI tahun 2004-2009 dengan jumlah 50 orang (38%), urutan kedua dengan profesi swasta sebanyak 38 orang (28,7%). Dari segi pendidikan, mayoritas anggota DPD lulusan S1 dengan 58 orang (44%), disusul S2 dengan 40 orang (30%). Berdasarkan umur, terdapat 3 orang yang memiliki usia di atas 70 tahun dan 5 orang di bawah 30 tahun.

Secara lengkap karakteristik anggota DPD ditampilkan dalam Tabel 4.15 4.16, 4.17 serta Grafik 4.4. Tabel 4.15 menyajikan banyaknya anggota DPD menurut kelompok umur, sedangkan Tabel 4.16 menyajikan profil anggota DPD menurut pendidikan. Grafik 4.4 menampilkan profil anggota DPD berdasarkan latar belakang pekerjaan. Rincian jumlah anggota DPD menurut daerah pemilihan dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.17.

**Tabel 4.15 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 30	4	1	5
31 - 40	19	9	28
41 - 50	28	10	38
51 - 60	31	10	41
61 - 70	13	4	17
> 70	2	1	3
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>35</b>	<b>132</b>

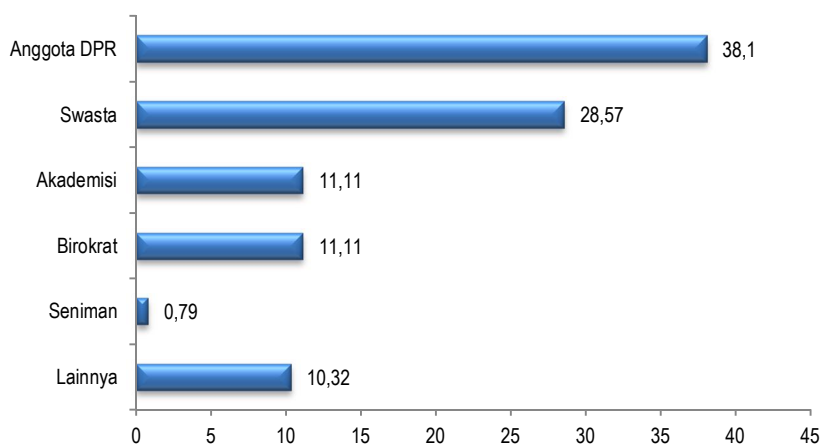
Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2010)

**Tabel 4.16 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SLTA	13	8	21
Diploma III	2	2	4
Strata I	47	11	58
Strata II	29	11	40
Strata III	6	3	9
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>35</b>	<b>132</b>

Sumber: Pemilu 2009 dalam angka - Komisi Pemilihan Umum (2010)

**Grafik 4.4 Latar Belakang Profesi Anggota DPD 2009–2014 (%)**



Sumber: Pemilu 2009 dalam angka - Komisi Pemilihan Umum (2010)

**Tabel 4.17 Jumlah Anggota DPD Periode 2009-2014 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin**

Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Aceh	4	0
Sumatera Utara	3	1
Sumatera Barat	3	1
Riau	2	2
Jambi	2	2
Sumatera Selatan	2	2
Bengkulu	3	1
Lampung	4	0
Kep. Bangka Belitung	3	1
Kepulauan Riau	3	1
DKI Jakarta	4	0
Jawa Barat	3	1
Jawa Tengah	1	3
DI Yogyakarta	3	1
Jawa Timur	3	1
Banten	4	0
Bali	4	0
Nusa Tenggara Barat	3	1
Nusa Tenggara Timur	2	2
Kalimantan Barat	0	4
Kalimantan Tengah	3	1
Kalimantan Selatan	4	0
Kalimantan Timur	4	0
Sulawesi Utara	3	1
Sulawesi Tengah	3	1
Sulawesi Selatan	4	0
Sulawesi Tenggara	4	0
Gorontalo	2	2
Sulawesi Barat	3	1
Maluku	2	2
Maluku Utara	3	1
Papua Barat	3	1
Papua	3	1
<b>Indonesia</b>	<b>97</b>	<b>35</b>

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah RI (2010)

#### 4.4 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang akan menjamin amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Selain Mahkamah Agung (MA), dalam Pasal 24 hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang kedudukannya sederajat dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. MK memiliki wewenang dan kewajiban; Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kepastian dan kesetaraan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar merupakan prasyarat penting dari terwujudnya demokrasi. Hukum akan menjamin penguasa tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena penguasa juga tunduk terhadap aturan hukum. Dengan kekuasaan hukum yang profesional, seluruh rakyat memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal (Laptau MA 2010: 39). Demikian juga yang terdapat di Indonesia, sehingga dibentuk Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap integritas hakim dalam memutus perkara.

Dilihat dari jumlah perkara yang masuk, tahun 2012 MA menerima 13.412 perkara, meningkat 3,25% dibanding tahun 2011 sebanyak 12.990 perkara (Tabel 4.18). Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian menurut jenis kewenangan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.19. Mahkamah Agung (MA) juga memiliki kewenangan melakukan uji materiil peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Pada tahun 2011, terdapat 50 permohonan uji materiil dan semuanya telah diputus oleh MA pada tahun 2011. Selanjutnya untuk tahun 2012 terdapat 52 perkara uji materiil yang masuk ke MA, namun dalam laporan tidak dirinci masing-masing jenis peraturan (Tabel 4.20). Produktivitas MA dalam memutus perkara ditampilkan pada Tabel 4.21, sedangkan rekapitulasi perkara tindak pidana khusus yang diterima MA sepanjang 2009-2010 ditampilkan pada Tabel 4.22.

Berdasarkan lama hukuman tindak pidana khusus selama tahun 2010-2011 paling banyak mendapat vonis 1-2 tahun (38,54%), disusul 3-5 tahun (22,85%) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.23.

Semenjak terbentuk pada Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 1.227 Perkara. Perkara paling banyak diterima pada Tahun 2010 dengan 312 perkara. Pada Tahun 2012 berdasarkan jenis perkara di MK, paling banyak diterima adalah pengujian undang-undang sebanyak 169, kemudian sengketa pemilihan kepala daerah dengan jumlah 112 perkara, dan sengketa antar lembaga sejumlah 6 perkara (Tabel 4.24). Rincian penanganan perkara sengketa antar lembaga tahun 2003 – 2012 ditampilkan dalam Tabel 4.25. Rincian perkara sengketa pemilihan kepala daerah 2008 – 2012 ditampilkan dalam Tabel 4.26.

**Tabel 4.18 Jumlah Perkara yang Diterima Mahkamah Agung 2011-2012**

Jenis	2011					2012					% Perubahan
	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jmlh	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jmlh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perdata	3.165	824	0	0	3.989	3.525	799	0	0	4.324	8,40%
Perdata Khusus	853	174	0	0	1.027	897	209	0	0	1.106	7,69%
Pidana	2.310	145	23	0	2.478	2.314	140	10	0	2.464	-0,56%
Pidana Khusus	2.658	281	41	0	2.980	2.526	312	26	0	2.864	-3,89%
Perdata Agama	670	77	0	0	747	726	41	0	0	767	2,68%
Militer	258	19	0	0	277	253	25	1	0	279	0,72%
TUN	422	1.020	0	50	1.492	512	1.044	0	52	1.608	7,77%
<b>Jumlah</b>	<b>10.336</b>	<b>2.540</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>12.990</b>	<b>10.753</b>	<b>2.570</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>13.412</b>	<b>3,25%</b>

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012

**Tabel 4.19 Rincian Keadaan Perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011 - 2012**

Jenis Kewenangan	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkara</b>					
Kasasi	5847	10753	16600	8816	7784
Peninjauan Kembali	1827	2570	4397	2136	2261
Grasi	17	37	54	11	43
Hak Uji Materiil	4	52	56	28	28
Jumlah 2012	7695	13412	21107	10991	10116
Jumlah 2011	8424	12990	21414	13719	7695
Perbandingan		3,25%	-1,43%	-19,88	31,46
<b>Non Perkara</b>					
Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0
Sengketa					
Kewenangan	0	0	0	0	0

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012

**Tabel 4.20 Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiil ke MA Tahun 2011**

Jenis Peraturan	2010	%	2011	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peraturan Pemerintah	9	14,75	8	16
Keputusan Presiden	3	4,92	1	2
Peraturan Daerah	12	19,67	6	12
Peraturan Menteri	14	22,95	17	34
Keputusan Menteri	6	9,84	4	8
Keputusan KPU	2	3,28	2	4
Peraturan KPU	9	14,75	1	2
Peraturan Bawaslu	1	1,64	-	0
Peraturan Dirjen	1	1,64	-	0
Peraturan Gubernur	-	0,00	4	8
Peraturan Bupati/Walikota	1	1,64	2	4
Keputusan Gubernur	1	1,64	1	2
Keputusan Direksi	1	1,64	-	0
Keputusan Bersama KMA dan KY	-	0,00	1	2
Peraturan Mahkamah Agung RI	-	0,00	1	2
Surat Edaran	1	1,64	2	4
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011

**Tabel 4.21 Produktivitas MA dalam Memutus Perkara 2011-2012**

Jenis Perkara	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perdata Khusus	341	1.106	1.447	993	454	68,62%
Perdata Agama	164	767	931	620	311	66,60%
Militer	95	279	374	225	149	60,16%
Pidana	1.473	2.464	3.937	2.154	1.783	54,71%
Tata Usaha Negara	1.081	1.608	2.689	1.404	1.285	52,21%
Pidana Khusus	1.560	2.864	4.424	2.195	2.229	49,62%
Perdata	2.981	4.324	7.305	3.400	3.905	46,54%
<b>Jumlah</b>	<b>7.695</b>	<b>13.412</b>	<b>21.107</b>	<b>10.991</b>	<b>10.116</b>	<b>52,07%</b>

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2012

**Tabel 4.22 Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus yang Ditangani Mahkamah Agung Tahun 2009-2011**

Klasifikasi	Kasasi / PK			Jumlah
	2009	2010	2011	
-2	-3	-4	-5	-6
Korupsi	953	1.035	1.127	3.115
Narkotika & Psikotropika	391	512	715	1.618
Perlindungan Anak	448	617	499	1.564
Kehutanan	357	191	123	671
KDRT	92	95	89	276
Migas	98	110	54	262
Perikanan	111	142	54	307
Kepabeanan	38	58	33	129
HAKI	52	35	27	114
Perbankan	40	29	29	98
Perdagangan Orang	34	34	22	90
Pencucian Uang	0	0	19	19
Ketenagakerjaan	21	18	16	55
Kesehatan	43	45	15	103
Perumahan	21	17	9	47
Lingkungan Hidup	0	0	13	13
Terorisme	19	24	8	51
Lain-lain	242	110	87	439
Grasi	230	219	41	490
<b>Total</b>	<b>3.190</b>	<b>3291</b>	<b>2.980</b>	<b>9.461</b>

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011



**Tabel 4.23 Jumlah Tindak Pidana Khusus yang Diputus  
Di Tingkat Kasasi menurut Jenis/Lamanya Hukuman Tahun 2010-2011**

Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara											
	Korupsi		Perlindungan Anak		Narkotika / Psikotropika		Perikanan		Kehutanan		Lain-lain	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
< 1 Tahun	28	9	61	56	33	25	43	10	16	12	101	104
1 - 2 Tahun	269	311	98	61	115	186	48	18	36	18	55	55
3 - 5 Tahun	87	103	123	86	93	170	15	0	8	6	38	24
6 - 10 Tahun	13	15	99	58	45	67	0	0	0	0	10	15
> 10 Tahun	2	1	14	3	25	57	0	0	0	0	3	4
Seumur Hidup	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0
Mati	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Bebas	43	88	18	31	22	43	1	4	6	6	18	47
<b>Jumlah</b>	<b>442</b>	<b>527</b>	<b>413</b>	<b>295</b>	<b>337</b>	<b>560</b>	<b>107</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>225</b>	<b>249</b>

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011

**Tabel 4.24 Rekapitulasi Perkara Masuk Mahkamah Konstitusi**

Tahun	Perkara					Jumlah Perkara
	Sengketa Antar Lembaga	Pengujian Undang-Undang	Sengketa Pemilu Legislatif	Sengketa Pilkada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2003	0	24	-	-	24	
2004	1	27	45	-	73	
2005	1	25	-	-	26	
2006	4	27	-	-	31	
2007	2	30	-	-	32	
2008	3	36	-	27	66	
2009	0	78	71	3	152	
2010	1	81	-	230	312	
2011	6	86	-	132	224	
2012	6	169	-	112	287	
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>328</b>	<b>116</b>	<b>260</b>	<b>1227</b>	

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2013)

Tabel 4.25 Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus				Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	1	0	1	0	0	1	0
2005	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2006	1	4	5	0	0	2	1	3	2
2007	2	2	4	0	1	1	0	2	2
2008	2	3	5	0	0	2	2	4	1
2009	1	0	1	0	0	1	0	1	0
2010	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2011	1	6	7	0	0	4	0	4	3
2012	3	3	6	1	1	3	1	6	0
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>9</b>

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2013)

Tabel 4.26 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus					Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali	Gugur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2008	0	27	27	3	12	3	0	0	18	9
2009	9	3	12	1	10	1	0	0	12	0
2010	0	230	230	26	149	45	4	0	224	6
2011	6	132	138	13	87	29	2	0	131	7
2012	7	105	112	11	57	27	8	1	104	8
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>497</b>	<b>519</b>	<b>54</b>	<b>315</b>	<b>105</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>489</b>	<b>-</b>

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2013)

#### 4.5 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Safaat, 2011:4). Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasi kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah (Budiardjo, 2008:383).

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (pada waktu yang sama) tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik, misalnya Partai Buruh Inggris berasal dari gerakan serikat buruh (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008:65-66).

Untuk mempermudah melakukan kontrol, pada masa Orde Baru dibentuk wadah khusus untuk perkumpulan, serikat, asosiasi yang berskala nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat. Sentralisasi tersebut berlaku juga untuk organisasi yang telah ada sebelumnya, harus melebur dengan organisasi dengan bentukan pemerintah. Organisasi induk yang dibuat seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) untuk guru, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk pengusaha, Kowani (Komite Wanita Indonesia) untuk wanita, HKTl (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) untuk petani, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) untuk nelayan, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk Wartawan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk pemuda.

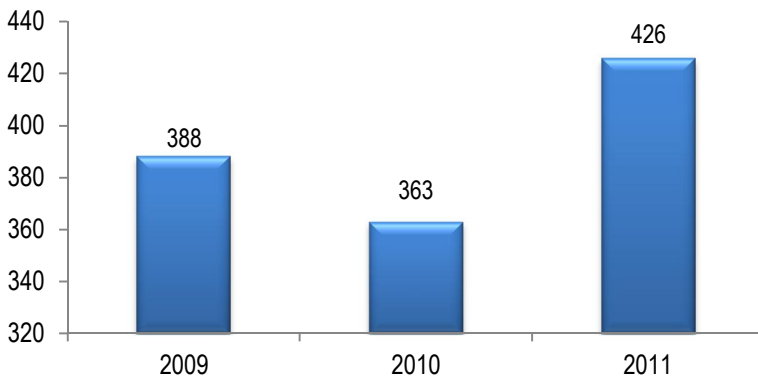
Pasca Orde Baru, kebebasan organisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legalitas tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Sekalipun demikian, kementerian dalam negeri mengesahkan 426 organisasi kemasyarakatan pada tahun 2011, lebih banyak 63 organisasi dibanding tahun 2010 sebanyak 363, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 4.5. Organisasi

masyarakat tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dalam Tabel 4.27 disajikan jumlah desa yang di dalamnya terdapat organisasi non-profit pada Tahun 2011.

Organisasi masyarakat di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan orientasi. Tidak semua organisasi memiliki anggota dan basis massa. Sebagian organisasi hanya beranggotakan beberapa orang namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat umumnya tidak terasosiasi secara langsung dengan organisasi seperti ini, namun kepentingan-kepentingan mereka terhadap pemerintah kerap diperjuangkan oleh organisasi. Bentuk lain dalam artikulasi kepentingan dapat dilihat dari organisasi masyarakat yang berbasis massa. Di Indonesia, organisasi masyarakat identik dengan dua organisasi bercorak keagamaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi ini dapat dikatakan terbesar di Indonesia, memiliki anggota dan jaringan yang mengakar hingga di tingkat desa (Tabel 4.28 dan Tabel 4.29).

Di Indonesia juga terdapat berbagai organisasi internasional non-pemerintahan yang bergerak di berbagai bidang kerja. Dalam satu dekade terakhir terdapat 109 organisasi yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Tabel 4.30). Organisasi internasional non-pemerintahan paling banyak tercatat pada tahun 2009 dengan 33 organisasi dimana paling banyak bergerak di bidang kesehatan (29 organisasi). Sebanyak 49 dari keseluruhan organisasi tersebut berasal dari negara-negara Eropa, dan 45 organisasi berasal dari Amerika (Tabel 4.31). Lebih dari setengah (59) dari organisasi tersebut memiliki kantor pusat di Jakarta, sebagian kecil tersebar di berbagai provinsi. Di luar Jakarta, paling banyak terdapat di Aceh dengan 9 organisasi (Tabel 4.32).

**Grafik 4.5 Jumlah Pengesahan Organisasi Masyarakat 2009-2011**



Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

**Tabel 4.27 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Kegiatan Lembaga Non Profit Tahun 2011**

Provinsi	Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Sosial	Organisasi Profesi	Lembaga Keagamaan	LSM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	295	119	38	408	152
Sumatera Utara	813	179	87	925	452
Sumatera Barat	281	97	73	278	147
Riau	272	64	38	171	174
Jambi	132	43	28	199	127
Sumatera Selatan	358	84	44	251	224
Bengkulu	181	198	45	300	111
Lampung	802	143	145	608	202
Bangka Belitung	55	19	13	104	47
Kepulauan Riau	69	38	20	67	82
DKI Jakarta	118	80	34	65	55
Jawa Barat	1.423	478	209	1.525	870
Jawa Tengah	5.916	569	1.521	1.878	656
DI Yogyakarta	363	115	44	236	77
Jawa Timur	4.309	753	177	925	776
Banten	243	138	73	208	185
Bali	385	58	85	183	72
Nusa Tenggara Barat	265	177	24	154	177
Nusa Tenggara Timur	178	71	51	609	327
Kalimantan Barat	110	55	27	217	141
Kalimantan Tengah	102	34	23	345	88
Kalimantan Selatan	155	64	10	261	93
Kalimantan Timur	166	75	35	201	151
Sulawesi Utara	228	228	20	586	164
Sulawesi Tengah	563	89	56	908	134
Sulawesi Selatan	817	196	205	682	358
Sulawesi Tenggara	295	36	25	640	109
Gorontalo	74	33	6	178	43
Sulawesi Barat	105	37	26	261	49
Maluku	190	74	76	383	58
Maluku Utara	109	11	11	232	60
Papua Barat	63	17	10	172	22
Papua	114	31	16	300	57
<b>Indonesia</b>	<b>19.549</b>	<b>4.403</b>	<b>3.295</b>	<b>14.460</b>	<b>6.440</b>

Sumber: Potensi Desa, BPS (2011)

**Tabel 4.28 Organisasi Masyarakat - Nahdlatul Ulama**

Jaringan Nahdlatul Ulama	Jumlah
(1)	(2)
Pengurus Wilayah (Provinsi)	31
Pengurus Cabang (Kabupaten/Kota)	339
Pengurus Cabang Istimewa	12
Majelis Wakil Cabang (Kecamatan)	2.63
Pengurus Ranting (Desa/Kelurahan)	37.125
TK/TPQ	8.522
SD	197
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3.861
SLTP	378
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	733
SLTA	211
Madrasah Aliyah (MA)	212
Pesantren	6.830
Rumah Sakit, Poliklinik dan Rumah Bersalin	49
Koperasi (Koperasi An Nisa)	247
Basis GBLP (Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan)	135

Sumber: [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (2011)

**Tabel 4.29 Organisasi Masyarakat - Muhammadiyah**

Jaringan Muhammadiyah	Jumlah
(1)	(2)
Wilayah (Provinsi)	33
Daerah (Kabupaten/Kota)	417
Cabang (Kecamatan)	3.221
Ranting (Desa/Kelurahan)	8.107
TK/TPQ	4.623
Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
Pondok Pesantren	67
Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah	172
Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	457
Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
Panti jompo	54
Rehabilitasi Cacat	82
Sekolah Luar Biasa (SLB)	71
Masjid	6.118
Musholla	5.080
Tanah	20.945.504 M <sup>2</sup>

Sumber: [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) (2011)

**Tabel 4.30 Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Bidang Kerja**

Bidang	Tahun								Jumlah
	< 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lingkungan dan Konservasi	1	0	1	1	4	6	2	1	16
Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	2	6	4	1	13
Kesehatan	0	0	4	1	11	6	6	1	29
Pemberdayaan Masyarakat	3	1	3	0	4	7	4	0	22
Pendidikan	0	1	0	1	2	4	1	0	9
Bantuan Kemanusiaan	0	2	2	2	2	2	3	0	13
Penyediaan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Pelestarian Arsip Kuno	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Demokrasi	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Pertanian	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hukum dan HAM	0	0	0	1	0	1	0	0	2
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>109</b>

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2012)

**Tabel 4.31 Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Benua Asal**

Benua	Tahun								Jumlah
	< 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Amerika	0	2	4	1	14	14	10	0	45
Eropa	4	2	5	3	10	12	12	1	49
Australia	0	0	1	0	1	3	0	1	6
Asia	0	1	1	2	0	3	0	1	8
Afrika	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>109</b>

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2012)

**Tabel 4.32 Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Kantor Pusat**

Kantor Pusat	Tahun								Jumlah
	< 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jakarta	3	3	6	5	13	16	11	2	59
Nias	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Aceh	0	0	2	1	3	1	2	0	9
DIY	0	0	1	0	0	4	1	1	7
Bali	0	0	0	0	0	5	1	0	6
Sumbar	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Jambi	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medan	0	0	1	0	3	1	1	0	6
Depok	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Salatiga	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Bandung	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Bogor	0	0	1	0	1	1	1	0	4
Belum Ada	1	0	0	1	1	1	2	0	6
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>109</b>

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2012)

#### 4.6 Media Massa

Dalam teori demokrasi, bisa dikatakan media massa telah menjadi pilar demokrasi keempat di samping tiga pilar demokrasi lainnya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Rais, 2008: 115). Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat, berupa hak untuk memperoleh informasi (*right to know*) yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya di satu pihak, dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat di pihak lain (*right to speech*). Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat (Siregar, 2006:1).

Sejumlah ahli, melihat kebebasan pers dari dua dimensi, yakni kebebasan di level struktur dan penampilan (*performance*). Pertama, kebebasan di level struktur. Di level ini, kebebasan pers dilihat dari apakah ada jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers (McQuail, 2005:193-194). Ada sejumlah kondisi struktural yang penting dan harus ada sebagai jaminan atas kebebasan pers, misalnya: tidak ada sensor dan pembredelan. Adanya kebebasan untuk mempublikasikan berita, dan tidak ada kewajiban memberitakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh redaksi media. Keputusan mengenai peristiwa apa yang diliput dan berita apa yang dipublikasikan didasarkan pada pertimbangan redaksi media. Kondisi struktural lain yang penting adalah bebas dari kontrol pemilik dan kekuatan ekonomi lainnya. Selain dari penguasa, pers bebas juga ditandai oleh bebas dari tekanan atau kontrol dari pemilik. Kedua, kebebasan di level penampilan/pelaksanaan (*performance*). Ini berkaitan dengan bagaimana pers atau media menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk kepentingan publik. Kebebasan yang dimiliki oleh media seharusnya bisa dimanfaatkan oleh media sebagai alat kontrol (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Kebebasan pers itu juga seharusnya bisa dipakai untuk menyajikan berita yang berguna dan relevan bagi publik (Luwarso *et al*, 2008:7-8).

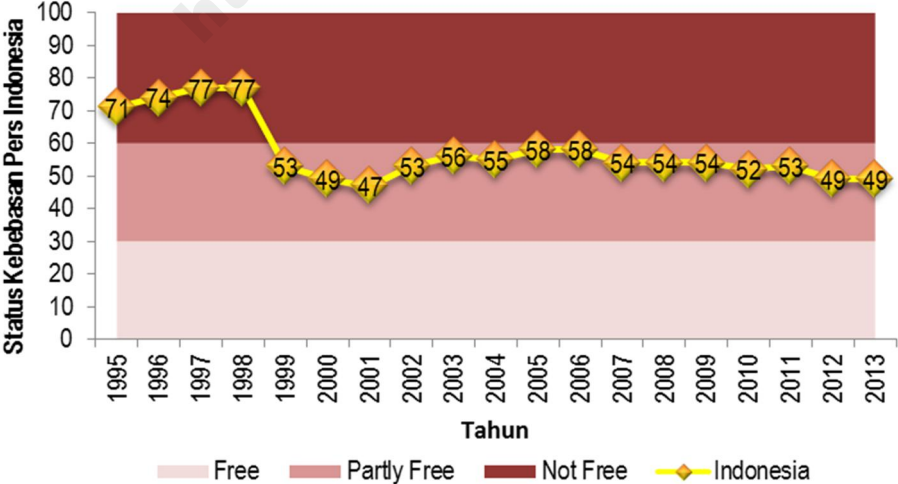
Terbitnya Undang-Undang No. 40/1999 tentang pers, menjadi pondasi penting yang memberikan jaminan pada kebebasan pers di Indonesia. Sekalipun demikian, jika dibandingkan dengan negara lain, menurut indeks kebebasan pers dari *Freedom House* pada tahun 2013 kebebasan pers Indonesia masih dikategorikan *partly free* dengan skor 49 (Tabel 4.39). Skor indeks kebebasan pers *Freedom House*, memberikan kategori *free* jika berada pada angka 0-30, *partly free* pada rentang 31-60, dan *not free* pada rentang 61-100. Jika dicermati melalui perbandingan skor Indonesia Tahun 1994 – 2013, nampak dinamika kebebasan pers Indonesia dengan pasang-surut yang sangat tajam. Pengekangan pers



terutama terlihat pada tahun 1995. Beranjak dari skor 58 yang masih tergolong *partly free* pada 1994 menjadi 71 pada tahun 1995, dan terus memburuk hingga mencapai skor 77 pada tahun 1998 (Grafik 4.6). Setelah itu kebebasan pers Indonesia memiliki trend yang semakin membaik, skor mengalami kenaikan drastis menjadi 58 pada Tahun 1999 hingga mencapai skor 49 pada Tahun 2012 dan 2013, yang merupakan skor terbaik kedua yang pernah dicapai setelah skor Tahun 2001 (Tabel 4.33, 4.34, 4.35).

Jumlah media massa baik yang harian, mingguan, tabloid, majalah, atau buletin dinamis setiap tahun. Selain itu, sejak 2004 mulai muncul kelompok-kelompok penerbitan surat kabar (Sudibyo *et al*, 2010:11) sebagaimana ditampilkan Tabel 4.38. Tiras media cetak, serta jumlah media cetak setiap provinsi ditampilkan pada Tabel 4.39. Pada tabel 4.40 ditampilkan rekapitulasi media cetak tahun 2011 -2012 berdasarkan frekuensi penerbitan. Perkembangan media massa dalam format elektronik juga semakin banyak. Tabel 4.41 menampilkan jumlah televisi dan radio yang terdapat di setiap provinsi. Kebebasan pers sekalipun dilindungi, namun juga dibatasi oleh undang-undang dan kode etik jurnalistik. Pelanggaran terhadap kaidah tersebut dapat dilaporkan pada Dewan Pers. Sejak tahun 2000, jumlah pengaduan yang masuk pada Dewan Pers juga mengalami tren yang terus bertambah setiap tahunnya (Tabel 4.42). Sementara Tabel 4.43 menampilkan jumlah desa/kelurahan yang dapat dijangkau siaran televisi. Jumlah desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sinyal handphone ditampilkan pada Tabel 4.44.

**Grafik 4.6 Status Kebebasan Pers Indonesia Tahun 1994 – 2013**



Sumber: Diolah dari Freedom House (2013)

Tabel 4.33 Kebebasan Pers Asia-Pasifik 1995 – 2000

Kebebasan Pers	1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Afghanistan	90	NF	90	NF	100	NF	100	NF	100	NF	90	NF
Australia	7	F	8	F	10	F	10	F	10	F	10	F
Bangladesh	49	PF	49	PF	57	PF	57	PF	59	PF	60	PF
Bhutan	62	NF	62	NF	65	NF	65	NF	80	NF	76	NF
Brunei	73	NF	74	NF	74	NF	74	NF	74	NF	74	NF
Myanmar	99	NF	99	NF	99	NF	99	NF	97	NF	100	NF
Kamboja	60	PF	65	NF	65	NF	65	NF	62	NF	61	NF
China	83	NF	83	NF	83	NF	81	NF	81	NF	80	NF
Timorleste	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fiji	56	PF	57	PF	60	PF	60	PF	59	PF	58	PF
Hong Kong	30	F	30	F	41	PF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
India	49	PF	48	PF	40	PF	37	PF	37	PF	42	PF
Indonesia	71	NF	74	NF	77	NF	77	NF	53	PF	49	PF
Japan	20	F	21	F	20	F	19	F	19	F	19	F
Kiribati	24	F	18	F	18	F	17	F	17	F	17	F
Laos	68	NF	62	NF	62	NF	66	NF	66	NF	66	NF
Malaysia	64	NF	61	NF	61	NF	61	NF	66	NF	70	NF
Maldives	62	NF	68	NF	65	NF	66	NF	66	NF	65	NF
Kep. Marshall	19	F	8	F	8	F	8	F	8	F	8	F
Micronesia	23	F	23	F	23	F	26	F	26	F	24	F
Mongolia	41	PF	34	PF	34	PF	34	PF	30	F	29	F
Nauru	18	F	6	F	6	F	6	F	6	F	6	F
Nepal	54	PF	52	PF	56	PF	59	PF	59	PF	59	PF
New Zealand	8	F	6	F	6	F	6	F	8	F	8	F
North Korea	92	NF	100	NF	100	NF	100	NF	100	NF	100	NF
Pakistan	59	PF	60	PF	54	PF	58	PF	60	PF	64	NF
Palau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papua Nugini	23	F	30	F	30	F	28	F	28	F	28	F
Philippines	46	PF	46	PF	46	PF	30	F	30	F	30	F
Samoa	29	F	28	F	28	F	28	F	31	PF	34	PF
Singapore	65	NF	61	NF	66	NF	66	NF	66	NF	66	NF
Kep. Solomon	18	F	13	F	14	F	14	F	16	F	18	F
South Korea	28	F	22	F	25	F	28	F	28	F	27	F
Sri Lanka	41	PF	46	PF	54	PF	50	PF	58	PF	70	NF
Taiwan	30	F	30	F	28	F	25	F	25	F	21	F
Thailand	49	PF	31	PF	34	PF	31	PF	30	F	30	F
Tonga	37	PF	35	PF	41	PF	39	PF	39	PF	36	PF
Tuvalu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vanuatu	54	PF	42	PF	42	PF	42	PF	42	PF	44	PF
Vietnam	68	NF	68	NF	69	NF	71	NF	71	NF	75	NF

Sumber: Freedom Of The Press, Freedom House (2012)

Ket : N = Nilai  
 S = Status  
 F = Free  
 PF = Partly Free  
 NF = Not Free  
 N/A = Not Available

Tabel 4.34 Kebebasan Pers Asia Pasifik 2001 – 2006

Kebebasan Pers	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Afghanistan	95	NF	N/A	N/A	74	NF	72	NF	68	NF	69	NF
Australia	10	F	10	F	14	F	14	F	18	F	19	F
Bangladesh	60	PF	63	NF	65	NF	68	NF	68	NF	68	NF
Bhutan	76	NF	72	NF	70	NF	68	NF	66	NF	65	NF
Brunei	74	NF	78	NF	76	NF	74	NF	75	NF	77	NF
Myanmar	100	NF	96	NF	94	NF	95	NF	96	NF	96	NF
Kamboja	61	NF	68	NF	64	NF	63	NF	62	NF	61	NF
China	80	NF	80	NF	80	NF	80	NF	82	NF	83	NF
Timorleste	21	F	21	F	22	F	29	F	30	F	39	PF
Fiji	44	PF	33	PF	29	F	29	F	30	F	28	F
Hong Kong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28	F	29	F
India	42	PF	42	PF	45	PF	41	PF	38	PF	37	PF
<b>Indonesia</b>	<b>47</b>	<b>PF</b>	<b>53</b>	<b>PF</b>	<b>56</b>	<b>PF</b>	<b>55</b>	<b>PF</b>	<b>58</b>	<b>PF</b>	<b>58</b>	<b>PF</b>
Japan	23	F	17	F	17	F	18	F	20	F	20	F
Kiribati	22	F	21	F	26	F	27	F	26	F	28	F
Laos	69	NF	82	NF	80	NF	82	NF	83	NF	81	NF
Malaysia	70	NF	71	NF	71	NF	69	NF	69	NF	65	NF
Maldives	65	NF	61	NF	64	NF	64	NF	68	NF	70	NF
Kep. Marshall	8	F	10	F	10	F	12	F	13	F	15	F
Micronesia	22	F	20	F	17	F	19	F	18	F	20	F
Mongolia	28	F	31	PF	36	PF	36	PF	35	PF	34	PF
Nauru	13	F	27	F	26	F	25	F	29	F	30	F
Nepal	57	PF	60	PF	65	NF	65	NF	69	NF	77	NF
New Zealand	8	F	8	F	8	F	10	F	12	F	13	F
North Korea	100	NF	96	NF	96	NF	98	NF	97	NF	97	NF
Pakistan	57	PF	57	PF	58	PF	59	NF	61	NF	61	NF
Palau	N/A	N/A	N/A	N/A	9	F	11	F	13	F	14	F
Papua Nugini	29	F	26	F	25	F	25	F	29	F	29	F
Philippines	30	F	30	F	30	F	34	PF	35	PF	40	PF
Samoa	21	F	23	F	24	F	24	F	25	F	29	F
Singapore	68	NF	68	NF	66	NF	64	NF	66	NF	66	NF
Kep. Solomon	22	F	24	F	25	F	30	F	30	F	30	F
South Korea	27	F	30	F	29	F	29	F	29	F	30	F
Sri Lanka	74	NF	63	NF	52	PF	53	PF	56	PF	58	PF
Taiwan	22	F	21	F	24	F	23	F	21	F	20	F
Thailand	29	F	30	F	36	PF	39	PF	42	PF	50	PF
Tonga	36	PF	36	PF	32	PF	44	PF	37	PF	32	PF
Tuvalu	N/A	N/A	N/A	N/A	16	F	19	F	20	F	26	F
Vanuatu	37	PF	24	F	21	F	23	F	24	F	25	F
Vietnam	80	NF	82	NF	82	NF	82	NF	82	NF	79	NF

Sumber: Freedom Of The Press, Freedom House (2013)

Ket : N = Nilai  
 S = Status  
 F = Free  
 PF = Partly Free  
 NF = Not Free  
 N/A = Not Available

Tabel 4.35 Kebebasan Pers Asia Pasifik 2007 – 2013

Kebebasan Pers	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Afghanistan	69	NF	71	NF	74	NF	76	NF	75	NF	74	NF	67	NF
Australia	21	F	21	F	22	F	22	F	21	F	21	F	21	F
Bangladesh	66	NF	68	NF	63	NF	56	PF	54	PF	52	PF	53	PF
Bhutan	62	NF	61	NF	61	NF	57	PF	57	PF	58	PF	58	PF
Brunei	76	NF	75	NF	75	NF	75	NF	75	NF	75	NF	75	NF
Myanmar	96	NF	97	NF	96	NF	95	NF	94	NF	85	NF	72	NF
Kamboja	58	PF	60	PF	61	NF	61	NF	63	NF	63	NF	66	NF
China	84	NF	84	NF	85	NF	84	NF	85	NF	85	NF	83	NF
Timorleste	42	PF	38	PF	37	PF	35	PF	35	PF	35	PF	35	PF
Fiji	39	PF	37	PF	40	PF	54	PF	57	PF	58	PF	56	PF
Hong Kong	30	F	30	F	33	PF	33	PF	32	PF	33	PF	35	PF
India	35	PF	35	PF	36	PF	33	PF	35	PF	37	PF	38	PF
Indonesia	54	PF	54	PF	54	PF	52	PF	53	PF	49	PF	49	PF
Japan	21	F	21	F	21	F	21	F	21	F	22	F	24	F
Kiribati	26	F	26	F	27	F	27	F	27	F	27	F	27	F
Laos	81	NF	83	NF	86	NF	84	NF	85	NF	84	NF	84	NF
Malaysia	68	NF	65	NF	65	NF	64	NF	64	NF	63	NF	64	NF
Maldives	68	NF	66	NF	56	PF	50	PF	50	PF	51	PF	55	PF
Kep. Marshall	17	F	17	F	17	F	17	F	17	F	17	F	17	F
Micronesia	20	F	21	F	21	F	21	F	21	F	21	F	21	F
Mongolia	36	PF	38	PF	41	PF	39	PF	39	PF	37	PF	37	PF
Nauru	28	F	28	F	28	F	28	F	28	F	28	F	28	F
Nepal	58	PF	57	PF	57	PF	59	PF	59	PF	55	PF	58	PF
New Zealand	13	F	13	F	14	F	14	F	15	F	17	F	16	F
North Korea	97	NF	98	NF	98	NF	99	NF	97	NF	97	NF	96	NF
Pakistan	63	NF	66	NF	62	NF	61	NF	61	NF	63	NF	64	NF
Palau	14	F	14	F	14	F	14	F	14	F	16	F	16	F
Papua Nugini	30	F	28	F	26	F	24	F	25	F	27	F	28	F
Philippines	46	PF	45	PF	45	PF	48	PF	46	PF	42	PF	43	PF
Samoa	30	F	29	F	29	F	29	F	30	F	29	F	29	F
Singapore	69	NF	69	NF	68	NF	68	NF	68	NF	67	NF	67	NF
Kep. Solomon	30	F	30	F	30	F	29	F	29	F	28	F	28	F
South Korea	30	F	30	F	30	F	30	F	32	PF	32	PF	31	PF
Sri Lanka	63	NF	67	NF	70	NF	72	NF	71	NF	72	NF	74	NF
Taiwan	20	F	20	F	23	F	24	F	25	F	25	F	26	F
Thailand	59	PF	56	PF	57	PF	58	PF	62	NF	60	PF	62	NF
Tonga	31	PF	31	PF	32	PF	32	PF	31	PF	29	F	29	F
Tuvalu	26	F	26	F	26	F	26	F	26	F	26	F	26	F
Vanuatu	24	F	23	F	23	F	23	F	25	F	26	F	25	F
Vietnam	77	NF	82	NF	83	NF	82	NF	83	NF	84	NF	84	NF

Sumber: Freedom Of The Press, Freedom House (2013)

Ket : N = Nilai  
 S = Status  
 F = Free  
 PF = Partly Free  
 NF = Not Free  
 N/A = Not Available

**Tabel 4.36 Kelompok Surat Kabar**

Kelompok Penerbit	Jumlah Surat Kabar
(1)	(2)
Kompas Gramedia (KKG)	81
Jawa Pos	122
Femina	11
Bali Pos	7
Mugi Rekso Abadi (MRA)	8
PinPoint	14
Pikiran Rakyat	8
Sari	4
Bisnis Indonesia	7
Pos Kota	3
Media Indonesia	2
Subentra Cipta Media	4
Info Kelapa Gading	3
Gatra	3
Tempo Inti Media	3
Mahaka Media	4
Media Nusantara Cipta (MNC)	3
<b>Jumlah</b>	<b>291</b>

Sumber: Sudibyo et al dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No 3 Desember 2010

**Tabel 4.37 Tiras Media Cetak 2006-2010**

Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Harian	6.058.486	7.217.600	7.490.252	8.080.694	8.744.483
Mingguan	1.081.953	1.353.953	1.039.853	1.063.353	1.084.075
Tabloid	4.732.055	4.782.555	4.621.055	5.427.955	5.400.803
Majalah	5.525.857	5.735.857	5.925.857	6.234.357	6.235.243
Buletin	7.809	7.809	7.809	7.809	33.809
Jumlah	17.406.160	19.097.774	19.084.826	20.814.168	21.498.413

Sumber: Asmoro Wikan, dalam Jurnal Pers Edisi No 5 Mei 2011

**Tabel 4.38 Rekapitulasi Media Cetak berdasarkan Provinsi Tahun 2010 – 2012**

Propinsi	Harian			Mingguan			Bulanan		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4	4	4	3	2	2	-	0	0
Sumatera Utara	29	34	20	35	45	22	4	6	1
Sumatera Barat	4	4	4	17	21	5	-	1	0
Riau	20	12	9	-	9	2	2	1	0
Kepulauan Riau	5	5	5	1	9	1	-	1	0
Jambi	9	12	3	3	3	1	-	0	0
Bengkulu	6	5	5	-	0	0	-	0	0
Sumatera Selatan	10	16	16	4	4	0	-	1	0
Bangka Belitung	4	5	3	-	1	0	-	0	0
Lampung	10	17	3	5	15	5	-	0	0
Banten	6	9	2	4	4	0	8	8	0
DKI Jakarta	46	31	22	133	150	56	43	237	27
Jawa Barat	10	11	12	10	9	5	15	17	0
Jawa Tengah	9	13	9	5	11	1	6	8	0
D I Yogyakarta	5	7	6	3	4	1	6	6	2
Jawa Timur	13	14	14	18	34	3	37	24	1
Bali	8	8	7	9	6	3	8	4	1
Nusa Tenggara Barat	6	12	7	1	3	0	1	1	0
Nusa Tenggara Timur	4	5	4	3	4	2	1	1	1
Kalimantan Barat	7	13	8	3	2	1	3	1	0
Kalimantan Selatan	8	6	4	10	12	1	-	4	0
Kalimantan Tengah	4	6	5	6	5	2	1	5	0
Kalimantan Timur	10	12	2	1	3	0	5	3	0
Sulawesi Selatan	7	11	7	17	25	7	8	28	4
Sulawesi Tenggara	7	7	6	-	1	0	-	0	0
Sulawesi Tengah	9	7	3	2	0	0	1	0	0
Gorontalo	3	3	1	1	2	0	-	0	0
Sulawesi Utara	10	10	7	2	0	0	2	0	0
Sulawesi Barat	1	1	1	-	0	0	-	0	0
Maluku	4	10	4	2	16	0	-	0	0
Maluku Utara	5	4	1	4	0	0	-	0	0
Papua	6	6	4	3	2	1	-	0	0
Papua Barat	2	2	0	-	0	0	-	0	0
<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>322</b>	<b>208</b>	<b>389</b>	<b>402</b>	<b>121</b>	<b>257</b>	<b>357</b>	<b>37</b>

Sumber: Data Pers Nasional tahun 2010, 2011, 2012

**Tabel 4.39 Rekapitulasi Media Elektronik Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 – 2012**

Provinsi	Radio			Televisi		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10	7	10	10	1	10
Sumatera Utara	5	7	7	2	2	2
Sumatera Barat	18	18	18	-	3	3
Riau	9	9	18	5	3	3
Kepulauan Riau	-	10	10	2	1	5
Jambi	3	5	5	1	2	2
Bengkulu	6	2	15	-	0	8
Sumatera Selatan	22	72	70	3	21	21
Bangka Belitung	8	6	25	-	1	2
Lampung	3	6	33	3	1	4
Banten	4	5	5	1	1	1
DKI Jakarta	26	41	41	14	16	16
Jawa Barat	3	8	9	2	3	5
Jawa Tengah	16	17	17	4	3	3
D I.Yogyakarta	20	20	26	1	2	4
Jawa Timur	86	86	86	13	12	12
Bali	6	13	6	1	4	4
Nusa Tenggara Barat	5	16	16	1	9	9
Nusa Tenggara Timur	24	24	24	-	6	6
Kalimantan Barat	11	34	33	-	4	4
Kalimantan Selatan	24	28	26	-	4	4
Kalimantan Tengah	10	25	23	1	16	16
Kalimantan Timur	3	3	3	2	7	7
Sulawesi Selatan	28	28	27	-	3	3
Sulawesi Tenggara	12	2	2	1	1	1
Sulawesi Tengah	4	28	28	-	4	4
Gorontalo	1	1	3	-	0	3
Sulawesi Utara	4	2	2	-	0	0
Sulawesi Barat	-	0	0	-	0	0
Maluku	6	6	9	1	7	8
Maluku Utara	-	0	12	-	0	3
Papua	1	1	1	-	3	0
Papua Barat	-	1	1	-	0	0
<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>531</b>	<b>611</b>	<b>118</b>	<b>140</b>	<b>173</b>

Sumber: Data Pers Nasional tahun 2010, 2011, 2012

**Tabel 4.40 Pengaduan Pada Dewan Pers**

<b>Periode</b>	<b>Pengaduan Langsung</b>	<b>Pengaduan tembusan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2000-2002	-	-	427
2003	34	67	101
2004	59	94	153
2005	68	59	127
2006	79	128	207
2007	56	263	319
2008	99	325	424
2009	89	353	442
2010	144	370	514
2011	166	345	511
<b>Jumlah</b>	<b>794</b>	<b>2,004</b>	<b>3225</b>

Sumber: Website Dewan Pers (November 2013)



**Tabel 4.41 Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Program TV yang Dapat Diterima Tahun 2011**

Provinsi	Program TV			
	TVRI	Swasta Nasional	Luar Negeri	Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2.211	1.614	-	1.111
Sumatera Utara	2.006	1.417	309	1.247
Sumatera Barat	589	436	75	457
Riau	548	370	284	346
Jambi	633	326	-	314
Sumatera Selatan	1.600	1.235	-	926
Bengkulu	586	346	-	419
Lampung	1.712	1.807	-	1.287
Bangka Belitung	96	230	-	45
Kepulauan Riau	173	175	175	155
DKI Jakarta	267	267	-	267
Jawa Barat	4.743	5.187	281	3.650
Jawa Tengah	7.964	8.194	-	6.150
DI Yogyakarta	429	435	-	408
Jawa Timur	7.771	8.007	-	6.900
Banten	1.340	1.363	42	1.176
Bali	615	582	7	586
Nusa Tenggara Barat	540	351	17	406
Nusa Tenggara Timur	849	212	31	248
Kalimantan Barat	434	218	262	175
Kalimantan Tengah	326	225	-	129
Kalimantan Selatan	1.329	1.023	36	844
Kalimantan Timur	352	302	117	150
Sulawesi Utara	660	617	92	584
Sulawesi Tengah	212	188	5	151
Sulawesi Selatan	1.065	828	78	629
Sulawesi Tenggara	443	288	25	188
Gorontalo	260	120	3	173
Sulawesi Barat	133	-	-	10
Maluku	143	85	-	74
Maluku Utara	65	-	-	-
Papua Barat	55	22	9	11
Papua	201	153	36	106
<b>Indonesia</b>	<b>40.350</b>	<b>36.623</b>	<b>1.884</b>	<b>29.322</b>

Sumber: Potensi Desa 2011 – BPS

**Tabel 4.42 Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Sinyal Telepon Genggam Tahun 2011**

Provinsi	Sinyal Kuat	Sinyal Lemah	Tidak Ada Sinyal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4.803	1.486	194	6.483
Sumatera Utara	3.891	1.520	386	5.797
Sumatera Barat	751	236	46	1.033
Riau	1.172	430	53	1.655
Jambi	918	397	57	1.372
Sumatera Selatan	2.119	994	73	3.186
Bengkulu	1.097	376	36	1.509
Lampung	1.762	645	57	2.464
Bangka Belitung	318	41	2	361
Kepulauan Riau	260	72	21	353
DKI Jakarta	267	-	-	267
Jawa Barat	5.282	579	44	5.905
Jawa Tengah	7.356	1.193	28	8.577
DI Yogyakarta	398	39	1	438
Jawa Timur	7.041	1.406	55	8.502
Banten	1.285	244	6	1.535
Bali	662	51	3	716
Nusa Tenggara Barat	926	115	43	1.084
Nusa Tenggara Timur	1.456	1.225	285	2.966
Kalimantan Barat	928	673	366	1.967
Kalimantan Tengah	625	625	278	1.528
Kalimantan Selatan	1.513	423	64	2.000
Kalimantan Timur	830	449	186	1.465
Sulawesi Utara	1.149	415	129	1.693
Sulawesi Tengah	938	484	393	1.815
Sulawesi Selatan	1.934	891	157	2.982
Sulawesi Tenggara	1.130	683	308	2.121
Gorontalo	445	229	57	731
Sulawesi Barat	283	236	119	638
Maluku	387	245	392	1.024
Maluku Utara	406	322	351	1.079
Papua Barat	301	206	932	1.439
Papua	705	342	2.877	3.924
<b>Indonesia</b>	<b>53.338</b>	<b>17.272</b>	<b>7.999</b>	<b>78.609</b>

Sumber: Potensi Desa 2011 – BPS

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

**PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**5**

---



## 5.1. Pemilihan Umum

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12). Mengacu pendapat tersebut, terdapat dua hal penting dalam esensi Pemilu, transfer kekuasaan secara damai serta arah kebijakan publik, atau disebut juga sebagai pelembagaan konflik dan kepentingan (M. Asfar, dalam Aribowo *et al*, 2002:8).

Pada negara yang plural seperti Indonesia, aspirasi dan kepentingan publik sangat heterogen. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan juga meniscayakan realitas berupa kesenjangan kualitas hidup pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses serta jauh dari pusat kekuasaan. Kondisi tersebut secara normatif menempatkan Pemilu sebagai mekanisme yang memberikan peluang-peluang bagi konstituen untuk mengalami percepatan perbaikan kualitas hidup. Agregasi kepentingan konstituen akan diperoleh melalui proses dan mekanisme pembuatan kebijakan publik yang diwakili oleh wakil-wakil atau pemimpin hasil dari Pemilu.

Pemilihan umum memiliki tiga variabel pokok yaitu penyuaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral distric*), dan formula pemilihan (Rae, 1967 dalam Surbakti, 2010:226). Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, ketiga variabel telah mengalami berbagai perubahan, termasuk pada Pemilu terakhir yang dilakukan pada tahun 2009. Secara filosofis, perubahan sistem Pemilu di Indonesia bergerak pada semangat yang semakin terbuka dan memberikan peran yang lebih besar bagi konstituen sebagai penentu kandidat terpilih. Mekanisme ini berdampak pada keniscayaan adanya orientasi akuntabilitas politik kandidat terpilih yang lebih besar kepada publik.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu Pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

## 5.2 Pemilu Legislatif 2014

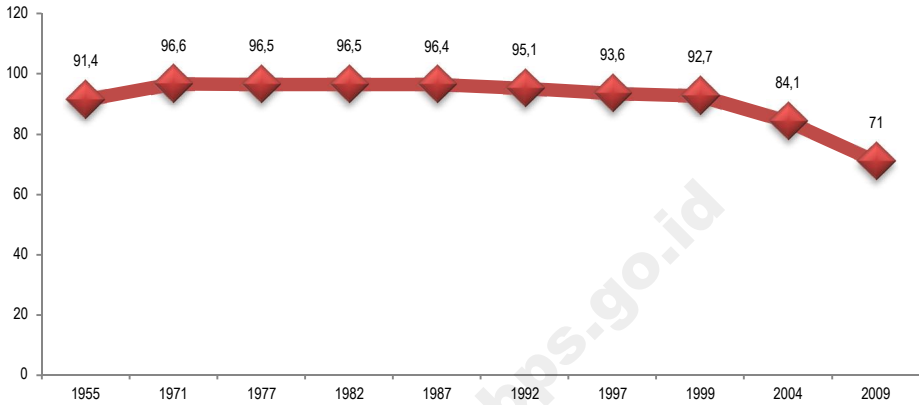
Selain proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*) serta hak partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan kandidat, adanya hak pilih universal bagi pemilih (*universal adult suffrage*) merupakan tiga komponen penting untuk membangun sebuah sistem Pemilu yang kompetitif (Ozbudun, 1997:393-422 dalam Asfar, 2002:12). Hak pilih yang universal maknanya setiap warganegara memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, status sosial, kecuali mereka yang kehilangan haknya atas perintah undang-undang. Hak memilih merupakan salah satu hak sipil politik yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Sekalipun terdapat regulasi yang menjamin hak pilih warga negara, bagian terpenting adalah bagaimana hak-hak politik tersebut dijamin dan dihormati pada pelaksanaan Pemilu. Jaminan hak pilih universal dalam regulasi maupun pelaksanaan merupakan tahapan paling awal dari terwujudnya integritas Pemilu (*electoral integrity*).

Pada tiga periode Pemilu terakhir jumlah pemilih terus mengalami peningkatan dari 116,3 juta (1999), 124,5 juta (2004), 176,4 juta (2009). Berdasarkan komposisi jenis kelamin, jumlah pemilih perempuan terus menurun dalam tiga Pemilu terakhir. Pada Pemilu tahun 1999 jumlah pemilih perempuan sebanyak 66,3 juta (57%) dan laki-laki 50,0 juta (43%), tahun 2004 pemilih perempuan sebanyak 66,0 juta (53%) dan laki-laki 58,5 juta (47%), sedangkan tahun 2009 pemilih perempuan 87,9 juta (48,8%) dan laki-laki 88,6 juta (50,2%). Berdasarkan sebaran pemilih, pada Pemilu 2009 mayoritas berada di Pulau Jawa 102,5 juta (59,8%) dengan alokasi 360 kursi (64,28%). Pada Pemilu 2014, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 186.575.617 dengan komposisi yang relatif merata, terdiri dari 93.421.653 laki-laki dan 93.153.933 perempuan. Sementara jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 545.647 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam Pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya

tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif tahun 1955 hingga Pemilu 2009 dapat dilihat pada Grafik 5.1.

**Grafik 5.1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 1955 – 2009**



Sumber: Diolah dari KPU



**Tabel 5.1. Jumlah TPS dan Daftar pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014**

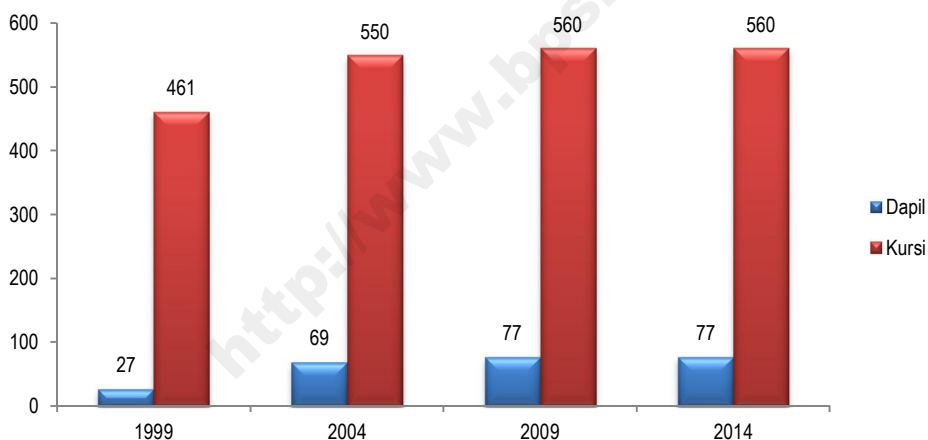
Provinsi	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10.843	1.642.721	1.686.617	3.329.338
Sumatera Utara	30.273	4.849.935	4.945.786	9.795.721
Sumatera Barat	12.548	1.809.705	1.834.195	3.643.900
Riau	12.469	2.104.106	1.986.102	4.090.208
Jambi	8.220	1.251.987	1.207.719	2.459.706
Sumatera Selatan	17.783	2.902.609	2.839.434	5.742.043
Bengkulu	4.285	697.417	669.590	1.367.007
Lampung	16.492	3.029.737	2.875.790	5.905.527
Bangka Belitung	2.741	474.259	449.551	923.810
Kepulauan Riau	3.745	657.158	625.714	1.282.872
DKI Jakarta	17.045	3.557.320	3.464.194	7.021.514
Jawa Barat	90.917	16.441.071	16.270.661	32.711.732
Jawa Tengah	77.693	13.532.804	13.687.348	27.220.152
DI Yogyakarta	8.523	1.324.452	1.407.668	2.732.120
Jawa Timur	86.385	15.013.794	15.498.034	30.511.828
Banten	20.638	4.005.263	3.881.582	7.886.845
Bali	8.094	1.458.033	1.483.124	2.941.157
Nusa Tenggara Barat	12.020	1.688.202	1.796.637	3.484.839
Nusa Tenggara Timur	11.027	1.512.399	1.602.273	3.114.672
Kalimantan Barat	12.189	1.794.343	1.713.465	3.507.808
Kalimantan Tengah	5.947	940.720	849.045	1.789.765
Kalimantan Selatan	8.933	1.408.806	1.395.405	2.804.211
Kalimantan Timur	8.651	1.522.851	1.338.992	2.861.843
Sulawesi Utara	5.301	946.392	918.646	1.865.038
Sulawesi Tengah	6.009	973.031	936.862	1.909.893
Sulawesi Selatan	18.035	3.045.080	3.237.259	6.282.339
Sulawesi Tenggara	5.421	895.049	887.375	1.782.424
Gorontalo	2.322	400.112	402.793	802.905
Sulawesi Barat	2.820	441.585	439.036	880.621
Maluku	3.805	586.526	599.874	1.186.400
Maluku Utara	2.396	418.635	405.546	824.181
Papua Barat	2.707	377.259	332.566	709.825
Papua	9.370	1.718.292	1.485.050	3.203.373
<b>Jumlah</b>	<b>545.647</b>	<b>93.421.653</b>	<b>93.153.933</b>	<b>186.575.617</b>

Sumber: kpu.go.id

### 5.3 Sistem dan Peserta Pemilu

Secara umum dikenal tiga model sistem Pemilu yaitu; *pertama*, sistem mayoritas-pluralitas atau yang dikenal dengan sistem distrik; *kedua*, sistem Pemilu perwakilan berimbang; *ketiga*, sistem Pemilu campuran yang terdiri dari banyak model, dan salah satu diantaranya yang menonjol adalah sistem Pemilu semi-proporsional (Surbakti, 2008:28). Pada Pemilu 2004, Indonesia menggunakan sistem Pemilu semi-proporsional, sedangkan pada 2009 menggunakan proporsional terbuka murni. Dari segi alokasi kursi, sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009 terus mengalami peningkatan (Grafik 5.2). Demikian juga dengan Daerah Pemilihan (Dapil) juga semakin bertambah banyak. Hal tersebut disebabkan 2 faktor, karena pemekaran daerah dan pengurangan alokasi pada tiap Dapil. Pada Pemilu 2004 alokasi kursi sebanyak 3-12 kursi per Dapil, sedangkan pada 2009 dan 2014 sebanyak 3-10 kursi per Dapil.

**Grafik 5.2 Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi Pada Pemilu 1999 - 2014**



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Daftar calon tetap (DCT) DPR RI yang mengikuti Pemilu 2014 sebanyak 6.397 calon yang tersebar pada seluruh Dapil di Indonesia. Jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 1.043 caleg dan yang paling sedikit dengan jumlah 36 Caleg, terdapat di Provinsi Sulbar, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung (Tabel 5.2). Berdasarkan jenis kelamin persentase Caleg laki-laki sebanyak 63,42% sementara perempuan sebanyak 36,57% (Tabel 5.3). Berdasarkan partai politik, jumlah perempuan paling banyak terdapat di partai Nasdem dengan jumlah 220 Caleg, sementara

paling sedikit terdapat di PKS dengan 178 Caleg (Tabel 5.4). Berdasarkan Usia, paling banyak Caleg memiliki usia dalam rentang 41-50 tahun dengan jumlah 2.361 Caleg. Jumlah Caleg muda (<30 tahun) paling banyak terdapat di PPP dengan jumlah 53 Caleg. Namun PPP bersama partai Demokrat juga merupakan partai politik dengan jumlah Caleg tertua (>60) paling banyak dengan jumlah masing-masing 12 Caleg (tabel 5.5 dan 5.6).

Berdasarkan data profil Caleg yang bersedia dipublikasikan, Sarjana merupakan jumlah tingkat pendidikan terbanyak dengan 3.170 Caleg, sementara paling sedikit berpendidikan SMP dengan jumlah 10 Caleg. Selain itu terdapat 26 profesor dan 311 caleg berpendidikan S3. Diantara jumlah tersebut, nasdem dan PAN merupakan partai dengan jumlah profesor paling banyak dengan 5 Caleg, sementara PKB dan Partai Gokar sama sekali tidak memiliki Caleg dengan gelar Profesor (Tabel 5.7 dan 5.8).

Berdasarkan pengolahan data yang sama juga dilasifikasikan tempat lahir dan tempat tinggal Caleg. Sekalipun tidak dapat secara persis memberikan gambaran tentang pola penempatan Caleg, namun sedikitnya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana model penempatan Caleg oleh Partai Politik (Tabel 5.9 – 5.10). Berdasarkan tempat lahir, 58,71% Caleg lahir pada provinsi yang sama dengan Dapil tempat pencalonannya, sementara 40,14% lainnya berasal dari luar provinsi Dapil tersebut. Jika dilihat dari alamat tempat tinggal, sebanyak 51,27 Caleg memiliki alamat tempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Dapil pencalonannya, sementara 47,63% memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda provinsi dengan Dapilnya.

Berdasarkan partai politik, Partai Nasdem memiliki 366 Caleg yang lahir pada provinsi sama dengan Dapil pencalonannya. Jumlah ini juga paling tinggi persentasenya, yang mencapai 66,91% dari seluruh Caleg Partai Nasdem. Sementara jika dilihat dari alamat tempat tinggal, PKS memiliki jumlah Caleg terbanyak yang alamat tempat tinggal dan Dapil tempat pencalonannya sama dengan jumlah 347 orang. Berdasarkan persentase, jumlah ini juga merupakan yang terbanyak karena mencapai 63,90% lebih tinggi dari urutan kedua yang diduduki Partai Nasdem dengan persentase 62,70%.

**Tabel 5.2 Daftar Calon Tetap DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT)												Total
	Nas dem	PKB	PKS	PDIP	Gol kar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
Sumut	30	30	23	30	28	30	30	30	29	30	30	30	350
Sumbar	14	14	14	14	14	14	14	14	13	14	14	13	166
Riau	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Jambi	7	7	5	7	7	7	7	7	6	7	7	7	81
Sumsel	17	17	11	17	17	17	13	17	17	17	17	17	194
Bengkulu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
Lampung	18	18	14	18	18	19	18	18	18	18	17	18	212
Kep. Babel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Kepri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
DKI Jakarta	21	21	18	21	21	21	21	21	22	21	21	21	250
Jawa Barat	91	90	80	91	84	91	92	91	80	81	90	82	1043
Jawa Tengah	77	76	72	77	77	77	77	77	75	77	77	74	913
DIY	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Jawa Timur	81	81	69	81	81	81	81	81	80	81	74	69	940
Banten	23	22	19	22	21	22	22	22	22	22	22	22	261
Bali	9	9	6	9	9	9	9	9	5	9	9	9	101
NTB	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	119
NTT	13	13	7	13	13	13	13	13	8	13	13	13	145
Kalbar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	119
Kalteng	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Kalsel	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	130
Kaltim	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Sulut	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	73
Sulteng	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Sulsel	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Sultra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Gorontalo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Sulbar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Maluku	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
Maluku Utara	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Papua Barat	10	10	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	114
Papua	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
<b>Total</b>	<b>547</b>	<b>543</b>	<b>479</b>	<b>546</b>	<b>536</b>	<b>546</b>	<b>544</b>	<b>546</b>	<b>520</b>	<b>536</b>	<b>535</b>	<b>519</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.3 Jenis Kelamin Caleg DPR RI Untuk Pemilu  
2014 Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95	61	156
Sumatera Utara	239	111	350
Sumatera Barat	108	58	166
Riau	83	49	132
Jambi	47	34	81
Sumatera Selatan	120	74	194
Bengkulu	24	23	47
Lampung	138	74	212
Kep. Bangka Belitung	24	12	36
Kepulauan Riau	21	15	36
Dki Jakarta	153	97	250
Jawa Barat	687	356	1043
Jawa Tengah	552	361	913
D I Yogyakarta	57	39	96
Jawa Timur	588	352	940
Banten	173	88	261
Bali	65	36	101
Nusa Tenggara Barat	85	34	119
Nusa Tenggara Timur	89	56	145
Kalimantan Barat	81	38	119
Kalimantan Tengah	48	24	72
Kalimantan Selatan	82	48	130
Kalimantan Timur	59	37	96
Sulawesi Utara	44	29	73
Sulawesi Tengah	48	24	72
Sulawesi Selatan	119	73	192
Sulawesi Tenggara	35	25	60
Gorontalo	21	15	36
Sulawesi Barat	25	11	36
Maluku	24	23	47
Maluku Utara	22	14	36
Papua Barat	79	35	114
Papua	22	14	36
<b>Total</b>	<b>4.057</b>	<b>2.340</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.4 Jenis Kelamin Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik**

Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)
Nasdem	327	220	547
PKB	340	203	543
PKS	301	178	479
PDI-P	354	192	546
Golkar	343	193	536
Gerindra	359	187	546
Demokrat	350	194	544
PAN	345	201	546
PPP	323	197	520
PBB	345	191	536
Gerindra	341	194	535
PKPI	329	190	519
<b>Total</b>	<b>4.057</b>	<b>2.340</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.5 Usia Caleg Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik**

Partai	Umur					Tidak Ada data	Total
	<30	31-40	41-50	51-60	>60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nasdem	20	95	204	151	76	1	547
PKB	74	128	193	108	31	9	543
PKS	11	111	260	68	23	6	479
PDI-P	28	87	227	129	66	9	546
Golkar	26	79	178	173	78	2	536
Gerindra	22	88	220	156	57	3	546
Demokrat	23	104	179	139	87	12	544
PAN	36	133	194	135	47	1	546
PPP	53	105	184	104	62	12	520
PBB	21	92	176	164	76	7	536
Gerindra	52	92	185	125	73	8	535
PKPI	48	95	161	144	68	3	519
<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>1.209</b>	<b>2.361</b>	<b>1.596</b>	<b>744</b>	<b>73</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.6 Usia Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Umur					Tdk Ada Data	Total
	<30	31-40	41-50	51-60	>60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12	27	48	45	22	2	156
Sumatera Utara	18	55	127	92	51	7	350
Sumatera Barat	3	16	49	56	41	1	166
Riau	7	23	56	28	18	0	132
Jambi	4	19	20	21	17	0	81
Sumatera Selatan	20	33	60	50	27	4	194
Bengkulu	1	7	21	15	3	0	47
Lampung	6	37	72	66	29	2	212
Kep. Bangka Belitung	2	10	8	13	3	0	36
Kepulauan Riau	0	5	8	18	4	1	36
Dki Jakarta	15	39	77	68	49	2	250
Jawa Barat	55	177	415	263	121	12	1043
Jawa Tengah	71	194	362	205	69	12	913
D I Yogyakarta	3	17	36	20	17	3	96
Jawa Timur	73	222	364	200	69	12	940
Banten	16	38	104	79	24	0	261
Bali	6	23	31	31	10	0	101
Nusa Tenggara Barat	10	22	42	28	17	0	119
Nusa Tenggara Timur	7	26	46	44	21	1	145
Kalimantan Barat	7	19	51	26	16	0	119
Kalimantan Tengah	4	12	23	22	9	2	72
Kalimantan Selatan	14	33	50	15	14	4	130
Kalimantan Timur	10	19	29	28	9	1	96
Sulawesi Utara	6	13	22	19	13	0	73
Sulawesi Tengah	9	21	21	11	10	0	72
Sulawesi Selatan	11	25	87	45	23	1	192
Sulawesi Tenggara	6	10	27	11	4	2	60
Gorontalo	2	7	14	8	5	0	36
Sulawesi Barat	4	6	14	8	4	0	36
Maluku	3	9	16	15	3	1	47
Maluku Utara	2	8	10	13	2	1	36
Papua Barat	4	31	36	26	15	2	114
Papua	3	6	15	7	5	0	36
<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>1.209</b>	<b>2.361</b>	<b>1.596</b>	<b>744</b>	<b>73</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.7 Pendidikan dan Gelar Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Pendidikan dan Gelar								Total
	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	Profesor	Tidak Ada Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0	30	3	80	35	2	1	5	156
Sumatera Utara	0	35	7	197	86	17	0	8	350
Sumatera Barat	0	23	3	83	37	13	0	7	166
Riau	0	17	2	63	36	8	0	6	132
Jambi	0	11	2	38	21	3	0	6	81
Sumatera Selatan	1	24	6	90	56	7	3	7	194
Bengkulu	1	2	0	21	22	1	0	0	47
Lampung	1	25	12	117	41	11	1	4	212
Kep Babel	0	5	4	15	9	0	0	3	36
Kepulauan Riau	0	4	1	15	12	2	0	2	36
Dki Jakarta	0	28	7	115	77	15	4	4	250
Jawa Barat	1	132	23	508	293	71	2	13	1043
Jawa Tengah	2	122	25	437	238	57	1	31	913
D I Yogyakarta	0	11	5	44	30	3	2	1	96
Jawa Timur	2	143	32	432	281	31	3	16	940
Banten	0	33	9	132	74	8	3	2	261
Bali	1	10	4	53	25	5	1	2	101
NTB	0	5	5	81	24	3	0	1	119
NTT	0	12	5	86	28	8	1	5	145
Kalimantan Barat	0	17	5	60	31	4	1	1	119
Kalteng	0	9	4	37	18	3	0	1	72
Kalsel	1	23	3	65	27	3	1	7	130
Kaltim	0	13	4	44	24	4	1	6	96
Sulawesi Utara	0	7	1	40	21	2	0	2	73
Sulawesi Tengah	0	12	3	35	19	1	0	2	72
Sulawesi Selatan	0	14	1	97	64	15	1	0	192
Sulawesi Tenggara	0	9	1	29	13	4	0	4	60
Gorontalo	0	4	1	20	9	2	0	0	36
Sulawesi Barat	0	9	1	20	4	1	0	1	36
Maluku	0	8	1	28	7	1	0	2	47
Maluku Utara	0	6	1	16	10	3	0	0	36
Papua Barat	0	22	5	51	31	2	0	3	114
Papua	0	8	0	21	5	1	0	1	36
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>833</b>	<b>186</b>	<b>3.170</b>	<b>1.708</b>	<b>311</b>	<b>26</b>	<b>153</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum



**Tabel 5.8 Pendidikan dan Gelar Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014  
Berdasarkan Partai Politik**

Partai	Pendidikan dan Gelar								Total
	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	S3 & Profesor	Tidak Ada Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nasdem	2	67	26	247	165	31	5	4	547
PKB	1	120	16	264	102	19	0	21	543
PKS	1	71	13	254	102	28	1	9	479
PDI-P	0	63	9	272	155	31	2	14	546
Golkar	1	30	12	277	181	33	0	2	536
Gerindra	1	61	5	275	162	34	2	6	546
Demokrat	1	40	16	264	174	44	3	2	544
PAN	0	60	8	269	175	21	5	8	546
PPP	1	75	25	249	141	13	2	14	520
PBB	0	61	18	270	145	33	3	6	536
Gerindra	2	94	19	267	106	13	2	32	535
PKPI	0	91	19	262	100	11	1	35	519
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>833</b>	<b>186</b>	<b>3.170</b>	<b>1.708</b>	<b>311</b>	<b>26</b>	<b>153</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.9 Tempat Lahir dan Tempat Tinggal Caleg DPR RI  
Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Partai Politik**

Partai	Tempat Lahir			Total	Tempat Tinggal			Total
	Asal Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan		Asal Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nasdem	366	179	2	547	343	204	0	547
PKB	343	184	16	543	322	214	7	543
PKS	291	185	3	479	347	130	2	479
PDIP	309	230	7	546	258	285	3	546
Golkar	305	231	0	536	223	312	1	536
Gerindra	332	213	1	546	284	260	2	546
Demokrat	294	242	8	544	228	313	3	544
PAN	317	227	2	546	272	271	3	546
PPP	337	170	13	520	294	213	13	520
Hanura	293	236	7	536	212	322	2	536
PBB	286	241	8	535	268	262	5	535
PKPI	283	230	6	519	229	262	28	519
<b>Total</b>	<b>3.756</b>	<b>2.568</b>	<b>73</b>	<b>6.397</b>	<b>3.280</b>	<b>3.048</b>	<b>69</b>	<b>6.397</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.10 Tempat Lahir dan Tempat Tinggal Caleg Untuk Pemilu 2014  
Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	Tempat Lahir			Tempat Tinggal		
	Sama Dengan Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan	Asal Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	122	32	2	93	60	3
Sumut	263	79	8	131	213	6
Sumbar	124	41	1	59	105	2
Riau	59	72	1	64	67	1
Jambi	48	33	-	45	35	1
Sumsel	129	63	2	84	105	5
Bengkulu	28	19	-	20	26	1
Lampung	113	97	2	91	118	3
Kep. Babel	21	15	-	14	22	-
Kepri	16	19	1	16	19	1
DKI Jakarta	99	149	2	206	42	2
Jawa Barat	514	518	11	630	407	6
Jawa Tengah	538	362	13	343	558	12
DIY	41	55	-	53	43	-
Jawa Timur	636	296	8	499	431	10
Banten	73	188	-	162	99	-
Bali	54	46	1	59	42	-
NTB	84	34	1	60	58	1
NTT	105	38	2	50	94	1
Kalbar	82	35	2	72	46	1
Kalteng	34	36	2	37	34	1
Kalsel	74	53	3	78	51	1
Kaltim	31	62	3	66	28	2
Sulut	37	35	1	29	43	1
Sulteng	39	33	-	34	37	1
Sulsel	162	30	-	102	88	2
Sultra	44	14	2	31	27	2
Gorontalo	24	12	-	13	23	-
Sulbar	14	21	1	14	22	-
Maluku	30	16	1	19	27	1
Maluku Utara	28	7	1	22	14	-
Papua Barat	72	40	2	65	47	2
Papua	18	18	-	19	17	-
<b>Total</b>	<b>3.756</b>	<b>2.568</b>	<b>73</b>	<b>3.280</b>	<b>3.048</b>	<b>69</b>

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

### 5.3. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD. Khusus di Provinsi Aceh, jumlah kontestan sebanyak 44 Parpol, 38 Parpol nasional ditambah 6 Parpol lokal. Provinsi DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif tingkat Provinsi. Pemerintahan Kota di Jakarta hanya bersifat administratif sehingga tidak memiliki DPRD.

Jumlah Dapil DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dengan demikian, jumlah Dapil paling banyak di pulau Jawa karena memiliki jumlah penduduknya paling banyak. Hanya Sumatera Utara daerah di luar Jawa yang memiliki 12 Dapil, sama dengan jumlah yang dimiliki Jawa Barat. Jumlah tersebut sekaligus merupakan yang terbanyak di Indonesia. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, Dapil paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan 195 Dapil dan Provinsi Jawa Barat dengan 185 Dapil. Secara lengkap Dapil untuk Pemilu tahun 2014 ditampilkan pada Tabel 5.11.

Berdasarkan hasil Pemilu 2009, jumlah perempuan yang terpilih pada DPRD Provinsi masih terbilang rendah. Hingga tahun 2012, persentase perempuan di DPRD Provinsi yang tertinggi terdapat di Provinsi Maluku dengan 31,82%. Untuk persentase terendah terdapat di Provinsi Aceh dengan persentase 5,80% (Tabel 5. 12). Pada tingkat Kabupaten/Kota, agregat jumlah perempuan terpilih terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebanyak 24,47% sementara persentase paling rendah terdapat pada Provinsi Bali dengan 5,07% (Tabel 5.13).

**Tabel 5.11 Daerah Pemilihan Pemilu 2014**

Provinsi	Dapil Pemilihan Legislatif			Alokasi Kursi		
	Pusat	Provinsi	Kota/ kabupaten	Pusat	Provinsi	Kota/ kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2	10	92	13	81	650
Sumatera Utara	3	12	140	30	100	1.100
Sumatera Barat	2	8	71	14	65	585
R i a u	2	8	56	11	65	480
J a m b i	1	6	46	7	55	375
Sumatera Selatan	2	10	69	17	75	590
Bengkulu	1	7	36	4	45	275
Lampung	2	8	74	18	85	590
Bangka Belitung	1	6	26	3	45	190
Kepulauan Riau	1	7	23	3	45	195
DKI Jakarta	3	10	-	21	106	-
Jawa Barat	11	12	142	91	100	1.225
Jawa Tengah	10	10	185	77	100	1.570
D I Yogyakarta	1	7	27	8	55	220
Jawa Timur	11	11	195	87	100	1.675
Banten	3	10	44	22	85	380
B a l i	1	9	42	9	55	350
Nusa Tenggara Barat	1	8	43	10	65	385
Nusa Tenggara Timur	2	8	86	13	65	635
Kalimantan Barat	1	8	63	10	65	495
Kalimantan Tengah	1	5	48	6	45	380
Kalimantan Selatan	2	7	51	11	55	430
Kalimantan Timur	1	6	53	8	55	425
Sulawesi Utara	1	6	53	6	45	390
Sulawesi Tengah	1	6	44	6	45	335
Sulawesi Selatan	3	11	98	24	85	815
Sulawesi Tenggara	1	6	49	5	45	345
Gorontalo	1	6	25	3	45	160
Sulawesi Barat	1	7	20	3	45	170
M a l u k u	1	7	38	4	45	290
Maluku Utara	1	5	28	3	45	220
Papua Barat	1	5	38	10	45	245
P a p u a	1	7	97	3	55	725
<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>259</b>	<b>2.102</b>	<b>560</b>	<b>2.112</b>	<b>16.895</b>

Sumber: Diolah dari KPU

**Tabel 5.12 Komposisi jenis kelamin DPRD Provinsi Tahun 2010 – 2012**

Provinsi	2011				2012			
	L	P	T	% P	L	P	T	% P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	65	4	69	5,80	65	4	69	5,80
Sumatera Utara	83	16	99	16,16	83	17	100	17,00
Sumatera Barat	48	7	55	12,73	48	7	55	12,73
Riau	46	9	55	16,36	43	12	55	21,82
Jambi	40	5	45	11,11	39	6	45	13,33
Sumatera Selatan	64	11	75	14,67	64	11	75	14,67
Bengkulu	37	8	45	17,78	35	10	45	22,22
Lampung	60	15	75	20,00	60	15	75	20,00
Kep. Bangka Belitung	40	5	45	11,11	40	5	45	11,11
Kepulauan Riau	38	7	45	15,56	40	5	45	11,11
DKI Jakarta	72	22	94	23,40	71	23	94	24,47
Jawa Barat	77	23	100	23,00	76	24	100	24,00
Jawa Tengah	79	21	100	21,00	79	21	100	21,00
D.I.Yogyakarta	43	12	55	21,82	43	12	55	21,82
Jawa Timur	82	17	99	17,17	81	19	100	19,00
Banten	69	16	85	18,82	69	16	85	18,82
Bali	51	4	55	7,27	51	4	55	7,27
Nusa Tenggara Barat	49	6	55	10,91	49	6	55	10,91
Nusa Tenggara Timur	51	4	55	7,27	51	4	55	7,27
Kalimantan Barat	51	4	55	7,27	51	4	55	7,27
Kalimantan Tengah	37	8	45	17,78	37	8	45	17,78
Kalimantan Selatan	47	8	55	14,55	46	9	55	16,36
Kalimantan Timur	44	11	55	20,00	44	11	55	20,00
Sulawesi Utara	33	12	45	26,67	32	13	45	28,89
Sulawesi Tengah	37	8	45	17,78	36	9	45	20,00
Sulawesi Selatan	63	12	75	16,00	63	12	75	16,00
Sulawesi Tenggara	38	7	45	15,56	38	7	45	15,56
Gorontalo	36	9	45	20,00	36	9	45	20,00
Sulawesi Barat	40	5	45	11,11	40	5	45	11,11
Maluku	31	14	45	31,11	30	14	44	31,82
Maluku Utara	41	4	45	8,89	41	4	45	8,89
Papua Barat	37	7	44	15,91	38	6	44	13,64
Papua	51	5	56	8,93	51	5	56	8,93
<b>Total</b>	<b>1.680</b>	<b>326</b>	<b>2.006</b>		<b>1.670</b>	<b>337</b>	<b>2.007</b>	

**Tabel. 5.13 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Perempuan Tahun 2012**

Provinsi	2012			% P
	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	596	44	640	6,88
Sumatera Utara	962	112	1074	10,43
Sumatera Barat	514	41	555	7,39
Riau	400	40	440	9,09
Jambi	308	31	339	9,14
Sumatera Selatan	508	66	574	11,50
Bengkulu	227	33	260	12,69
Lampung	467	75	542	13,84
Kep. Bangka Belitung	160	15	175	8,57
Kepulauan Riau	164	21	185	11,35
DKI Jakarta	71	23	94	24,47
Jawa Barat	1016	191	1207	15,82
Jawa Tengah	1379	201	1580	12,72
D.I.Yogyakarta	189	31	220	14,09
Jawa Timur	1426	252	1678	15,02
Banten	327	48	375	12,80
Bali	318	17	335	5,07
Nusa Tenggara Barat	315	20	335	5,97
Nusa Tenggara Timur	572	48	620	7,74
Kalimantan Barat	442	37	479	7,72
Kalimantan Tengah	291	59	350	16,86
Kalimantan Selatan	346	64	410	15,61
Kalimantan Timur	348	57	405	14,07
Sulawesi Utara	302	88	390	22,56
Sulawesi Tengah	276	48	324	14,81
Sulawesi Selatan	677	113	790	14,30
Sulawesi Tenggara	280	40	320	12,50
Gorontalo	141	24	165	14,55
Sulawesi Barat	131	19	150	12,67
Maluku	255	15	270	5,56
Maluku Utara	187	23	210	10,95
Papua Barat	216	18	234	7,69
Papua	601	66	667	9,90

Sumber: BPS Provinsi

#### 5.4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi Indonesia. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara langsung tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Tabel 5.14 menampilkan waktu pelaksanaan dan banyaknya calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jumlah DPT dan suara sah ditampilkan pada Tabel 5.15, sementara perolehan suara ditampilkan pada Tabel 5.16. Pada Tabel 5.17 ditampilkan jenis kelamin, tahun pelantikan serta latar belakang gubernur terpilih hingga tahun 2012.

Pada banyak Pilkada, hampir selalu ditemui calon perseorangan setelah dibuka peluangnya melalui UU No 12/2008. Sekalipun demikian, jumlah yang mampu terpilih masih belum banyak. Pada tingkat Kabupaten/Kota hanya 12 kepala daerah yang terpilih melalui jalur perseorangan. Pada tingkat provinsi, bahkan tidak satupun calon perseorangan mampu memenangkan Pilkada. Jumlah yang minim juga terlihat pada kepala daerah perempuan. Pada tingkat Provinsi hanya terdapat Ibu Ratu Atut yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten. Sekalipun persentasenya relatif sama dengan tingkat provinsi (berkisar 3%), jumlah yang sedikit lebih banyak dapat dilihat pada kepala daerah tingkat kota/kabupaten. Tercatat terdapat 17 Bupati/Walikota dan 23 Wabup/Wawali berjenis kelamin perempuan di seluruh Indonesia (Tabel 5.17).

**Tabel 5.14. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

Provinsi	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
Aceh	9 April 2012	5
Sumatera Utara	7 Maret 2013	5
Sumatera Barat	30 Juni 2010	4
Riau	4 September 2013	5
Jambi	19 Juni 2010	4
Sumatera Selatan	6 Juni 2013	4
Bengkulu	3 Juli 2010	5
Lampung	Oktober 2008	6
Kepulauan Bangka Belitung	23 Februari 2012	4
Kepulauan Riau	26 Mei 2010	3
DKI Jakarta	20 September 2012	5
Jawa Barat	24 Februari 2013	5
Jawa Tengah	26 Mei 2013	3
DI Yogyakarta	Gubernur Diangkat	-
Jawa Timur	29 Agustus 2013	4
Banten	22 Oktober 2011	3
Bali	15 Mei 2013	2
Nusa Tenggara Barat	13 Mei 2013	4
Nusa Tenggara Timur	18 Maret 2013	5
Kalimantan Barat	20 September 2012	4
Kalimantan Tengah	5 Juni 2010	4
Kalimantan Selatan	2 Juni 2010	5
Kalimantan Timur	10 September 2013	3
Sulawesi Utara	3 Agustus 2010	4
Sulawesi Tengah	6 April 2011	5
Sulawesi Selatan	22 Januari 2013	3
Sulawesi Tenggara	4 November 2012	3
Gorontalo	16 November 2011	3
Sulawesi Barat	10 Oktober 2011	3
Maluku	11 Juni 2013	5
Maluku Utara	1 Juli 2013	6
Papua Barat	9 November 2011	4
Papua	29 Januari 2013	6

Sumber: Diolah dari pemberitaan media



**Tabel 5.15. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi**

Provinsi	Terdaftar di DPT	Suara Sah	% suara sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3.244.729	2.381.183	73,39
Sumatera Utara	10.295.013	4.861.467	47,22
Sumatera Barat	3.262.656	2.027.780	62,15
Riau	4.000.459	2.220.154	55,49
Jambi	2.231.632	1.537.303	68,89
Sumatera Selatan	5.825.765	3.759.738	64,53
Bengkulu	1.282.356	851.965	66,44
Lampung	5.384.498	3.498.599	64,98
Kepulauan Bangka Belitung	872.102	510.360	58,52
Kepulauan Riau	1.217.361	621.847	51,08
DKI Jakarta	6.996.951	4.952.945	70,79
Jawa Barat	32.536.980	20.115.423	61,82
Jawa Tengah	27.385.985	14.259.945	52,07
DI Yogyakarta <sup>1)</sup>	-	-	-
Jawa Timur	30.019.300	17.343.832	57,77
Banten	7.118.587	4.302.424	60,44
Bali	2.925.679	2.126.472	72,68
Nusa Tenggara Barat	3.478.892	2.341.492	67,30
Nusa Tenggara Timur	3.027.094	2.081.942	68,77
Kalimantan Barat	3.377.997	2.350.026	70,70
Kalimantan Tengah	1.626.067	1.024.429	63,00
Kalimantan Selatan	2.623.296	1.661.223	63,32
Kalimantan Timur	2.795.821	1.499.097	53,61
Sulawesi Utara	1.745.477	1.233.981	70,70
Sulawesi Tengah	1.785.763	1.275.507	75,87
Sulawesi Selatan	6.283.811	4.294.960	68,34
Sulawesi Tenggara	1.701.698	1.060.398	62,31
Gorontalo	756.758	600.323	79,33
Sulawesi Barat	819.848	612.087	74,66
Maluku		Proses Rekap Suara	
Maluku Utara	527.115	832.135	63,34
Papua Barat	629.032	425.076	67,58
Papua	2.705.775	2.320.791	51,69

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

Catatan: 1) Gubernur diangkat

**Tabel 5.16. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih**

Provinsi	Perolehan Suara		Partai Pendukung
	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.327.695	55,75	Partai Aceh
Sumatera Utara	1.604.337	33,00	PKS, Hanura, PBR, Patriot, PKNU
Sumatera Barat	657.763	32,44	PKS, PBR, Hanura
Riau	1.322.327	59,56	Partai Golkar
Jambi	607.030	40,6	Demokrat, Golkar, PKS
Sumatera Selatan	1.405.510	37,38	Golkar, PBB, PNBK, PAN, PD, PBR
Bengkulu	269.812	32,67	PKS, PBR
Lampung	1.513.666	43,27	PDI-P
Kep. Bangka Belitung	169.790	33,20	Golkar, PKS
Kepulauan Riau	231.951	37,30	Golkar, PDIP
DKI Jakarta	2.472.130	53,82	PDI-P, Gerindra
Jawa Barat	6.515.313	32,38	PKS, PPP, Hanura, PBB
Jawa Tengah	6.962.417	48,82	PDI-P
DI Yogyakarta	-	-	Gubernur Diangkat
Jawa Timur	8.195.816	47,25	Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PKNU, Hanura, Gerindra, PPP
Banten	2.136.035	49,65	Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PAN, PPNU, PKPB, PPD, PDS
Bali	1.063.734	50,02	Golkar, PD, P.Hanura, PKP, PAN, PKPI, PNBK, PKPB, P.Gerindra
Nusa Tenggara Barat	1.038.638	44,35	Demokrat, P.Golkar, PDI-P, PPP, PAN, PKB, P.Gerindra
Nusa Tenggara Timur	1.067.054	51,25	PDI-P, PKB, PPP, P.Hanura, PKS
Kalimantan Barat	1.225.185	52,13	PDI-P, Demokrat
Kalimantan Tengah	433.087	42,27	PDI-P
Kalimantan Selatan	777.554	46,81	PPP
Kalimantan Timur	644.887	43,02	Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Partai Patriot, PDK, PDS, PKB, Hanura
Sulawesi Utara	395.096	32,02	Demokrat, PAN, Gerindra, PPP
Sulawesi Tengah	411.113	36,15	PBB, PAN, PKB, PKPI
Sulawesi Selatan	2.251.407	52,41	Golkar, PAN, PDIP, PDK, PKNU, PDS
Sulawesi Tenggara	522.807	49,30	PKS, PD, PAN
Gorontalo	264.011	43,98	Golkar, PPP
Sulawesi Barat	296.633	48,46	Golkar, PDI-P, Demokrat, Hanura, PKS, PKPB.
Maluku			Proses Rekap Suara
Maluku Utara	268.661	50,96	Golkar, Partai Hanura, PPP, PDS, PKPB
Papua Barat	186.040	43,77	Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PPP, PBB, PPI, PKPB, Patriot.
Papua	1.199.657	44,21	PD, PKS, PKPB, PNIM, PNBKI, Patriot, PKPI

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

**Tabel 5.17. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, tahun Pelantikan dan Jabatan Sebelumnya**

Provinsi	Jenis Kelamin		Pelantikan (Tahun)	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
	Gubernur	Wakil Gubernur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	L	L	2012	Dokter
Sumatera Utara	L	L	2013	Wakil Gubernur Sumatera Utara
Sumatera Barat	L	L	2010	Anggota DPR RI
Riau	L	L	2013	Bupati Rokan Hilir 2011
Jambi	L	L	2010	Bupati Sarolangun
Sumatera Selatan	L	L	2013	Gubernur Sumatera Selatan
Bengkulu	L	L	2012	Gubernur Bengkulu
Lampung	L	L	2009	Purnawirawan Polisi
Kepulauan Bangka Belitung	L	L	2013	Gubernur Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau	L	L	2010	Wakil Gubernur Kepri
DKI Jakarta	L	L	2012	Walikota Surakarta
Jawa Barat	L	L	2013	Gubernur Jawa Barat
Jawa Tengah	L	L	2013	Anggota DPR RI
D I Yogyakarta	L	L	2012	Gubernur DIY
Jawa Timur	L	L	2013	Gubernur Jawa Timur
Banten	P	L	2012	Gubernur Banten
Bali	L	L	2013	Gubernur Bali
Nusa Tenggara Barat	L	L	2013	Gubernur NTB
Nusa Tenggara Timur	L	L	2013	Gubernur NTT
Kalimantan Barat	L	L	2013	Gubernur Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah	L	L	2010	Gubernur Kalteng
Kalimantan Selatan	L	L	2010	Gubernur Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur	L	L	2013	Gubernur Kalimantan Timur
kalimantan Utara	L	L	2013	PNS (Pejabat Sementara)
Sulawesi Utara	L	L	2010	Gubernur Sulut
Sulawesi Tengah	L	L	2011	Bupati Parigi Moutong
Sulawesi Selatan	L	L	2013	Gubernur Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara	L	L	2013	Gubernur Sulawesi tenggara
Gorontalo	L	L	2012	Bupati Gorontalo Utara
Sulawesi Barat	L	L	2011	Gubernur Sulbar
Maluku*				Sekda (Pelaksana harian)
Maluku Utara	L	L	2013	Bupati Kabupaten Kep.Sula
Papua Barat	L	L	2013	Gubernur Papua Barat
Papua	L	L	2012	Bupati Kabupaten Puncak Jaya

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

**Tabel 5.18 Jenis Kelamin Kepala Daerah Tingkat kabupaten Kota dan Kepala Daerah Terpilih Melalui Jalur Perseorangan**

Provinsi	Jenis Kelamin				Perseorangan
	Bupati/Walikota		Wabup/Wawali		
	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23	0	22	1	1
Sumatera Utara	33	0	29	1	1
Sumatera Barat	19	0	18	0	0
Riau	12	0	12	0	0
Jambi	11	0	11	0	0
Sumatera Selatan	15	1	14	1	0
Bengkulu	10	0	8	1	1
Lampung	15	0	12	0	1
Kep. Bangka Belitung	7	0	6	0	0
Kepulauan Riau	7	0	7	0	0
DKI Jakarta	6	0	6	0	0
Jawa Barat	24	3	24	0	1
Jawa Tengah	33	2	28	3	0
D I Yogyakarta	3	2	4	1	0
Jawa Timur	35	3	34	3	1
Banten	7	1	6	2	0
Bali	8	1	9	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	10	0	1
Nusa Tenggara Timur	22	0	22	0	2
Kalimantan Barat	13	1	14	0	1
Kalimantan Tengah	14	0	12	2	1
Kalimantan Selatan	13	0	12	0	0
Kalimantan Timur	9	1	9	0	0
Kalimantan Utara	5	0	5	0	0
Sulawesi Utara	13	2	13	1	0
Sulawesi Tengah	12	0	11	0	0
Sulawesi Selatan	24	0	22	1	0
Sulawesi Tenggara	13	0	10	2	0
Gorontalo	6	0	4	0	1
Sulawesi Barat	6	0	5	0	0
Maluku	8	0	6	2	0
Maluku Utara	9	0	8	1	0
Papua Barat	13	0	10	1	0
Papua	29	0	27	0	0
<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>17</b>	<b>450</b>	<b>23</b>	<b>12</b>

Sumber: Diolah Dari Kementerian dalam Negeri (2013)

## 5.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C (1), yang berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang berhak mengajukan permohonan menurut Pasal 74 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan partai politik peserta Pemilu. Tidak semua perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke MK. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: terpilihnya anggota DPD; penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, terdapat dua periode yang berbeda. Pada periode awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diamanatkan kepada Mahkamah Agung (MA). Pasal 106 UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MA.

Ketentuan tersebut hanya berlaku sampai pertengahan tahun 2008 karena pada tanggal 28 April 2008 diundangkan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, dimulai periode penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh MK. Semenjak keputusan itu, jumlah gugatan terhadap hasil Pilkada terus meningkat, dari hanya 27 pada tahun 2008 menjadi 230 gugatan pada 2010, 116 gugatan pada tahun 2011, dan 112 gugatan pada tahun 2012. Pada tahun 2009 hanya ada 3 gugatan, karena pada tahun tersebut berbarengan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pilkada tidak boleh diselenggarakan (Tabel 5.19). Rekapitulasi keputusan MK terhadap perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ditampilkan pada Tabel 5.20. Untuk sengketa Pemilu 2004 terdapat sebanyak 45 gugatan, sedangkan pada Pemilu 2009 sebanyak 71 gugatan. Dari 6 partai politik lokal di Aceh, pada Pemilu 2009 hanya dua partai politik lokal Aceh yang tidak mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera dan Partai Rakyat Aceh.

Tabel 5.19 Sengketa Pemilu di MK

Tahun	Sengketa Pemilu Legislatif	Sengketa Pilkada
(1)	(2)	(3)
2004	45	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	-	-
2008	-	27
2009	71	3
2010	-	230
2011	-	116
2012	-	112
<b>Jumlah</b>	<b>116</b>	<b>488</b>

Sumber: Mahkamah Konstitusi (2011)

Tabel 5.20 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus					Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali	Gugur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2008	0	27	27	3	12	3	0	0	18	9
2009	9	3	12	1	10	1	0	0	12	0
2010	0	230	230	26	149	45	4	0	224	6
2011	6	132	138	13	87	29	2	0	131	7
2012	7	105	112	11	57	27	8	1	104	8
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>497</b>	<b>519</b>	<b>54</b>	<b>315</b>	<b>105</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>489</b>	<b>-</b>

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2013)

<http://www.bps.go.id>

# Demokrasi dan Keragaman Indonesia

6

<http://www.kemendagri.go.id>



<http://www.bps.go.id>

## 6.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekan, seringkali dipraktekan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi defisit sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. Freedom House misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *not free countries*. Indonesia yang sebelumnya digolongkan sebagai negara dengan status *partly free*, sejak tahun 2008 telah digolongkan sebagai *free countries*. Dalam tren global yang dibuat freedom house, terlihat dalam rentang empat dekade terakhir jumlah negara-negara dengan status *free countries* semakin banyak (Tabel 6.1 dan 6.2). Selain *Freedom House*, *The Economist* juga membuat pengukuran serupa tentang demokrasi dengan kategori *full democracies*, *flawed democracies*, *hybrid regimes*, serta *authoritarian regimes* (Tabel 6.3). *The economist* juga mencantumkan ranking dari semua negara yang diukur. Pada Tahun 2007 Indonesia menempati ranking 65,

turun menjadi peringkat 69 pada tahun 2008 dan naik menjadi peringkat 60 pada tahun 2010 dan menempati posisi 58 pada Tahun 2012 (Tabel 6.4). Indonesia, sejak tahun 2010 telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS dan Bappenas. Metode penelitian menggunakan pendekatan triangulasi, yang merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif diperoleh melalui koding koran dan dokumen, sedangkan kualitatif melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.

Indeks ini juga menghasilkan angka nasional, yang merupakan gabungan dari indeks di tiap provinsi. Aspek yang diukur dalam IDI di antaranya; kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Pada Tabel 6.5 dapat dilihat perbandingan IDI antar provinsi pada tahun 2009 – 2012. Pada Tabel 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9 ditampilkan peringkat pengukuran IDI pada tahun 2009 – 2012. Sekalipun sebuah provinsi berada di peringkat pertama, namun aspek-aspek dalam pengukuran IDI di provinsi tersebut bisa saja memiliki ranking yang berbeda karena IDI merupakan indeks komposit. Skor tertinggi untuk tiap aspek pada IDI tahun 2009 – 2012 ditampilkan pada Tabel 6.10, 6.11, 6.12, dan 6.13

**Tabel 6.1. Status Demokrasi Negara-Negara Dunia Tahun 1972 - 2012**

Tahun	Jumlah Negara	Free Countries		Partly Free Countries		Not Free Countries	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2012	195	90	46	58	30	47	24
2011	195	87	45	60	31	48	24
2010	194	87	45	60	31	47	24
2009	194	89	46	58	30	47	24
2008	193	89	46	62	32	42	22
2007	193	90	47	60	31	43	22
2006	193	90	47	58	30	45	23
2005	192	89	46	58	30	45	24
2004	192	89	46	58	28	49	26
2003	192	88	46	55	29	49	25
2002	192	89	46	55	29	48	25
2001	192	85	44	59	31	48	25
2000	192	86	45	58	30	48	25
1999	192	85	44	60	31	47	25
1998	191	88	46	53	28	50	26
1997	191	81	42	57	30	53	28
1996	191	79	41	59	31	53	28
1995	191	76	40	62	32	53	28
1994	191	76	40	61	32	54	28
1993	190	72	38	63	33	55	29
1992	186	75	40	73	39	38	21
1991	183	76	42	65	35	42	23
1990	165	65	40	50	30	50	30
1989	167	61	37	44	26	62	37
1988	167	60	36	39	23	68	41
1987	167	58	35	58	35	51	30
1986	167	57	34	57	34	53	32
1985	167	56	34	46	34	55	33
1984	167	53	32	59	35	55	33
1982-1983*	166	52	31	56	34	58	35
1981-1982**	165	54	33	47	28	64	39
1980	162	51	31	51	31	60	37
1979	161	51	32	54	33	56	35
1978	158	47	30	56	35	55	35
1977	155	43	28	48	31	64	41
1976	159	42	26	49	31	68	43
1975	158	40	25	53	34	65	41
1974	152	41	27	48	32	63	41
1973	151	44	29	42	28	65	43
1972	151	44	29	38	25	69	46

Sumber: Freedom In The World 2013, Freedom House

**Tabel 6.2 Tren Perkembangan Kebebasan Global**

Tahun	Free Countries		Partly Free Countries		Not Free Countries	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	90	46	58	30	47	24
2010	87	45	60	31	47	24
2000	86	45	58	30	48	25
1990	65	40	50	30	50	30
1980	51	31	51	31	60	37

Sumber: *Freedom In The World 2013, Freedom House*

**Tabel 6.3 Indeks Demokrasi Dunia Berdasarkan Tipe Rezim**

Status	Jumlah Negara	% Negara	% Dari Populasi Dunia
(1)	(2)	(3)	(4)
Full democracies	25	15	11,3
Flawed democracies	54	32,3	37,2
Hybrid regimes	37	22,2	14,4
Authoritarian regimes	51	30,5	37,1

Sumber: *Democracy index 2012, The Economist*

**Tabel 6.4 Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2012 Versi *The Economist***

Tahun	Rang king	Total Skor	Skor Kategori					Status
			Proses Pemilu dan Pluralisme	Fungsi Pemerintahan	Partisipasi Politik	Budaya Politik	Kebebasan Sipil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	53	6,76	6,92	7,50	6,11	5,63	7,65	Flawed Democracies
2011	60	6,53	6,92	7,50	5,56	5,63	7,06	Flawed Democracies
2010	60	6,53	6,92	7,00	5,00	5,63	7,06	Flawed Democracies
2008	69	6,34	6,92	6,76	5,00	6,25	6,76	Flawed Democracies
2007	65	6,41	6,92	7,14	5,00	6,25	6,76	Flawed Democracies

Sumber: *Democracy index 2007, 2008, 2010, 2011 7 2012, The Economist*

**Tabel 6.5 Skor IDI Menurut Provinsi Tahun 2009 – 2012**

Provinsi	Skor			
	2009	2010	2011	2012
Aceh	66,29	65,36	55,54	54,02
Sumatera Utara	60,2	63,45	66,15	58,51
Sumatera Barat	60,29	63,04	65,02	60,82
Riau	75,85	71,45	70,65	67,00
Jambi	71	65,88	70,46	68,81
Sumatera Selatan	72,52	73,65	67,92	73,17
Bengkulu	64,76	70,78	71,36	61,70
Lampung	67,47	67,8	74,08	72,26
Bangka Belitung	67,01	65,94	67,13	69,37
Kepulauan Riau	73,61	62,89	70,78	65,61
DKI Jakarta	73,91	77,44	77,81	77,72
Jawa Barat	71,07	59,41	66,18	57,05
Jawa Tengah	66,45	63,42	65,59	63,79
DI Yogyakarta	67,55	74,33	71,67	72,96
Jawa Timur	62,49	55,12	55,98	54,99
Banten	67,98	60,6	67,37	65,29
Bali	70,35	72,44	74,2	71,75
Nusa Tenggara Barat	58,12	58,13	54,49	57,97
Nusa Tenggara Timur	71,64	72,05	72,34	72,67
Kalimantan Barat	72,38	69,32	74,86	65,38
Kalimantan Tengah	77,63	71,1	76,28	65,78
Kalimantan Selatan	66,63	70,94	66,47	61,13
Kalimantan Timur	72,31	73,04	66,37	71,23
Sulawesi Utara	70,94	65,94	71,19	76,50
Sulawesi Tengah	66,02	66,63	64	64,97
Sulawesi Selatan	61,48	56,67	65,31	68,55
Sulawesi Tenggara	64,29	54,79	57,56	57,26
Gorontalo	73,5	64,97	62,77	59,37
Sulawesi Barat	67,99	68,82	66,36	63,65
Maluku	69,07	69,51	68,38	59,68
Maluku Utara	67,21	59,92	59,17	66,83
Papua Barat	63,06	67,75	61,78	65,70
Papua	63,8	60,26	59,05	60,71
<b>Indonesia</b>	<b>67,3</b>	<b>63,17</b>	<b>65,48</b>	<b>62,63</b>

*Sumber: BPS*

Tabel 6.6 Indeks Demokrasi Indonesia 2009

Rank	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalimantan Tengah	98,45	60,50	78,69	77,63
2	Riau	93,14	65,40	70,68	75,85
3	DKI Jakarta	91,65	52,20	86,09	73,91
4	Kepulauan Riau	96,22	59,47	67,62	73,61
5	Gorontalo	96,05	56,39	72,32	73,50
6	Sumatera Selatan	95,42	56,07	69,83	72,52
7	Kalimantan Barat	98,29	53,46	69,85	72,38
8	Kalimantan Timur	98,22	54,78	67,57	72,31
9	Nusa Tenggara Timur	95,55	51,46	73,63	71,64
10	Jawa Barat	85,84	68,48	56,61	71,07
11	Jambi	95,86	50,41	72,43	71,00
12	Sulawesi Utara	92,23	58,50	63,91	70,94
13	Bali	93,97	49,82	73,24	70,35
14	Maluku	92,77	52,05	66,30	69,07
15	Sulawesi Barat	93,82	53,09	59,15	67,99
16	Banten	95,46	49,47	62,83	67,98
17	DI Yogyakarta	92,15	52,52	60,48	67,55
18	Lampung	90,57	51,81	63,27	67,47
19	Maluku Utara	93,61	46,30	67,23	67,21
20	Bangka Belitung	96,51	48,29	59,65	67,01
21	Kalimantan Selatan	68,24	62,63	70,95	66,63
22	Jawa Tengah	86,48	51,85	64,43	66,45
23	Aceh	64,42	70,39	62,13	66,29
24	Sulawesi Tengah	98,51	45,90	57,14	66,02
25	Bengkulu	94,26	54,03	44,70	64,76
26	Sulawesi Tenggara	94,66	43,97	58,37	64,29
27	Papua	92,83	43,84	58,97	63,80
28	Papua Barat	93,14	37,09	66,48	63,06
29	Jawa Timur	83,30	50,96	54,64	62,49
30	Sulawesi Selatan	82,94	42,36	64,88	61,48
31	Sumatera Barat	63,06	53,57	67,48	60,29
32	Sumatera Utara	84,16	41,26	60,14	60,20
33	Nusa Tenggara Barat	68,05	47,50	62,48	58,12
<b>Indonesia</b>		<b>86,97</b>	<b>54,60</b>	<b>62,72</b>	<b>67,30</b>

Sumber: BPS

Tabel 6.7 Indeks Demokrasi Indonesia 2010

Rank	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	92,46	56,19	92,30	77,44
2	DI Yogyakarta	91,24	55,96	82,25	74,33
3	Sumatera Selatan	100,00	55,17	69,85	73,65
4	Kalimantan Timur	97,79	53,89	72,34	73,04
5	Bali	94,10	51,52	78,43	72,44
6	Nusa Tenggara Timur	95,55	55,89	68,15	72,05
7	Riau	91,02	47,19	85,39	71,45
8	Kalimantan Tengah	94,51	56,05	65,57	71,10
9	Kalimantan Selatan	67,74	72,66	72,25	70,94
10	Bengkulu	94,40	64,35	51,29	70,78
11	Maluku	96,22	48,12	69,89	69,51
12	Kalimantan Barat	99,17	45,19	70,11	69,32
13	Sulawesi Barat	94,48	47,22	66,06	68,82
14	Lampung	94,39	53,90	56,44	67,80
15	Papua Barat	99,84	44,24	64,73	67,75
16	Sulawesi Tengah	92,19	51,82	58,01	66,63
17	Bangka Belitung	85,95	48,44	68,57	65,94
18	Sulawesi Utara	92,98	44,90	65,34	65,94
19	Jambi	85,15	48,14	69,81	65,88
20	Aceh	69,98	62,63	63,87	65,36
21	Gorontalo	82,55	51,72	63,90	64,97
22	Sumatera Utara	76,64	57,42	56,45	63,45
23	Jawa Tengah	84,83	46,29	63,70	63,42
24	Sumatera Barat	58,34	63,90	67,59	63,04
25	Kepulauan Riau	87,04	39,80	69,20	62,89
26	Banten	83,17	38,70	66,99	60,60
27	Papua	90,72	31,76	67,22	60,26
28	Maluku Utara	92,59	30,82	65,06	59,92
29	Jawa barat	74,41	46,74	60,67	59,41
30	Nusa Tenggara Barat	67,22	46,48	65,19	58,13
31	Sulawesi Selatan	78,19	32,40	68,17	56,67
32	Jawa Timur	78,48	42,06	46,47	55,12
33	Sulawesi Tenggara	83,71	30,46	57,06	54,79
	<b>Indonesia</b>	<b>82,53</b>	<b>47,87</b>	<b>63,11</b>	<b>63,17</b>

Sumber: BPS



Tabel 6.8 Indeks Demokrasi Indonesia 2011

Rank	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi Indonesia
		Kebebasan Sipil	Hak-Hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	89,94	58,32	93,50	77,81
2	Kalimantan Tengah	92,56	54,73	90,04	76,28
3	Kalimantan Barat	97,15	49,34	87,38	74,86
4	Bali	95,44	50,08	85,79	74,20
5	Lampung	93,14	61,15	70,64	74,08
6	Nusa Tenggara Timur	96,79	47,56	80,97	72,34
7	D.I.Yogyakarta	87,22	52,35	82,81	71,67
8	Bengkulu	94,10	59,47	61,63	71,36
9	Sulawesi Utara	98,44	52,86	66,03	71,19
10	Kepulauan Riau	87,15	56,00	73,66	70,78
11	Riau	83,12	52,90	83,18	70,65
12	Jambi	91,62	46,27	82,27	70,46
13	Maluku	90,70	46,14	75,61	68,38
14	Sumatera Selatan	84,05	49,41	77,05	67,92
15	Banten	80,41	44,57	87,18	67,37
16	Kep. Bangka Belitung	88,27	47,11	72,33	67,13
17	Kalimantan Selatan	56,33	64,25	82,76	66,47
18	Kalimantan Timur	91,84	45,12	68,10	66,37
19	Sulawesi Barat	94,80	42,65	68,26	66,36
20	Jawa Barat	78,92	46,42	81,55	66,18
21	Sumatera Utara	79,23	59,47	60,31	66,15
22	Jawa Tengah	84,05	46,29	73,04	65,59
23	Sulawesi Selatan	80,97	39,33	86,87	65,31
24	Sumatera Barat	60,57	59,21	79,83	65,02
25	Sulawesi Tengah	92,23	37,01	71,36	64,00
26	Gorontalo	81,80	44,36	68,08	62,77
27	Papua Barat	93,59	43,99	50,03	61,78
28	Maluku Utara	90,04	32,61	62,56	59,17
29	Papua	87,73	29,43	70,04	59,05
30	Sulawesi Tenggara	85,81	29,18	67,11	57,56
31	Jawa Timur	71,58	40,32	61,23	55,98
32	Aceh	58,65	47,90	63,77	55,54
33	Nusa Tenggara Barat	55,45	49,60	61,06	54,49
<b>INDONESIA</b>		<b>80,79</b>	<b>47,54</b>	<b>74,72</b>	<b>65,48</b>

Sumber: BPS

Tabel 6.9 Indeks Demokrasi Indonesia 2012

Rank	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi Indonesia
		Kebebasan Sipil	Hak-Hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI	88,11	62,52	88,81	77,72
2	Sulut	95,64	58,65	80,77	76,50
3	Sumsel	93,26	55,21	76,42	73,17
4	DIY	87,39	55,52	82,52	72,96
5	NTT	91,06	50,89	84,15	72,67
6	Lampung	94,14	50,60	79,16	72,26
7	Bali	94,18	45,00	86,01	71,75
8	Kaltim	97,16	51,69	69,68	71,23
9	Babel	83,09	51,21	80,97	69,37
10	Jambi	86,23	46,60	82,18	68,81
11	Sulsel	87,07	43,74	84,66	68,55
12	Riau	80,21	47,16	81,89	67,00
13	Malut	88,15	50,13	66,55	66,83
14	Kalteng	68,44	51,05	85,82	65,78
15	Papua Barat	94,42	45,74	61,27	65,70
16	Kepri	82,68	49,98	68,95	65,61
17	Kalbar	92,37	37,18	76,23	65,38
18	Banten	79,20	51,03	70,42	65,29
19	Sulteng	93,43	37,65	72,55	64,97
20	Jateng	75,03	46,29	77,46	63,79
21	Sulbar	88,67	35,92	76,22	63,65
22	Bengkulu	77,76	48,93	61,79	61,70
23	Kalsel	49,51	52,59	89,33	61,13
24	Sumbar	57,10	50,85	81,32	60,82
25	Papua	91,11	32,99	66,50	60,71
26	Maluku	76,05	45,08	62,27	59,68
27	Gorontalo	73,25	50,76	55,59	59,37
28	Sumut	73,85	49,82	53,01	58,51
29	NTB	58,31	49,60	70,85	57,97
30	Sultra	91,39	29,50	58,44	57,26
31	Jabar	65,93	46,58	62,51	57,05
32	Jatim	80,97	36,17	52,22	54,99
33	Aceh	60,16	47,16	57,21	54,02
<b>INDONESIA</b>		<b>77,94</b>	<b>46,33</b>	<b>69,28</b>	<b>62,63</b>

Sumber: BPS

**Tabel 6.10 Skor Tertinggi Tiap Aspek Menurut Provinsi Tahun 2009**

Rank	Kebebasan Sipil		Rank	Hak-hak Politik		Rank	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Skor		Provinsi	Skor		Provinsi	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sulteng	98,51	1	Aceh	70,39	1	DKI	86,09
2	Kalteng	98,45	2	Jabar	68,48	2	Kalteng	78,69
3	Kalbar	98,29	3	Riau	65,40	3	NTT	73,63
4	Kaltim	98,22	4	Kalsel	62,63	4	Bali	73,24
5	Babel	96,51	5	Kalteng	60,50	5	Jambi	72,43
6	Kepri	96,22	6	Kepri	59,47	6	Gorontalo	72,32
7	Gorontalo	96,05	7	Sulut	58,50	7	Kalsel	70,95
8	Jambi	95,86	8	Gorontalo	56,39	8	Riau	70,68
9	NTT	95,55	9	Sumsel	56,07	9	Kalbar	69,85
10	Banten	95,46	10	Kaltim	54,78	10	Sumsel	69,83
11	Sumsel	95,42	11	Bengkulu	54,03	11	Kepri	67,62
12	Sultra	94,66	12	Sumbar	53,57	12	Kaltim	67,57
13	Bengkulu	94,26	13	Kalbar	53,46	13	Sumbar	67,48
14	Bali	93,97	14	Sulbar	53,09	14	Malut	67,23
15	Sulbar	93,82	15	DIY	52,52	15	Papua Barat	66,48
16	Malut	93,61	16	DKI	52,20	16	Maluku	66,30
17	Riau	93,14	17	Maluku	52,05	17	Sulsel	64,88
18	Papua Barat	93,14	18	Jateng	51,85	18	Jateng	64,43
19	Papua	92,83	19	Lampung	51,81	19	Sulut	63,91
20	Maluku	92,77	20	NTT	51,46	20	Lampung	63,27
21	Sulut	92,23	21	Jatim	50,96	21	Banten	62,83
22	DIY	92,15	22	Jambi	50,41	22	NTB	62,48
23	DKI	91,65	23	Bali	49,82	23	Aceh	62,13
24	Lampung	90,57	24	Banten	49,47	24	DIY	60,48
25	Jateng	86,48	25	Babel	48,29	25	Sumut	60,14
26	Jabar	85,84	26	NTB	47,50	26	Babel	59,65
27	Sumut	84,16	27	Malut	46,30	27	Sulbar	59,15
28	Jatim	83,30	28	Sulteng	45,90	28	Papua	58,97
29	Sulsel	82,94	29	Sultra	43,97	29	Sultra	58,37
30	Kalsel	68,24	30	Papua	43,84	30	Sulteng	57,14
31	NTB	68,05	31	Sulsel	42,36	31	Jabar	56,61
32	Aceh	64,42	32	Sumut	41,26	32	Jatim	54,64
33	Sumbar	63,06	33	Papua Barat	37,09	33	Bengkulu	44,70
	<b>Indonesia</b>	<b>86,97</b>		<b>Indonesia</b>	<b>54,60</b>		<b>Indonesia</b>	<b>62,72</b>

Sumber: BPS

**Tabel 6.11 Skor Tertinggi Tiap Aspek Menurut Provinsi Tahun 2010**

Rank	Kebebasan Sipil		Rank	Hak-hak Politik		Rank	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Skor		Provinsi	Skor		Provinsi	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumsel	100,00	1	Kalsel	72,66	1	DKI	92,30
2	Papua Barat	99,84	2	Bengkulu	64,35	2	Riau	85,39
3	Kalbar	99,17	3	Sumbar	63,90	3	DIY	82,25
4	Kaltim	97,79	4	Aceh	62,63	4	Bali	78,43
5	Maluku	96,22	5	Sumut	57,42	5	Kaltim	72,34
6	NTT	95,55	6	DKI	56,19	6	Kalsel	72,25
7	Kalteng	94,51	7	Kalteng	56,05	7	Kalbar	70,11
8	Sulbar	94,48	8	DIY	55,96	8	Maluku	69,89
9	Bengkulu	94,40	9	NTT	55,89	9	Sumsel	69,85
10	Lampung	94,39	10	Sumsel	55,17	10	Jambi	69,81
11	Bali	94,10	11	Lampung	53,90	11	Kepri	69,20
12	Sulut	92,98	12	Kaltim	53,89	12	Babel	68,57
13	Malut	92,59	13	Sulteng	51,82	13	Sulsel	68,17
14	DKI	92,46	14	Gorontalo	51,72	14	NTT	68,15
15	Sulteng	92,19	15	Bali	51,52	15	Sumbar	67,59
16	DIY	91,24	16	Babel	48,44	16	Papua	67,22
17	Riau	91,02	17	Jambi	48,14	17	Banten	66,99
18	Papua	90,72	18	Maluku	48,12	18	Sulbar	66,06
19	Kepri	87,04	19	Sulbar	47,22	19	Kalteng	65,57
20	Babel	85,95	20	Riau	47,19	20	Sulut	65,34
21	Jambi	85,15	21	Jabar	46,74	21	NTB	65,19
22	Jateng	84,83	22	NTB	46,48	22	Malut	65,06
23	Sultra	83,71	23	Jateng	46,29	23	Papua Barat	64,73
24	Banten	83,17	24	Kalbar	45,19	24	Gorontalo	63,90
25	Gorontalo	82,55	25	Sulut	44,90	25	Aceh	63,87
26	Jatim	78,48	26	Papua Barat	44,24	26	Jateng	63,70
27	Sulsel	78,19	27	Jatim	42,06	27	Jabar	60,67
28	Sumut	76,64	28	Kepri	39,80	28	Sulteng	58,01
29	Jabar	74,41	29	Banten	38,70	29	Sultra	57,06
30	Aceh	69,98	30	Sulsel	32,40	30	Sumut	56,45
31	Kalsel	67,74	31	Papua	31,76	31	Lampung	56,44
32	NTB	67,22	32	Malut	30,82	32	Bengkulu	51,29
33	Sumbar	58,34	33	Sultra	30,46	33	Jatim	46,47
	<b>Indonesia</b>	<b>82,53</b>		<b>Indonesia</b>	<b>47,87</b>		<b>Indonesia</b>	<b>63,11</b>

Sumber: BPS

Tabel 6.12 Skor Tertinggi Tiap Aspek Menurut Provinsi Tahun 2011

Kebebasan Sipil			Hak-Hak Politik			Lembaga Demokrasi		
Rank	Provinsi	Skor	Rank	Provinsi	Skor	Rank	Provinsi	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sultra	98,44	1	Kalsel	64,25	1	DKI	93,50
2	Kalbar	97,15	2	Lampung	61,15	2	Kalteng	90,04
3	NTT	96,79	3	Bengkulu	59,47	3	Kalbar	87,38
4	Bali	95,44	4	Sumut	59,47	4	Banten	87,18
5	Sulbar	94,80	5	Sumbar	59,21	5	Sulsel	86,87
6	Bengkulu	94,10	6	DKI	58,32	6	Bali	85,79
7	Papua Barat	93,59	7	Kepri	56,00	7	Riau	83,18
8	Lampung	93,14	8	Kalteng	54,73	8	D.I.Y	82,81
9	Kalteng	92,56	9	Riau	52,90	9	Kalsel	82,76
10	Sulteng	92,23	10	Sulut	52,86	10	Jambi	82,27
11	Kaltim	91,84	11	D.I.Y	52,35	11	Jabar	81,55
12	Jambi	91,62	12	Bali	50,08	12	NTT	80,97
13	Maluku	90,70	13	NTB	49,60	13	Sumbar	79,83
14	Malut	90,04	14	Sumsel	49,41	14	Sumsel	77,05
15	DKI	89,94	15	Kalbar	49,34	15	Maluku	75,61
16	Kep Babel	88,27	16	Aceh	47,90	16	Kepri	73,66
17	Papua	87,73	17	NTT	47,56	17	Jateng	73,04
18	D.I.Y	87,22	18	Kep. Babel	47,11	18	Kep. Babel	72,33
19	Kepri	87,15	19	Jabar	46,42	19	Sulteng	71,36
20	Sultra	85,81	20	Jateng	46,29	20	Lampung	70,64
21	Sumsel	84,05	21	Jambi	46,27	21	Papua	70,04
22	Jateng	84,05	22	Maluku	46,14	22	Sulbar	68,26
23	Riau	83,12	23	Kaltim	45,12	23	Kaltim	68,10
24	Gorontalo	81,80	24	Banten	44,57	24	Gorontalo	68,08
25	Sulses	80,97	25	Gorontalo	44,36	25	Sultra	67,11
26	Banten	80,41	26	Papua Barat	43,99	26	Sulut	66,03
27	Sumut	79,23	27	Sulbar	42,65	27	Aceh	63,77
28	Jabar	78,92	28	Jatim	40,32	28	Malut	62,56
29	Jatim	71,58	29	Sulsel	39,33	29	Bengkulu	61,63
30	Sumbar	60,57	30	Sulteng	37,01	30	Jatim	61,23
31	Aceh	58,65	31	Malut	32,61	31	NTB	61,06
32	Kalsel	56,33	32	Papua	29,43	32	Sumut	60,31
33	NTB	55,45	33	Sultra	29,18	33	Papua Barat	50,03
<b>Indonesia</b>		<b>80,79</b>	<b>Indonesia</b>		<b>47,54</b>	<b>Indonesia</b>		<b>74,72</b>

Sumber: BPS

Tabel 6.13 Skor Tertinggi Tiap Aspek Menurut Provinsi Tahun 2012

Rank	Kebebasan Sipil		Rank	Hak-Hak Politik		Rank	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Skor		Provinsi	Skor		Provinsi	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kaltim	97,16	1	DKI Jakarta	62,52	1	Kalsel	89,33
2	Sulut	95,64	2	Sulut	58,65	2	DKI Jakarta	88,81
3	Papua Barat	94,42	3	DIY	55,52	3	Bali	86,01
4	Bali	94,18	4	Sumsel	55,21	4	Kalteng	85,82
5	Lampung	94,14	5	Kalsel	52,59	5	Sulsel	84,66
6	Sulteng	93,43	6	Kaltim	51,69	6	NTT	84,15
7	Sumsel	93,26	7	Babel	51,21	7	DIY	82,52
8	Kalbar	92,37	8	Kalteng	51,05	8	Jambi	82,18
9	Sultra	91,39	9	Banten	51,03	9	Riau	81,89
10	Papua	91,11	10	NTT	50,89	10	Sumbar	81,32
11	NTT	91,06	11	Sumbar	50,85	11	Babel	80,97
12	Sulbar	88,67	12	Gorontalo	50,76	12	Sulut	80,77
13	Malut	88,15	13	Lampung	50,60	13	Lampung	79,16
14	DKI Jakarta	88,11	14	Malut	50,13	14	Jateng	77,46
15	DIY	87,39	15	Kepri	49,98	15	Sumsel	76,42
16	Sulsel	87,07	16	Sumut	49,82	16	Kalbar	76,23
17	Jambi	86,23	17	NTB	49,60	17	Sulbar	76,22
18	Babel	83,09	18	Bengkulu	48,93	18	Sulteng	72,55
19	Kepri	82,68	19	Aceh	47,16	19	NTB	70,85
20	Jatim	80,97	20	Riau	47,16	20	Banten	70,42
21	Riau	80,21	21	Jambi	46,60	21	Kaltim	69,68
22	Banten	79,20	22	Jabar	46,58	22	Kepri	68,95
23	Bengkulu	77,76	23	Jateng	46,29	23	Malut	66,55
24	Maluku	76,05	24	Papua Barat	45,74	24	Papua	66,50
25	Jateng	75,03	25	Maluku	45,08	25	Jabar	62,51
26	Sumut	73,85	26	Bali	45,00	26	Maluku	62,27
27	Gorontalo	73,25	27	Sulsel	43,74	27	Bengkulu	61,79
28	Kalteng	68,44	28	Sulteng	37,65	28	Papua Barat	61,27
29	Jabar	65,93	29	Kalbar	37,18	29	Sultra	58,44
30	Aceh	60,16	30	Jatim	36,17	30	Aceh	57,21
31	NTB	58,31	31	Sulbar	35,92	31	Gorontalo	55,59
32	Sumbar	57,10	32	Papua	32,99	32	Sumut	53,01
33	Kalsel	49,51	33	Sultra	29,50	33	Jatim	52,22
	<b>INDONESIA</b>	<b>77,94</b>		<b>INDONESIA</b>	<b>46,33</b>		<b>INDONESIA</b>	<b>69,28</b>

Sumber: BPS

## 6.2 Keragaman Indonesia

Keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan merupakan ciri utama yang menjadi ciri masyarakat majemuk (Suparlan, 2002:99). Beberapa negara secara alami terdiri dari masyarakat yang majemuk, namun sebagian lainnya menjadi semakin majemuk karena adanya migrasi. Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Kemajemukan bangsa dan masyarakat Indonesia setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Secara geografis, terdiri atas 13.667 pulau baik yang dihuni maupun yang tidak. Secara etnik, di Indonesia terdapat 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa, serta beragam agama dan kepercayaan yang dianut (Zubair, 2003:113). Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340 suku bangsa.

Kemajemukan memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Gelombang kesadaran akan persamaan perasaan nasib tertindas, mendorong berbagai kelompok berbasis etnis melakukan perlawanan di banyak daerah. Pada tahun 1928 pemuda-pemudayang berasal dari organisasi pemuda benuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti; *Jong Java*, *Jong Borneo*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Islamiten Bond* berkumpul, bersatu dan bersumpah untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia (Zubair, 2003:112). Karena itu dalam sidang BPUPKI tahun 1945, pidato Soekarno menyerukan "...marilah kita mengambil dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.."

Fakta tersebut menjelaskan bahwa negara ini dibangun dan diikat dengan komitmen persatuan bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh kelompok suku bangsa dan agama. Berdasarkan SP 2010 pada tingkat nasional penduduk Indonesia paling banyak suku Jawa dengan jumlah 95,2 juta jiwa, kemudian Sunda 36,7 juta jiwa, dan suku Batak dengan 8,5 juta jiwa (Tabel 6.14). Jumlah penduduk berdasarkan suku dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 6.15, sedangkan jumlah desa menurut banyaknya suku ditampilkan pada Tabel 6.16. Berdasarkan penganut agama, mayoritas penduduk Indonesia penganut Agama Islam dengan jumlah 207,2 juta penganut, selanjutnya Kristen dengan 16,5 juta penganut, dan Katolik dengan 6,9 juta penganut. Informasi tentang penganut agama berdasarkan wilayah dan kelompok umur ditampilkan pada Tabel 6.17 dan 6.18.

**Tabel 6.14 Jumlah Penduduk menurut Suku Bangsa**

Pulau/Kawasan	Kelompok Suku	Jumlah	Persentase	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	Suku-suku Asal Aceh	4.091.451	1,73	14
	Batak	8.466.969	3,58	3
	Nias	1.041.925	0,44	30
	Melayu	5.365.399	2,27	9
	Minangkabau	6.462.713	2,73	7
	Suku-suku asal Jambi	1.415.547	0,6	25
	Suku-suku asal Sumatera Selatan	5.119.581	2,16	10
	Suku-suku asal Lampung	1.381.660	0,58	26
	Suku asal Sumatera Lainnya	2.204.472	0,93	21
Jawa dan Bali	Betawi	6.807.968	2,88	6
	Suku-suku asal Banten	4.657.784	1,97	11
	Sunda	36.701.670	15,5	2
	Jawa	95.217.022	40,22	1
	Cirebon	1.877.514	0,79	24
	Madura	7.179.356	3,03	5
Nusa Tenggara	Bali	3.946.416	1,67	15
	Sasak	3.173.127	1,34	16
	Suku-suku asal Nusa Tenggara Barat	1.280.094	0,54	27
	Suku-suku asal Nusa Tenggara Timur	4.184.923	1,77	12
Kalimantan	Dayak	3.009.494	1,27	17
	Banjar	4.127.124	1,74	13
	Suku-suku asal Kalimantan lainnya	1.968.620	0,83	23
Sulawesi	Makassar	2.672.590	1,13	20
	Bugis	6.359.700	2,69	8
	Minahasa	1.237.177	0,52	29
	Gorontalo	1.251.494	0,53	28
	Suku-suku asal Sulawesi Lainnya	7.634.262	3,22	4
Maluku	Suku-Suku asal Maluku	2.203.415	0,93	22
Papua	Suku-suku asal Papua	2.693.630	1,14	19
	Cina	2.832.510	1,2	18
	Asing/Luar Negeri	162.772	0,07	31
<b>Total</b>		<b>236.728.379</b>	<b>100</b>	

Sumber: Sensus Penduduk 2010 – BPS

Catatan : Cina dan Asing/Luar Negeri adalah penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia



**Tabel 6.15 Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Jenis Kelamin**

Nama Kelompok Suku	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suku-suku Asal Aceh	2.046.592	50,02	2.044.859	49,98	4.091.451
Batak	4.268.074	50,41	4.198.895	49,59	8.466.969
Nias	526.723	50,55	515.202	49,45	1.041.925
Melayu	2.696.036	50,25	2.669.363	49,75	5.365.399
Minangkabau	3.228.346	49,95	3.234.367	50,05	6.462.713
Suku-suku asal Jambi	707.707	50,00	707.840	50,00	1.415.547
Suku-suku asal Sumatera Selatan	2.574.509	50,29	2.545.072	49,71	5.119.581
Suku-suku asal Lampung	693.375	50,18	688.285	49,82	1.381.660
Suku asal Sumatera Lainnya	1.111.821	50,43	1.092.651	49,57	2.204.472
Betawi	3.441.848	50,56	3.366.120	49,44	6.807.968
Suku-suku asal Banten	2.378.474	51,06	2.279.310	48,94	4.657.784
Sunda	18.601.602	50,68	18.100.068	49,32	36.701.670
Jawa	47.827.027	50,23	47.389.995	49,77	95.217.022
Cirebon	961.406	51,21	916.108	48,79	1.877.514
Madura	3.518.361	49,01	3.660.995	50,99	7.179.356
Bali	1.983.212	50,25	1.963.204	49,75	3.946.416
Sasak	1.521.664	47,95	1.651.463	52,05	3.173.127
Suku-suku asal Nusa Tenggara Barat	648.666	50,67	631.428	49,33	1.280.094
Suku-suku asal Nusa Tenggara Timur	2.094.812	50,06	2.090.111	49,94	4.184.923
Dayak	1.518.879	50,47	1.490.615	49,53	3.009.494
Banjar	2.063.769	50,01	2.063.355	49,99	4.127.124
Suku-suku Asal Kalimantan	1.006.260	51,11	962.360	48,89	1.968.620
Makassar	1.325.342	49,59	1.347.248	50,41	2.672.590
Bugis	3.177.757	49,97	3.181.943	50,03	6.359.700
Minahasa	625.128	50,53	612.049	49,47	1.237.177
Gorontalo	631.715	50,48	619.779	49,52	1.251.494
Suku-suku Asal Sulawesi	3.832.710	50,2	3.801.552	49,8	7.634.262
Suku-suku Asal Maluku	1.124.441	51,03	1.078.974	48,97	2.203.415
Suku-suku Asal Papua	1.410.595	52,37	1.283.035	47,63	2.693.630
Cina	1.425.236	50,32	1.407.274	49,68	2.832.510
Asing/Luar Negeri	81.974	50,36	80.798	49,64	162.772
<b>Total</b>	<b>119.054.061</b>	<b>50,29</b>	<b>117.674.318</b>	<b>49,71</b>	<b>236.728.379</b>

Sumber: Sensus Penduduk 2010 – BPS

Catatan : Cina dan Asing/Luar Negeri adalah penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia

**Tabel 6.16 Banyaknya Desa Menurut Keragaman Agama dan Suku**

Provinsi	Agama		Etnis / Suku	
	Satu Agama	Multi Agama	Satu Etnis	Multi Etnis
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5.951	532	2.441	4.042
Sumatera Utara	1.482	4.315	1.238	4.559
Sumatera Barat	660	373	224	809
Riau	499	1.156	152	1.503
Jambi	731	641	267	1.105
Sumatera Selatan	1.871	1.315	541	2.645
Bengkulu	833	676	220	1.289
Lampung	674	1.790	204	2.260
Bangka Belitung	96	265	49	312
Kepulauan Riau	70	283	37	316
DKI Jakarta	5	262	55	212
Jawa Barat	3.404	2.501	1.066	4.839
Jawa Tengah	2.886	5.691	3.463	5.114
DI Yogyakarta	6	432	107	331
Jawa Timur	3.549	4.953	2.759	5.743
Banten	911	624	220	1.315
Bali	153	563	195	521
Nusa Tenggara Barat	636	448	155	929
Nusa Tenggara Timur	896	2.070	794	2.172
Kalimantan Barat	217	1.750	268	1.699
Kalimantan Tengah	169	1.359	224	1.304
Kalimantan Selatan	1.319	681	305	1.695
Kalimantan Timur	337	1.128	249	1.216
Sulawesi Utara	395	1.298	234	1.459
Sulawesi Tengah	443	1.372	148	1.667
Sulawesi Selatan	1.548	1.434	627	2.355
Sulawesi Tenggara	1.302	819	222	1.899
Gorontalo	382	349	181	550
Sulawesi Barat	291	347	129	509
Maluku	520	504	235	789
Maluku Utara	649	430	131	948
Papua Barat	736	703	430	1.009
Papua	2.673	1.251	1.897	2.027
<b>Indonesia</b>	<b>36.294</b>	<b>42.315</b>	<b>19.467</b>	<b>59.142</b>

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS

**Tabel 6.17 Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut**

Provinsi	Agama									Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lain	Tdk Trjwb	Tdk Dtnykn	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	4.413.244	50.309	3.315	136	7.062	36	277	1	20.030	4.494.410
Sumut	8.579.830	3.509.700	516.037	14.644	303.548	984	5.088	1.760	50.613	12.982.204
Sumbar	4.721.924	69.253	40.428	234	3.419	70	493	1.930	9.158	4.846.909
Riau	4.872.873	484.895	44.183	1.076	114.332	3.755	2.088	517	14.648	5.538.367
Jambi	2.950.195	82.311	13.250	582	30.014	1.491	303	313	13.806	3.092.265
Sumsel	7.218.951	72.235	42.436	39.206	59.655	663	164	1.928	15.156	7.450.394
Bengkulu	1.669.081	28.724	6.364	3.727	2.173	41	130	1.538	3.740	1.715.518
Lampung	7.264.783	115.255	69.014	113.512	24.122	596	664	3.442	17.017	7.608.405
Babel	1.088.791	22.053	14.738	1.040	51.882	39.790	323	862	3.817	1.223.296
Kepri	1.332.201	187.576	38.252	1.541	111.730	3.389	198	620	3.656	1.679.163
Jakarta	8.200.796	724.232	303.295	20.364	317.527	5.334	2.410	3.133	30.696	9.607.787
Jabar	41.763.592	779.272	250.875	19.481	93.551	14.723	5.657	66.868	59.713	43.053.732
Jateng	31.328.341	572.517	317.919	17.448	53.009	2.995	5.657	7	84.764	32.382.657
DIY	3.179.129	94.268	165.749	5.257	3.542	159	506	4.557	4.324	3.457.491
Jatim	36.113.396	638.467	234.204	112.177	60.760	6.166	2.042	45.010	264.535	37.476.757
Banten	10.065.783	268.890	115.865	8.189	131.222	3.232	11.722	16	27.247	10.632.166
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282	1	5.513	3.890.757
NTB	4.341.284	13.862	8.894	118.083	14.625	139	40	30	3.255	4.500.212
NTT	423.925	1.627.157	2.535.937	5.210	318	91	81.129	247	9.813	4.683.827
Kalbar	2.603.318	500.254	1.008.368	2.708	237.741	29.737	2.907	671	10.279	4.395.983
Kalteng	1.643.715	353.353	58.279	11.149	2.301	414	138.419	220	4.239	2.212.089
Kalsel	3.505.846	47.974	16.045	16.064	11.675	236	16.465	3	12.308	3.626.616
Kaltim	3.033.705	337.380	138.629	7.657	16.356	1.080	849	1.951	15.536	3.553.143
Sulut	701.699	1.444.141	99.980	13.133	3.076	511	1.363	83	6.610	2.270.596
Sulteng	2.047.959	447.475	21.638	99.579	3.951	141	2.575	638	11.053	2.635.009
Sulsel	7.200.938	612.751	124.255	58.393	19.867	367	4.731	728	12.746	8.034.776
Sultra	2.126.126	41.131	12.880	45.441	978	48	8	1.471	4.503	2.232.586
Gorontalo	1.017.396	16.559	761	3.612	934	11	18	205	668	1.040.164
Sulbar	957.735	164.667	11.871	16.042	326	35	6.535	383	1.057	1.158.651
Maluku	776.130	634.841	103.629	5.669	259	117	6.278	0	6.583	1.533.506
Malut	771.110	258.471	5.378	200	90	212	122	87	2.417	1.038.087
Papua Brt	292.026	408.841	53.463	859	601	25	0	341	4.266	760.422
Papua	450.096	1.855.245	500.545	2.420	1.452	76	174	21	23.352	2.833.381
<b>Jumlah</b>	<b>207.176.162</b>	<b>16.528.513</b>	<b>6.907.873</b>	<b>4.012.116</b>	<b>1.703.254</b>	<b>117.091</b>	<b>299.617</b>	<b>139.582</b>	<b>757.118</b>	<b>237.641.326</b>

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

**Tabel 6.18 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut**

Klmpk Umur	Agama								Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	T. Tjawab dan T. Ditanya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-4	19.701.622	1.730.941	731.201	340.030	117.323	7.349	33.818	16.418	22.678.702
15-18	20.076.013	1.830.056	788.072	364.129	132.162	8.000	36.687	18.361	23.253.480
20-23	19.570.144	1.716.328	738.669	351.300	129.950	7.939	29.180	127.571	22.671.081
15-19	18.047.190	1.490.013	614.571	302.277	135.442	8.402	24.663	258.176	20.880.734
20-24	17.356.491	1.368.715	545.779	275.403	143.362	8.970	23.152	169.761	19.891.633
25-29	18.751.271	1.405.502	552.770	316.382	153.338	9.375	23.360	98.445	21.310.443
30-34	17.394.118	1.356.633	531.404	331.215	131.651	7.563	20.664	57.437	19.830.685
35-39	16.216.251	1.254.291	494.365	356.120	115.180	6.568	19.530	42.826	18.505.131
40-44	14.501.505	1.096.115	448.778	310.958	109.682	6.728	18.042	33.044	16.524.852
45-49	12.333.954	906.890	382.055	258.209	112.479	7.889	16.258	23.248	14.040.982
50-54	10.128.813	741.151	320.824	214.235	114.915	9.161	14.557	17.665	11.561.321
55-59	7.351.878	550.988	246.793	168.424	100.220	8.620	10.690	10.957	8.448.570
60-64	5.249.024	388.405	185.779	136.828	74.438	6.741	9.709	7.837	6.058.761
65-69	4.098.516	277.214	134.964	112.302	53.429	4.709	7.303	5.594	4.694.031
70-74	3.037.243	197.096	90.945	79.280	38.114	3.972	5.626	4.055	3.456.331
75-79	1.729.706	115.960	52.701	48.752	22.741	2.591	3.151	2.303	1.977.905
80-84	1.006.474	63.192	29.007	28.066	11.745	1.503	1.848	1.335	1.143.170
85-89	380.819	26.189	12.410	11.440	4.941	702	787	673	437.961
90-94	150.870	8.611	4.439	4.414	1.617	226	352	370	170.899
95+	94.260	4.223	2.347	2.352	525	83	240	624	104.654
<b>Jumlah</b>	<b>207.176.162</b>	<b>16.528.513</b>	<b>6.907.873</b>	<b>4.012.116</b>	<b>1.703.254</b>	<b>117.091</b>	<b>299.617</b>	<b>896.700</b>	<b>237.641.326</b>

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS



## Daftar Pustaka

Aribowo & Muhammad Asfar, dkk. (2002), "*Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*" Surabaya: Pusdeham.

ASEAN (2013) "Asean Annual Report 2012 – 2013" ASEAN: 2013

Asshidiqie, Jimly (2005), "*Hukum Tata Negara Dan Demokrasi*" Jakarta: Konpress.

Badan Pusat Statistik (2010) "*Indeks Demokrasi 2009*." Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Indeks Demokrasi 2010*." Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_ (2012) "*Indeks Demokrasi 2011*." Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_ (2010) "*Sensus Penduduk 2010*." Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_ (2010) "*Statistik Indonesia 2010*." Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_ (2012) "*Statistik Keuangan Daerah 2008-2011*." Jakarta: BPS.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Statistik Potensi Desa Indonesia 2011*." Jakarta: BPS.

Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Pers (2012) "*Data Pers nasional 2012*" Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers (2011) "*Data Pers nasional 2011*" Jakarta: Dewan Pers.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri (2010) "*Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010*." Jakarta: Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011*." Jakarta: Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2012) "*Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012*." Jakarta: Tidak Diterbitkan.

Freedom House (2011), "*Freedom In The Press 2011*" Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2012), "*Freedom In The Press 2012*" Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2013), "*Freedom In The Press 2013*" Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2011), "*Freedom In The World 2011*" Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2012), "*Freedom In The World 2012*" Tidak Diterbitkan.

\_\_\_\_\_ (2013), "*Freedom In The World 2013*" Tidak Diterbitkan.

Hardiman, F. Budi (2009), "*Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas.*" Jogjakarta: Kanisius.

Haris, Syamsuddin (2008), "*Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amendemen, Konstitusi (2004-2008)*", disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.

Hendrayana "*Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah.*" *Jurnal Dewan Pers* Edisi No 2 November 2010.

Ibrahim, Anis (2008), "*Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah.*" Malang: In-Trans Publishing.

Kejaksaan Agung (2012) "*Laporan Tahunan*" Jakarta: Kejaksaan.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Laporan Tahunan*" Jakarta: Kejaksaan.

Kemenpan & RB (2010), "*Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.*"

Kementerian Luar Negeri (2012) "*Diplomasi Indonesia 2012*" Jakarta: Kemenlu.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Diplomasi Indonesia 2011*" Jakarta: Kemenlu.

\_\_\_\_\_ (2010) "*Diplomasi Indonesia 2010*" Jakarta: Kemenlu.

Komisi Pemilihan Umum (2010) "*Pemilu 2009 Dalam Angka.*" Jakarta: KPU.

Luwarso, Lukas Dkk. (2008), "*Mengelola Kebebasan Pers.*" Jakarta: Dewan Pers.

Mahkamah Agung (2010) "*Laporan Tahunan 2010.*" Jakarta: MA.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Laporan Tahunan 2011.*" Jakarta: MA.

\_\_\_\_\_ (2012) "*Laporan Tahunan 2012.*" Jakarta: MA.

Mahkamah Konstitusi (2010) "*Laporan Tahunan 2010.*" Jakarta: MK.

\_\_\_\_\_ (2011) "*Laporan Tahunan 2011.*" Jakarta: MK.

\_\_\_\_\_ (2012) "*Laporan Tahunan 2012.*" Jakarta: MK.

- Mas'ood, Mohtar & Colin McAndrews (2008), "*Perbandingan Sistem Politik.*" Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- McQuail, Denis (2005), "*Mass Communication Theory, Fifth Edition.*" London: Sage Publications.
- Mujani, Saiful (2007), "*Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rais, M.Amin (2008), "*Selamatkan Indonesia!*" Yogyakarta: PPSK Press.
- Rauf, Maswadi dkk. (2011), "*Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009.*" Jakarta: UNDP.
- Safa'at (2011), "*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*" Jakarta: Rajagrafindo.
- Schein, Edgar H (2004). "*Organizational Culture and Leadership*" USA: Jossey-Bass.
- Sekretariat Jenderal ASEAN (2010) "*Asean Selayang Pandang: Edisi 19 Tahun 2010.*" Jakarta: ASEAN.
- Sekretariat Jendral DPR RI (2010), "*Rencana Strategis DPR RI 2010 – 2014.*"
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1980), "*30 Tahun Indonesia Merdeka, Cetakan Ketiga*" Jakarta: Tira Pustaka.
- Sudarmanto (2009). "*Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyo, Agus Dkk. (2010), "*Media dan Politik Lokal*" Jakarta: Jurnal Dewan Pers No 3, Desember 2010.
- Sisk, Timothy D (2002), "*Demokrasi Di Tingkat Lokal*" Jakarta: AMEEMPRO.
- Suparlan, Parsudi (2002), "*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural.*" Makalah, tidak diterbitkan.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), "*Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*" Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Surbakti, Ramlan (2010), "*Memahami Ilmu Politik*" Jakarta: Grasindo.
- The Economist Intelligence Unit (2011), "*Democracy Index 2010*" Tidak Diterbitkan.
- \_\_\_\_\_ (2012), "*Democracy Index 2011*" Tidak Diterbitkan.
- \_\_\_\_\_ (2013), "*Democracy Index 2012*" Tidak Diterbitkan.



- Thoha, Miftah (2010), *"Birokrasi & Politik di Indonesia."* Jakarta: Rajawali Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wibowo, I & Samsul Hadi (2009), *"Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto"* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zubair, Ahmad Charris (2003), "Membangun Etika Kesadaran Multikulturalisme Di Indonesia." Yogyakarta: Jurnal Filsafat, Agustus 2003, Jilid 34, Nomor 2.

## Website

[www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

[www.dewampers.or.id](http://www.dewampers.or.id)

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)

[www.freedomhouse.org](http://www.freedomhouse.org)

[www.globalfirepower.com](http://www.globalfirepower.com)

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id)

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

<http://www.bps.go.id>



